

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Tekanan meningkat

Maret 2013



THE WORLD BANK

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**

Tekanan meningkat

Maret 2013



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions
for an Emerging Indonesia

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal, unit Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (*Poverty Reduction and Economic Management/PREM*), Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai *Sector Manager* dan *Lead Economist*, Ndiame Diop sebagai *Economic Adviser* dan *Lead Economist* dan Ashley Taylor sebagai *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dengan tanggung jawab di bagian A (perkembangan ekonomi terkini), pengeditan dan produksi adalah Arsianti, Magda Adriani, Fitria Fitriani, Brendan Coates, Faya Hayati, Ahya Ihsan, Shakira Jones, Alex Sienaert dan Ashley Taylor, dan dukungan di bagian administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Dini Sari Djalal, Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Ahya Ihsan (bagian B.1 tentang realisasi anggaran 2012), Fitria Fitriani dan Brendan Coates (bagian B.2 tentang perdagangan), Taimur Samad, Renata Simatupang dan Chandan Deuskar (bagian C.1 tentang urbanisasi) dan Bill Wallace dan Ahya Ihsan (bagian C.2 tentang investasi infrastruktur dengan bantuan data dari Jonathan Sariaatmadja dan Yus Pakpahan). Masukan utama juga diterima dari Kiyoshi Taniguchi (kotak tentang harga daging), Djauhari Sitorus, Neni Lestari and The Fei Ming (perkembangan sektor perbankan, kredit dan korporasi) dan Cindy Paladines dan Matthew Wai-Poi (perkembangan tentang kemiskinan). Bert Hoffman, Yue Man Lee, Sjamsu Rahardja, Theo Thomas, Mark Ahem, Hari Purnomo dan Soekarno Wirokartono juga memberikan tambahan masukan yang penting. Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh Magda Adriani, Arsianti, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Renata Simatupang, Wahyoe Soedarmono.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia - AusAID melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan dan bagian dalam merupakan Hak Cipta © Jufurdy, SECO dan Sri Probo Sudarmo. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi asiennaert@worldbank.org.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan eksekutif: Tekanan meningkat	v
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI	1
1. Kondisi ekonomi global telah sedikit meningkat	1
2. Ekonomi Indonesia terus tumbuh kuat hingga akhir 2012	2
3. Defisit neraca transaksi berjalan menjadikan kebutuhan dan sumber pembiayaan eksternal sebagai sorotan	6
4. Pertumbuhan kredit dan harga aset tetap kuat di awal 2013	9
5. Inflasi ekonomi secara luas rendah tahun 2012 tetapi IHK mulai meningkat belakangan ini	13
6. Defisit fiskal kemungkinan meningkat tahun 2013 karena lebih besarnya belanja subsidi BBM	18
7. Tingkat kemiskinan resmi terus menurun dengan lambat	21
8. Risiko terhadap perkiraan (<i>outlook</i>) menguat disebabkan oleh faktor-faktor domestik	23
B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA	25
1. Tinjauan terhadap realisasi sementara APBN 2012	25
a. Angka sementara defisit anggaran adalah 1.8 percent dari PDB...	26
b. ... penurunan pertumbuhan penerimaan diimbangi oleh rendahnya realisasi belanja utama	26
2. Memahami konsep nilai tambah dalam perdagangan di Indonesia	29
a. Apa yang dapat dipelajari dari perdagangan berdasarkan konsep nilai tambah?	29
b. Produk komoditas menjadi faktor pendorong nilai tambah ekspor Indonesia	29
c. Bahan baku impor semakin banyak digunakan untuk produksi dalam negeri	31
d. Integrasi dengan rantai pasokan internasional dapat membantu diversifikasi ekspor	32
C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN	34
1. Mempersiapkan masa depan perkotaan Indonesia: mengelola dan mengarahkan ekonomi	34
a. Kota sebagai masa depan Indonesia	34
b. Aglomerasi perkotaan membawa manfaat dan tantangan	35
c. Langkah ke depan: memanfaatkan urbanisasi dan aglomerasi di Indonesia	40
2. Menyusun gambaran tren investasi infrastruktur Indonesia	41
a. Investasi infrastruktur belum pulih ke tingkatan pra-krisis Asia	42
b. Apa yang mendorong tren terakhir dalam investasi infrastruktur?	43
e. Menghubungkan infrastruktur, pertumbuhan dan hasil pembangunan	46
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	48

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil tetap kuat tetapi pertumbuhan PDB nominal dan penjualan akhir riil telah melambat	vii
Gambar 2: Investasi infrastruktur secara riil dan sebagai bagian dari PDB tetap di bawah tingkat pra-krisis Asia.....	ix
Gambar 3: <i>Yield</i> obligasi AS tetap mendekati nilai rendah historisnya dan <i>spread</i> hutang negara EM relatif ketat... ..	2
Gambar 4: ...sementara harga sejumlah ekspor komoditas utama Indonesia mulai pulih dari nilai terendahnya belakangan ini	2
Gambar 5: Investasi dan konsumsi swasta tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, melampaui lemahnya ekspor neto	4
Gambar 6: Industri dan Jasa mencatat kinerja yang kuat	4
Gambar 7: Lemahnya impor barang modal menunjukkan kemungkinan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan investasi	4
Gambar 8: Melebarnya defisit neraca berjalan membuat neraca pembayaran dasar tetap mengalami defisit... ..	6
Gambar 9: ...sebagai gabungan atas melemahnya harga dan volume ekspor yang membebani sebagian besar ekspor komoditas.....	6
Gambar 10: Defisit perdagangan migas yang besar telah membebani neraca eksternal.....	7
Gambar 11: Walau tumbuh kuat, FDI yang mengalir ke Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara pembandingnya	8
Gambar 12: Cadangan devisa turun pada bulan Januari dan Februari walau aliran masuk investasi portofolio telah kembali.....	8
Gambar 13: Kebutuhan pembiayaan eksternal bruto cenderung meningkat	9
Gambar 14: ...walau pinjaman dalam valuta asing telah melambat, menjadi di bawah laju pinjaman dalam negeri.....	9
Gambar 15: Imbal hasil masih rendah dan Rupiah terdepresiasi	10
Gambar 16: Penurunan pertumbuhan kredit yang belakangan terjadi telah kembali meningkat untuk saat ini	10
Gambar 17: Aset-aset perbankan Indonesia sebagai bagian dari PDB masih rendah dibanding negara pembandingnya.....	11
Gambar 18: ...walau secara komparatif cepatnya pertumbuhan nominal kredit pada beberapa tahun terakhir	11
Gambar 19: Pertumbuhan harga rumah tinggal masih rendah, terutama secara riil, tapi kini mulai meningkat... ..	12
Gambar 20: ...sementara kredit sektor properti melaju hingga pertengahan 2012, tetapi telah melambat karena pengaruh kenaikan uang muka (<i>loan to value ratio</i>)... ..	12
Gambar 21: Inflasi tahun 2012 terendah dalam 12 tahun terakhir.....	13
Gambar 22: ...ditunjang oleh disinflasi harga pangan pada paruh kedua 2012 sebelum meningkat pada awal 2013	13
Gambar 23: Besaran bobot IHK pada bahan pangan yang terpengaruh oleh kebijakan pembatasan perdagangan berpengaruh pada IHK.....	14
Gambar 24: ...dengan naiknya harga pada waktu berlakunya kebijakan baru tersebut.....	14
Gambar 25: Harga daging sapi dalam negeri telah meningkat tajam	15
Gambar 26: Peningkatan upah minimum mencatat variasi besar antar propinsi Indonesia	16
Gambar 27: Peningkatan harga bahan pangan karena banjir	17
Gambar 28: Kebijakan kehati-hatian fiskal akan berlanjut pada tahun 2013	18
Gambar 29: Belanja untuk subsidi BBM diperkirakan akan melampaui APBN tahun 2013... ..	19
Gambar 30: ...dan bersama-sama dengan tantangan pelaksanaan anggaran, terus membebani kualitas belanja.....	19
Gambar 31: Pengumpulan penerimaan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2013.....	19
Gambar 32: Kemiskinan terus menurun, tetapi lajunya lebih lambat dari yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran RPJM Pemerintah.....	22
Gambar 33: Sebagian besar penduduk masih berada dekat dengan garis kemiskinan resmi, menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan.....	22
Gambar 34: Realisasi defisit anggaran tahun 2012 lebih rendah dari asumsi APBN-P	26
Gambar 35: Penerimaan hampir mencapai sasaran tapi kerjanya bervariasi antar jenis penerimaan	27
Gambar 36: Tantangan pencairan APBN tetap ada untuk belanja inti, belanja subsidi energi meningkat pesat	27

Gambar 37: Seperti tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran 2012 dicairkan pada bulan Desember.....	27
Gambar 38: Ekspor berdasarkan nilai-tambah domestik hanya menyumbang 8 persen dari pertumbuhan Indonesia dalam dekade terakhir hingga tahun 2011.....	30
Gambar 39: Ekspor barang dagangan bruto Indonesia menunjukkan kandungan nilai tambah dalam negeri yang tinggi dan jasa yang rendah.....	30
Gambar 40: Porsi nilai tambah asing dalam sejumlah ekspor produk manufaktur Indonesia cukup besar.....	31
Gambar 41: ...sementara ekspor Cina mengandung lebih banyak masukan impor dibanding Indonesia, kecuali untuk permesinan dan TCF	31
Gambar 42: Impor barang dagang setengah jadi Indonesia mendukung produksi domestik dan bertujuan ekspor.....	32
Gambar 43: ..sementara di Cina, bagian impor produk setengah jadi yang diekspor kembali berjumlah lebih besar	32
Gambar 44: Impor barang-barang modal meningkat sebagai bagian total impor Indonesia	33
Gambar 45: Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami urbanisasi yang tercepat di Asia.....	34
Gambar 46: Terdapat daerah-daerah aglomerasi penting yang padat penduduk di seluruh Indonesia.....	36
Gambar 47: Kota-kota besar dan pusat aglomerasi yang lebih kecil berkembang baik, tidak seperti aglomerasi berukuran menengah	37
Gambar 48: Belanja per kapita untuk infrastruktur berbeda-beda lintas ukuran aglomerasi	38
Gambar 49: Daerah perkotaan Jakarta telah meningkat pesat antara tahun 2000 dan 2010.....	39
Gambar 50: Walau meningkat kuat pada tahun 2007 hingga 2009, investasi infrastruktur kembali turun pada tahun 2010 dan 2011	43
Gambar 51: Tidak seperti investasi infrastruktur, rasio investasi tetap secara keseluruhan telah melampaui tingkat pra-krisis tahun 1997/1998	43
Gambar 52: Perbandingan investasi infrastruktur sektor swasta terhadap PDB turun tajam.....	44
Gambar 53: ...sementara porsi pemerintah daerah telah meningkat dengan proses desentralisasi	44
Gambar 54: Investasi infrastruktur sektor swasta di Indonesia menurun sejak tahun 2008.....	45
Gambar 55: Setelah meningkat pada tahun 2007 hingga 2009 investasi sektor energi telah menurun, dan juga pada telekomunikasi.....	46
Gambar 56: ...tetapi investasi dalam transportasi meningkat, terhitung setengah dari jumlah investasi.....	46

DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan	48
Lampiran gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran	48
Lampiran gambar 3: Kontribusi produksi terhadap PDB	48
Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil.....	48
Lampiran gambar 5: Indikator konsumen	48
Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri	48
Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil	49
Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran	49
Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan.....	49
Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing	49
Lampiran gambar 11: Term of trade dan implisit ekspor-impor berdasarkan chained Fisher-indices.....	49
Lampiran gambar 12:: Inflasi dan kebijakan moneter.....	49
Lampiran gambar 13: Rincian bulanan tingkat harga konsumen	50
Lampiran gambar 14: Perbandingan tingkat inflasi antar negara tetangga.....	50
Lampiran gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional	50
Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	50
Lampiran gambar 17: Indeks saham regional	50
Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar Amerika & rupiah.....	50
Lampiran gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal.....	51
Lampiran gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika.....	51
Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum.....	51
Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan	51
Lampiran gambar 23: Utang pemerintah.....	51
Lampiran gambar 24: Utang luar negeri.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>) pertumbuhan Indonesia diproyeksikan sebesar 6,2 persen pada tahun 2013.....	vii
Tabel 2: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>), pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 6,2 persen untuk tahun 2013, dan meningkat menjadi 6,5 persen untuk tahun 2014	5
Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,9 persen dari PDB pada tahun 2013, sedikit di atas sasaran APBN	21
Tabel 4: Realisasi indikator ekonomi makro tahun 2012 bervariasi dibandingkan asumsi APBN25	
Tabel 5: Barang modal dan peningkatan peran Cina dan NIE di dalam impor Indonesia.....	33

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah	52
Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran	52
Lampiran tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia	53
Lampiran tabel 4: Sekilas tentang perkembangan indikator sosial Indonesia	54

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Harga properti, pertumbuhan kredit dan risiko terhadap stabilitas keuangan.....	12
Kotak 2: Tinjauan pendorong peningkatan harga daging sapi di Indonesia	15
Kotak 3: Banjir besar di Jakarta menyebabkan korban jiwa yang tragis, dan juga gangguan ekonomi yang besar dan peningkatan harga.....	17
Kotak 4: Perubahan komposisi impor Indonesia: pertumbuhan impor barang modal dan peningkatan peran Asia	33
Kotak 5: Catatan metodologi tentang data investasi infrastruktur di Indonesia	42

Ringkasan eksekutif: Tekanan meningkat



Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat tetapi tekanan semakin meningkat

Ekonomi Indonesia terus tumbuh kuat pada kuartal akhir tahun 2012, menjadikan pertumbuhan PDB selama setahun penuh menjadi 6,2 persen. Ini hanya sedikit menurun dari pertumbuhan yang tercatat pada tahun 2011 sebesar 6,5 persen—merupakan kinerja yang kokoh mengingat lemahnya lingkungan dunia dan ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang terjadi hampir sepanjang tahun. Melihat ke depan, Indonesia akan dapat menjaga laju pertumbuhan yang kuat, namun tidak ada waktu untuk berpuas diri, karena sejumlah tekanan mulai meningkat yang dapat menggeser laju pertumbuhan ekonomi keluar dari jalurnya. Ketidakpastian ekonomi global masih tetap tinggi, pertumbuhan investasi Indonesia telah mengalami perlambatan dan, seperti disoroti pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012, kualitas kebijakan dalam negeri semakin menjadi perhatian, terutama dengan semakin dekatnya pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Walau pertumbuhan sebesar 6,0 hingga 6,5 persen dapat terjaga, terdapat risiko bahwa, tanpa kemajuan lebih lanjut dalam reformasi dan implementasi kebijakan, terdapat kemungkinan hilangnya kesempatan bagi Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ketika ekonominya sedang memperoleh dukungan dari peningkatan angkatan kerja dan pengaruh aglomerasi urbanisasi. Pemilihan terhadap pelaku utama penentu kebijakan ekonomi berikutnya, dengan adanya pencalonan Menteri Keuangan menjadi Gubernur Bank Indonesia berikutnya, juga akan mempengaruhi lingkungan kebijakan makro ekonomi ke depan.

Indikator ekonomi global telah sedikit membaik, harga komoditas telah mulai meningkat dari nilai rendahnya belakangan ini dan pasar keuangan memberikan dukungan positif

Banyak mitra perdagangan utama Indonesia masih menemui tantangan pada kuartal akhir tahun 2012; AS dan Jepang mencatat pertumbuhan yang datar dan resesi di wilayah Euro semakin dalam, walau pertumbuhan di Cina menguat. Bergerak ke tahun 2013, pertumbuhan dunia tetap lemah tetapi kondisi ekonomi internasional telah bergerak menjadi lebih mendukung pertumbuhan di Indonesia. Produksi industri dunia sedikit meningkat, dan perdagangan dunia kembali meningkat kembali, dengan peningkatan yang luas pada ekspor-ekspor negara berkembang. Secara umum harga-harga komoditas juga mencatat sedikit peningkatan sejak bulan Desember, termasuk beberapa produk ekspor utama Indonesia seperti tembaga, karet dan minyak kelapa sawit. Membaiknya data ekonomi global, dan menurunnya kekhawatiran terhadap risiko skenario yang parah di wilayah Euro, AS dan Cina, bersama-sama dengan kebijakan moneter yang akomodatif di sebagian besar negara maju, secara umum telah mendukung pasar keuangan. Pasar ekuitas dunia membaik pada dua bulan terakhir tahun 2012 dan umumnya masih bertahan, dengan indeks ekuitas sejumlah negara maju berada pada atau mendekati nilai-nilai tertingginya secara nominal. Selisih (*spread*) obligasi negara pasar berkembang sejauh ini telah melebar pada tahun 2013 tetapi masih mendekati tingkat paling rendahnya sejak krisis keuangan dunia.

Pertumbuhan dunia diperkirakan sedikit meningkat pada tahun 2013, tetapi ketidakpastian masih tetap tinggi

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan dunia akan sedikit meningkat pada tahun 2013, naik menjadi 2,4 persen dari 2,3 persen pada tahun 2012, sebelum bergerak naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan yang kecil ini pun masih diselimuti oleh risiko, dengan ketidakpastian kebijakan yang masih mengelilingi prospek (*outlook*). Sementara AS menghindari “jurang fiskal” pada awal tahun, besaran konsolidasi fiskal belumlah jelas

dan akan bergantung kepada seberapa panjangnya masa penghematan belanja itu akan berlangsung. Kondisi ekonomi di wilayah Euro masih sangat menantang. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Cina merupakan titik terang utama di antara ekonomi-ekonomi terbesar dunia tetapi terjadi peningkatan yang cepat dalam kredit dan nilai properti.

Indonesia mencatat pertumbuhan PDB yang kuat pada kuartal 4 2012, tetapi pertumbuhan investasi menurun dan ekspor bersih tetap menjadi beban terhadap pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal akhir tahun 2012 berlanjut tetap kuat walaupun kondisi eksternal tetap menantang. PDB meningkat sebesar 6,1 persen tahun-ke-tahun, sedikit turun dari 6,2 persen pada kuartal 3, dan meningkat secara berurutan menjadi 1,7 persen kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman, dibanding 1,3 persen pada kuartal 3. Konsumsi swasta (rumah tangga), yang merupakan 55 persen dari PDB, mencatat kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan. Namun pengeluaran Pemerintah mencatat kontraksi, yang secara sebagian mencerminkan pembatasan belanja yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2012. Belanja modal pemerintah pusat terus meningkat kuat, dengan realisasi sementara APBN-P 2012 menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 19 persen secara nominal (walau tingkat pencairan dibanding alokasi APBN-P yang mengalami peningkatan yang signifikan hanya mencapai 80 persen). Namun belanja investasi pemerintah hanya merupakan bagian yang kecil dari total investasi tetap (total fixed investment), dimana tingkat pertumbuhannya menurun ke 7,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4, turun dari puncaknya sebesar 12,5 persen tahun-ke-tahun yang dicatat pada kuartal 2 tahun 2012. Beban yang besar terhadap pertumbuhan belakangan ini adalah ekspor bersih, yang menurunkan pertumbuhan sebesar 1,5 persen pada tahun 2012, yang mencerminkan lemahnya pertumbuhan ekspor dan kuatnya peningkatan impor.

Neraca berjalan mencatat pembalikan arah yang signifikan pada tahun 2012, bergerak dari surplus kecil ke defisit sebesar 2,7 persen dari PDB, tetapi aliran masuk modal asing, terutama FDI, masih bertahan kuat

Defisit neraca berjalan meningkat menjadi 3,6 persen dari PDB pada kuartal 4 tahun 2012, yang membawa defisit tahun 2012 secara keseluruhan menjadi 24,2 miliar dolar AS, atau 2,7 persen dari PDB (dibandingkan surplus sebesar 0,2 persen pada tahun 2011). Selama pertengahan tahun 2012 sebagian besar penurunan datang dari cepatnya penyusutan surplus neraca perdagangan non-migas, yang diikuti dengan pelebaran defisit minyak pada beberapa bulan terakhir, yang mencapai nilai tertinggi sebesar 23 miliar dolar AS untuk tahun 2012. Keseluruhan neraca pembayaran masih mencatat surplus pada kuartal 4, berkat kuatnya aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing langsung (FDI) yang dicatat Bank Indonesia naik 3 persen pada tahun 2011 sebesar 20 miliar dolar AS. Namun neraca dasar (saldo neraca berjalan ditambah investasi langsung bersih) tetap negatif, yang menunjukkan berlanjutnya ketergantungan kepada investasi portofolio yang mudah bergejolak. Selain itu, hutang luar negeri telah meningkat dengan cukup signifikan selama tahun lalu, dan sementara metrik keberlanjutan hutang (*debt sustainability*) masih tetap kuat, akibatnya kebutuhan pendanaan eksternal bruto menjadi meningkat. Dengan demikian sangatlah penting untuk terus meningkatkan FDI, dan mendorong aliran masuk modal portofolio asing, demi memenuhi kebutuhan pendanaan.

Posisi fiskal secara agregat tetap sehat tetapi belanja subsidi energi terus mendorong biaya kesempatan yang tinggi

Angka realisasi sementara defisit APBN 2012 adalah Rp 146 triliun (1,8 persen dari PDB). Defisit ini lebih rendah dari sasaran APBN-P sebesar 2,2 persen dari PDB, yang mencerminkan belanja modal dan barang yang lebih rendah dari perkiraan, yang melebihi belanja subsidi energi yang lebih tinggi yang mencapai 3,7 persen dari PDB (naik dari 3,4 persen pada tahun 2011), atau hampir sepertiga dari jumlah belanja pemerintah pusat. Pada tahun 2013, Pemerintah akan melanjutkan kehati-hatian fiskalnya, dengan menetapkan defisit anggaran sebesar 1,7 persen dari PDB. Tantangan masih tetap ada dalam upaya meningkatkan alokasi dan efisiensi belanja, walau dengan penyesuaian tarif listrik, akan terus dilemahkan oleh subsidi energi. Subsidi bahan bakar, khususnya, telah berkontribusi terhadap tekanan dalam neraca perdagangan akhir-akhir ini, menambahkan terhadap biaya kesempatan, tidak tepat sasaran, dan dampak distorsi dalam penggunaan energi. Pemerintah baru-baru ini menyatakan rencana untuk mengumumkan perubahan sistem subsidi bahan bakar.

Tekanan inflasi meningkat, walaupun terkendali selama tahun 2012, mulai naik pada bulan Februari

Rata-rata inflasi IHK tahunan pada tahun 2012, sebesar 4,3 persen tahun-ke-tahun, merupakan yang terendah selama 12 tahun terakhir. Setelah itu IHK meningkat tajam, naik 1 persen sejak bulan Desember 2012 menjadi 5,3 persen tahun-ke-tahun pada bulan Februari 2013, sebagai akibat dari tingginya inflasi harga bahan pangan (sebagai dampak dari kebijakan perdagangan yang baru dan banjir parah di Jakarta dan sekitarnya) dan naiknya tarif listrik. Namun inflasi inti masih tetap stabil pada 4,3 persen. Melihat ke

depan, inflasi tampaknya akan bergerak mendekati batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 4,5-5,5 persen, karena pertumbuhan kredit dan permintaan dalam negeri diperkirakan akan tetap tinggi, dan tekanan pendorong biaya (*cost-push*) diproyeksikan akan meningkat karena naiknya harga subsidi, lebih tingginya upah minimum, dan pengaruh dari melemahnya Rupiah. Tekanan harga pada pasar properti, sektor yang telah mencatat pertumbuhan harga yang kuat, dan laju pertumbuhan kredit (yang telah melambat tetapi tetap tinggi) juga membutuhkan pemantauan secara cermat.

Tabel 1: Menurut skenario dasar (*baseline*) pertumbuhan Indonesia diproyeksikan sebesar 6,2 persen pada tahun 2013

		2011	2012	2013	2014
Produk domestik bruto	(Persen perubahan tahunan)	6,5	6,2	6,2	6,5
Indeks harga konsumen *	(Persen perubahan tahunan)	5,4	4,3	5,5	5,2
Surplus/defisit anggaran **	(Persen dari PDB)	-1,2	-1,8	-1,7	-1,4
Pertumbuhan mitra perdagangan utama	(Persen perubahan tahunan)	3,6	3,4	3,7	4,0

Catatan: *Rata-rata tahunan **Angka Pemerintah untuk defisit anggaran: 2012 adalah realisasi sementara, 2013 adalah APBN dan 2014 dari Nota Keuangan RAPBN 2013

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, Consensus Forecasts Inc., perhitungan staf Bank Dunia

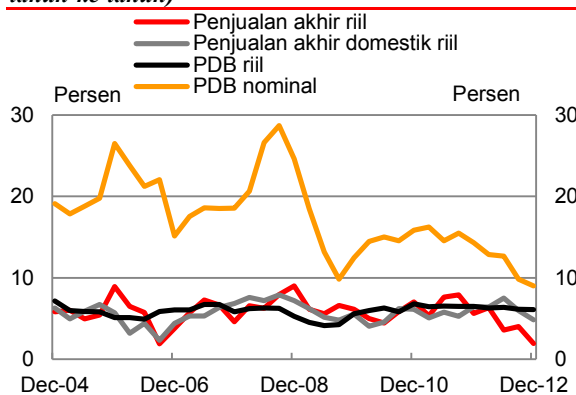
Prospek (*outlook*) dasar (*baseline*) adalah PDB Indonesia akan melanjutkan pertumbuhan mendekati lajunya akhir-akhir ini

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB jangka pendek tetap mendekati laju seperti saat ini, sebesar 6,2 persen pada tahun 2013 dan 6,5 persen pada tahun 2014 (Tabel 1). Konsumsi swasta diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan, dengan potensi dorongan tambahan yang berasal dari pengeluaran yang berkaitan dengan pemilu dengan semakin dekatnya pemilihan umum tahun 2014. Walaupun prospek (*outlook*) dasar (*baseline*) tetap kuat, arah belanja investasi kedepan merupakan faktor ketidakpastian utama dalam proyeksi Bank Dunia, seperti dibahas di bawah, dengan perlambatan pertumbuhan investasi tahun-ke-tahun akhir akhir ini menyebabkan penurunan tipis sebesar 0,1 persen dalam proyeksi pertumbuhan PDB untuk tahun 2013 dari proyeksi yang tercantum pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012. Ekspor bersih tampaknya akan masih membebani pertumbuhan pada tahun 2013, dengan ekspor yang akan mengalami pemulihan lambat tetapi impor akan terus meningkat kuat. Memasuki tahun 2014, kinerja ekspor diperkirakan meningkat lebih lanjut dengan peningkatan pertumbuhan mitra perdagangan utama Indonesia yang membantu meningkatkan pertumbuhan PDB menjadi 6,5 persen.

Namun terdapat sejumlah tanda-tanda tekanan dari data-data terakhir menyarankan tidak ada waktu untuk berpuas diri terhadap prospek pertumbuhan...

Sementara pertumbuhan PDB diperkirakan akan tetap bertahan kuat, risiko-risiko terhadap prospek (*outlook*) tetap condong kepada penurunan. Pertumbuhan *output* riil tetap bertahan kuat tetapi penurunan momentum dapat terlihat pada pertumbuhan *output* nominal, dan secara pengukuran penjualan akhir riil, yaitu keseluruhan PDB tidak termasuk akumulasi persediaan dan perbedaan statistik (Gambar 1). PDB nominal menurun pada kuartal 4 tahun 2012 menjadi 9,3 persen tahun-ke-tahun, laju yang paling lambat sejak tahun 2004. Pertumbuhan penjualan akhir riil telah menunjukkan tren yang lebih rendah sejak pertengahan tahun 2011, terutama karena beban dari ekspor bersih, tetapi

Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil tetap kuat tetapi pertumbuhan PDB nominal dan penjualan akhir riil telah melambat
(*pertumbuhan PDB dan penjualan akhir riil, persen, tahun-ke-tahun*)



Catatan: Penjualan akhir riil (dalam negeri) = konsumsi + investasi tetap + konsumsi pemerintah + ekspor bersih (-ekspor bersih)

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

pertumbuhan penjualan dalam negeri juga turun dari keseluruhan pertumbuhan PDB pada kuartal akhir tahun 2012. Dinamika-dinamika tersebut harus ditafsirkan secara hati-hati karena sulitnya proses pengukuran dari data-data neraca nasional, tetapi setidaknya mereka dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan permintaan telah sedikit melemah, dengan sejumlah akumulasi persediaan yang ada selama ini melindungi pertumbuhan *output*.

...dengan potensi perlambatan lebih lanjut dalam pertumbuhan investasi menjadi perhatian khusus

Risiko utama dalam negeri terhadap pertumbuhan adalah prospek investasi. Investasi swasta, yang berkontribusi terhadap sebagian besar pembentukan modal tetap, diperkirakan akan terus meningkat dengan pesat hingga tahun 2014, tetapi penurunan impor barang modal menunjukkan bahwa perlambatan akhir-akhir ini dalam pertumbuhan investasi dapat berlanjut, terutama jika sejumlah risiko terhadap prospek menjadi kenyataan. Pertama, investasi dapat semakin dibebani oleh perlemahan kondisi pasar komoditas, yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 2011 dan yang dapat membawa dampak tertunda terhadap pengeluaran investasi secara agregat, terutama pada sektor-sektor sumber daya yang padat modal di mana investasi tidak merata. Kedua, investasi telah didorong oleh pertumbuhan besarnya konsumen dalam negeri, dan sementara hal ini diperkirakan akan terus berlanjut, terdapat risiko-risiko bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat mengurangi pertumbuhan daya beli riil. Selain itu, biaya pinjaman konsumen dan investasi akan terpengaruh bila Bank Indonesia memutuskan untuk melaksanakan kebijakan pengetatan moneter, yang saat ini akomodatif. Akhirnya, investasi tampaknya akan menghadapi sejumlah rintangan dari ketidakpastian regulasi saat ini, dan kemungkinan berlanjut, dan pengaruh politik dengan semakin mendekatnya pemilu tahun 2014 di saat yang bersamaan. Indonesia juga menghadapi persaingan regional yang ketat untuk investasi berorientasi ekspor. Jika investasi benar-benar melambat, dampaknya terhadap pertumbuhan akan bersifat nyata. Sebagai contoh indikatif, penurunan pertumbuhan investasi ke setengah dari tingkatnya pada tahun 2012, menjadi 5 persen pada tahun 2013, akan menurunkan pertumbuhan PDB riil kira-kira sebesar 1 poin persentase.

Kemiskinan terus menurun tetapi kerentanan tetap tinggi dan dibutuhkan laju pengentasan kemiskinan yang lebih cepat untuk memenuhi sasaran Pemerintah

Tingkat kemiskinan resmi terus menurun dengan lambat, menjadi 11,7 persen pada bulan September 2012, turun dari 12,5 persen pada tahun 2011. Namun tingkat kerentanan masih tetap tinggi, dengan hampir 40 persen dari penduduk hidup dengan tingkat konsumsi di bawah 1,5 kali garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan harus diturunkan secara lebih cepat agar Pemerintah dapat mencapai sasaran pengentasan kemiskinannya (sesuai definisi resmi pemerintah) menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Perlambatan dalam pertumbuhan PDB nominal seperti disinggung di atas, bersamaan dengan melemahnya Rupiah, juga telah menurunkan peningkatan bila diukur dalam kurs dolar AS sekarang. Menurut angka-angka BPS, PDB per kapita pada tahun 2012 adalah 3.563 dolar AS, meningkat hanya sebesar 1,8 persen dari 3.498 dolar AS pada tahun 2011 ketika laju pertumbuhan mencapai 17,5 persen.

Data terbaru tentang perdagangan Indonesia secara nilai tambah menunjukkan dinamika perdagangan, yang belakangan ini membebani pertumbuhan

Kinerja ekspor yang relatif lemah, yang turun sebesar 6 persen secara nominal dolar AS pada tahun 2012 karena turunnya harga komoditas, menarik perhatian terhadap pola perdagangan Indonesia. Data-data baru dari OECD dan WTO tentang perdagangan secara nilai tambah (*trade in value-added terms*)—yaitu nilai barang-barang dan jasa-jasa suatu ekonomi yang terkandung di dalam ekspornya, setelah memperhitungkan penggunaan input barang baku setengah jadi yang diimpor dan jasa—memberikan wawasan yang baru dalam hal ini. Pengukuran perdagangan Indonesia menurut nilai tambahnya menunjukkan bahwa sementara sebagian besar dari keseluruhan ekspor mengandung nilai tambah domestik karena besarnya bagian komoditas, terdapat bagian yang signifikan dari ekspor barang manufaktur yang mengandung nilai tambah dari barang impor yang telah terkandung di dalamnya. Sekitar sepertiga dari barang baku setengah jadi yang diimpor ternyata diekspor kembali, sehingga memperlihatkan kuatnya keterkaitan antara ketersediaan impor dan kinerja dari ekspor manufaktur. Selain itu, tambahan nilai dari jasa dalam ekspor Indonesia sangat rendah. Hal ini dapat mencerminkan terbatasnya perkembangan jasa domestik untuk mendukung ekspor. Dorongan untuk menggunakan jasa-jasa tersebut tampaknya dapat membantu kinerja ekspor secara keseluruhan.

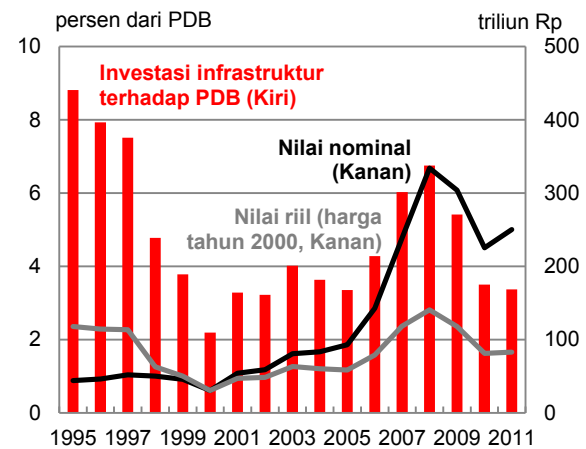
Investasi infrastruktur sebagai bagian dari PDB masih berada di bawah tingkat sebelum krisis keuangan Asia dan perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan...

Infrastruktur yang lebih baik juga sangat penting jika Indonesia hendak meningkatkan kinerja ekspor dan merealisasikan potensi ekonominya. Namun investasi infrastruktur telah tertinggal dari pembangunan ekonomi, dan ada kekhawatiran bahwa kecuali pembangunan infrastruktur dapat mengejar ketinggalannya, maka masalah hambatan (*bottleneck*) dan biaya transportasi dan logistik akan menurunkan laju pertumbuhan yang berkelanjutan di Indonesia. Data-data baru yang dihimpun oleh Bank Dunia menunjukkan perkiraan tren investasi infrastruktur dari tahun 1994 hingga 2011 dalam bidang transportasi, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi dan telekomunikasi. Tidak termasuk peningkatan tajam pada tahun 2007 hingga 2009 yang berkaitan dengan program investasi pembangkit listrik 10.000 MW, investasi infrastruktur tetap berada sekitar 3 persen dari PDB, dibanding tingkat pra-krisis sekitar 7 persen dari PDB (Gambar 2). Khususnya investasi infrastruktur swasta telah turun, sementara desentralisasi telah mendorong proporsi pemerintah daerah terhadap total investasi semakin meningkat, terutama dengan fokus terhadap jalan daerah. Perkiraan awal ini menunjukkan besarnya tantangan untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Sama pentingnya adalah peningkatan kualitas investasi dan memastikan pengeluaran yang sesuai untuk operasional dan pemeliharaan.

...dan untuk membantu memastikan bahwa cepatnya laju urbanisasi menjadi kekuatan yang positif

Salah satu alasan mengapa peningkatan investasi infrastruktur sangatlah penting adalah kenyataan bahwa Indonesia terus mencatat proses urbanisasi yang cepat, menjadi negara dengan mayoritas penduduk yang hidup di daerah perkotaan pada tahun 2011, menurut perhitungan PBB. Bangkitnya kota-kota di Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang besar, yang mendorong peningkatan dalam lapangan kerja non-pertanian dan pembentukan rumah tangga yang baru, yang mendukung pertumbuhan permintaan dalam negeri dan mengangkat taraf hidup. Pada sisi penawaran, aglomerasi ekonomi membuka kesempatan untuk mendorong peningkatan produktivitas. Namun tidak semua daerah aglomerasi di Indonesia mencatat kinerja yang baik, dengan aglomerasi berukuran besar dan menengah tertinggal dari pusat perkotaan yang berukuran lebih kecil dan kota-kota yang berukuran sangat besar (*mega-city*). Untuk memetik manfaat dari aglomerasi, belanja investasi infrastruktur yang lebih tinggi dan lebih efisien merupakan hal yang sangat penting, karena akses penduduk Indonesia kepada layanan-layanan dasar tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya. Tantangan kebijakan lainnya termasuk pengadaan rumah dan penanganan penyebaran daerah perkotaan, yang membutuhkan peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan sektor swasta.

Gambar 2: Investasi infrastruktur secara riil dan sebagai bagian dari PDB tetap di bawah tingkat pra-krisis Asia (investasi infrastruktur sebagai bagian dari PDB, persen; investasi infrastruktur riil dan nominal, triliun Rp)



Catatan: Nilai riil dihitung berdasarkan deflator PDB keseluruhan.

Sumber: Data investasi infrastruktur seperti yang diuraikan di kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI



1. Kondisi ekonomi global telah sedikit meningkat

Kuartal terakhir tahun 2012 tetap menantang bagi sebagian besar mitra dagang utama Indonesia

Kuartal terakhir tahun 2012 tetap menantang bagi sebagian besar mitra dagang utama Indonesia. Pada tahun 2013, pertumbuhan global tetap lambat walaupun kondisi ekonomi internasional telah bergerak ke arah yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi AS dan Jepang mencatat pertumbuhan yang datar (masing-masing sebesar 0,1 persen dan 0,0 persen, menurut laju dengan penyesuaian musiman yang disetahunkan). Resesi di wilayah Euro semakin mendalam, dengan penurunan PDB sebesar 0,6 persen kuartal-ke-kuartal. Di antara ekonomi-ekonomi terbesar dunia, Cina menjadi titik terang utama pada kuartal 4 tahun 2012, dengan pertumbuhan PDB meningkat ke 2 persen kuartal-ke-kuartal.

Kondisi ekonomi global sedikit membaik di awal tahun 2013...

Sementara kondisi ekonomi global pada penghujung tahun 2012 masih tetap lemah, sejumlah peningkatan pada indikator-indikator utama terlihat pada bulan-bulan terakhir tahun 2012, yang berlanjut ke tahun 2013. Produksi industri dunia berhenti berkontraksi pada bulan Oktober dan merayap naik sebesar 0,1 persen dengan penyesuaian musiman yang disetahunkan pada kuartal empat. Pertumbuhan (*output*) manufaktur terus berlanjut ke kuartal pertama tahun 2013, dipimpin oleh peningkatan lebih lanjut di AS dan keadaan stabil yang ditunjukkan oleh sektor manufaktur wilayah Euro setelah periode kontraksi yang panjang. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2012, volume perdagangan dunia juga kembali meningkat.

...tetapi kemajuan berjalan lambat dan tidak merata

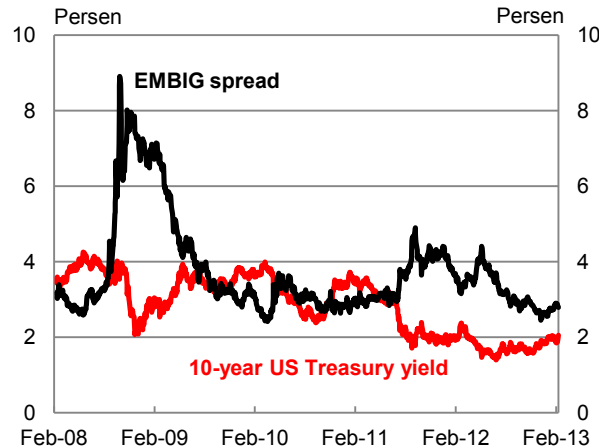
Melihat kedepan, ketidakseragaman gambaran ekonomi global beragam ditunjukkan oleh sedikit membaiknya indikator-indikator ekonomi, tetapi masih belum ada kepastian faktor yang memberatkan pemulihan pertumbuhan dan ketipastian kebijakan di negara-negara berpendapatan tinggi. Peningkatan ekonomi global tetap berjalan lambat dan tidak merata, dan arah pemulihan masa depannya masih menjadi tanda tanya besar. Di AS, ekonomi baru-baru ini mulai mendapat dorongan yang baru, dibantu dengan pemulihan pasar perumahan, tetapi ada ketidakpastian akan jumlah beban diakibatkan oleh konsolidasi fiskal. Hal ini akan bergantung kepada berapa lama otoritas pemotongan anggaran, yang mulai berlaku pada awal bulan Maret. Di wilayah Euro, kondisi ekonomi masih tetap menantang di tengah-tengah ketidakpastian politik dan kebijakan yang masih terus berlangsung. Di Cina, percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh cepatnya pertumbuhan kredit.

Harga-harga aset keuangan internasional dan komoditas telah meningkat

Membaiknya data ekonomi, menurunnya kekhawatiran terhadap risiko skenario terburuk di wilayah Euro, AS dan Cina, bersama-sama dengan kebijakan moneter yang akomodatif pada sebagian besar ekonomi berpenghasilan tinggi, secara umum telah mendukung pasar keuangan. Ekuitas pasar negara maju dan berkembang telah bersama-sama bangkit pada dua bulan terakhir tahun 2012 dan umumnya berhasil bertahan dalam mata uang negara bersangkutan, yang menjadikan nilai nominal sejumlah indeks mendekati nilai tertingginya. *Spread* obligasi negara pasar berkembang telah melebar dari nilai paling rendahnya pada awal tahun, tetapi masih berada cukup jauh di bawah nilai rata-rata tahun 2011-2012 (Gambar 3). Harga-harga sejumlah komoditas ekspor utama

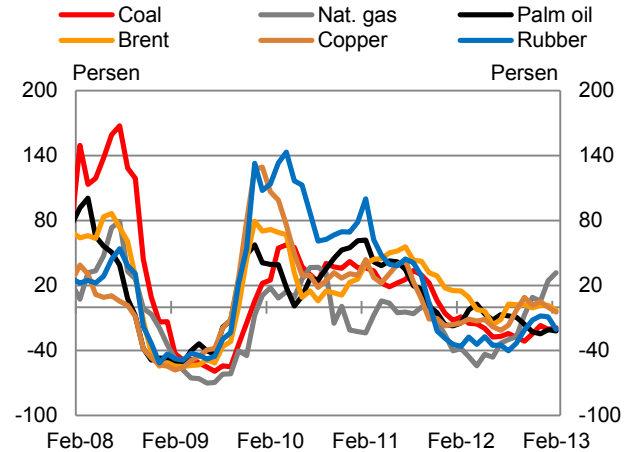
Indonesia sedikit meningkat dari nilai rendahnya pada paruh kedua tahun 2012, walau sebagian besar masih sangat rendah dibanding satu tahun yang lalu (Gambar 4).

Gambar 3: Yield obligasi AS tetap mendekati nilai rendah historisnya dan spread hutang negara EM relatif ketat... (pertumbuhan PDB riil, persen)



Sumber: JP Morgan

Gambar 4: ...sementara harga sejumlah ekspor komoditas utama Indonesia mulai pulih dari nilai terendahnya belakangan ini (perubahan tahun-ke-tahun dalam harga dolar AS, persen)



Sumber: Bank Dunia

2. Ekonomi Indonesia terus tumbuh kuat hingga akhir 2012

Pertumbuhan ekonomi tetap kuat tetapi menunjukkan tanda-tanda perlambatan mendorong penurunan, perkiraan Bank Dunia terhadap pertumbuhan PDB 2013, menjadi 6,2 persen

Ekonomi Indonesia tetap kuat sampai pada kuartal akhir tahun 2012, ditunjang oleh pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi. Meningkatnya diskrepansi statistik antara PDB yang diukur dari sisi produksi dan sisi belanja, agak menyulitkan analisa, tetapi dapat mengindikasikan perlemahan dalam pertumbuhan permintaan riil. Pertumbuhan PDB nominal juga telah turun dan pertumbuhan investasi melemah. Walaupun terjadi penurunan ekspor neto, diharapkan penurunan tersebut akan berkurang pada tahun 2013, faktor-faktor tersebut berkontribusi pada penurunan proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tahun 2013 menjadi 6,2 persen, sedikit lebih rendah dari 6,3 persen yang diproyeksikan pada IEQ Desember 2012.

Pertumbuhan PDB riil pada kuartal 4 2012 hanya sedikit melambat dibanding kuartal 3

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh mantap, walaupun dibebani oleh melemahnya permintaan eksternal. PDB tumbuh 6,1 persen tahun-ke-tahun di kuartal 4 tahun 2012, menjadikan kuartal ini merupakan kuartal ke-9 berturut-turut yang mengalami pertumbuhan diatas 6 persen. Pertumbuhan kuartal ke-4 sedikit lebih rendah dari 6,2 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 3, walaupun dengan perhitungan perubahan musiman (seasonally-adjusted) ekonomi tumbuh 1,7 persen kuartal-ke-kuartal, meningkat dari 1,3 persen pada kuartal 3 (Gambar 5). Secara keseluruhan, untuk tahun 2012, pertumbuhan PDB riil sebesar 6,2 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,5 persen.

...tetapi pertumbuhan PDB nominal semakin menurun secara signifikan

Sementara PDB riil masih tetap bertahan pada kuartal akhir tahun 2012, pertumbuhan PDB nominal melambat secara signifikan menjadi 9,0 persen tahun-ke-tahun. Laju tersebut merupakan yang paling lambat dalam 8 tahun terakhir, dan melanjutkan penurunan pertumbuhan PDB nominal dari nilai puncaknya sebesar 16,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal pertama tahun 2011. Perlemahan ini disebabkan oleh penurunan tajam pertumbuhan deflator PDB, pengukuran harga-harga yang paling luas lintas ekonomi. Sementara tingkat disinflasi ini mengejutkan, menimbang kuatnya laju pertumbuhan *output*, tren penurunan ini sebagian didorong oleh penurunan tajam harga ekspor yang tercatat selama tahun 2012, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama Indonesia. Sektor pertambangan dan penggalian bahkan mencatat deflasi tajam pada kuartal akhir tahun 2012, dengan harga *output*-nya turun sebesar 2,2 persen tahun-ke-tahun, yang sejalan dengan penurunan harga komoditas dunia.

Pada sisi produksi pertumbuhan umumnya datar secara tahun ke tahun, kecuali di sektor pertanian dan sub-sektor ekstraksi migas

Pada sisi produksi, hanya sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan saja yang mencatat penurunan secara berurutan (kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman), yang didorong oleh penurunan pada tanaman bukan pangan (Gambar 6). Sektor ini cenderung menunjukkan pertumbuhan yang bergejolak dan hanya merupakan sebagian kecil dari PDB (12,3 persen pada kuartal 4). Pertambangan dan penggalian meningkat sebesar 0,5 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4, setelah menurun sebesar 0,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga. Kinerja yang lambat ini disebabkan oleh berlanjutnya perlemahan pada ekstraksi migas, yang menurun selama enam kuartal berturut-turut, menjadi 4,6 persen tahun-ke-tahun. Kebalikannya, pertambangan non-migas meningkat sebesar 4,4 persen tahun-ke-tahun. Sektor manufaktur tumbuh dengan kuat sebesar 6,2 persen tahun-ke-tahun, dibanding 5,9 persen pada kuartal 3, walaupun pertumbuhan manufaktur migas tetap menurun (menyusut sebesar 3,5 persen tahun-ke-tahun). Konstruksi juga mencatat kinerja yang kuat, meningkat sebesar 7,8 persen tahun-ke-tahun, sementara sektor jasa juga mencatat kinerja kuat, tumbuh sebesar 7,6 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4.

Kuatnya konsumsi swasta terus mendukung permintaan, sementara konsumsi pemerintah melemah

Pada sisi pengeluaran, permintaan riil dalam negeri tumbuh kuat pada kuartal 4, yang didukung kuatnya konsumsi swasta yang merupakan lebih dari setengah permintaan secara agregat. Konsumsi swasta meningkat sebesar 5,4 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4, dan sebesar 1,1 persen secara kuartal-ke-kuartal (penyesuaian musiman), yang mencerminkan kuatnya konsumsi bahan pangan dan bukan bahan pangan. Untuk tahun 2012 secara keseluruhan, konsumsi swasta meningkat sebesar 5,3 persen, laju yang paling tinggi selama 4 tahun terakhir. Sebaliknya, konsumsi pemerintah tetap turun pada kuartal 4, menurun 3,3 persen tahun-ke-tahun. Penurunan ini disebabkan oleh pembatasan pengeluaran yang diberlakukan pada pertengahan 2012. Akibat dari pembatasan ini, konsumsi pemerintah hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2012, melemah dari 3,2 persen di tahun 2011.

pertumbuhan investasi, walau masih tinggi, menunjukkan penurunan...

Investasi riil meningkat sebesar 7,3 persen tahun-ke-tahun, laju yang cepat tapi masih berada cukup jauh dari 9,8 persen yang tercatat pada kuartal ketiga. Pendorong pelambatan ini adalah penurunan yang signifikan dalam investasi permesinan dan peralatan asing, yang meningkat hanya sebesar 4,3 persen tahun-ke-tahun pada kuartal 4, turun dari pertumbuhan sebesar 23,8 persen yang dicatat pada kuartal kedua tahun 2012. Di sisi lain, investasi gedung, yang merupakan 85 persen jumlah investasi tetap di neraca nasional, tetap mencatat kinerja yang kuat, meningkat sebesar 7,8 persen tahun-ke-tahun. Walau terdapat pelambatan belakangan ini, investasi secara keseluruhan tetap meningkat sebesar 9,8 persen pada tahun 2012, naik dari 8,8 persen pada tahun 2011, dan menjadi pendorong sekitar 40 persen pertumbuhan PDB untuk tahun tersebut.

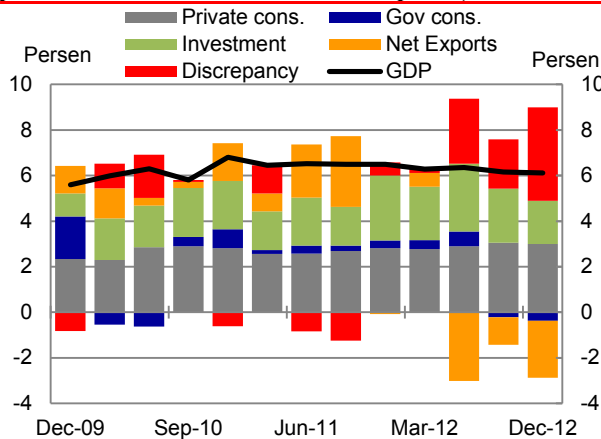
Ekspor bersih menjadi beban berat bagi pertumbuhan...

Ekspor bersih membebani pertumbuhan pada kuartal 4, mengurangi sekitar 2,2 poin persentase dari pertumbuhan kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman (Gambar 5). Sementara terdapat sejumlah peningkatan di dalam volume ekspor pada kuartal tersebut, meningkat sebesar 2,6 persen secara kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman, tetapi hal ini tidak sebanding dengan tingginya pertumbuhan impor sebesar 9,5 persen. Penguatan impor ini sebagian mencerminkan penguatan kembali dari hasil kuartal 3 yang sangat lemah (turun sebesar 8,5 persen tahun-ke-tahun). Untuk tahun 2012 secara keseluruhan, ekspor bersih mengurangi 1,5 poin persentase dari pertumbuhan PDB, nilai pengurangan paling besar dari pertumbuhan tahunan sejak tahun 2004.

...sementara peningkatan persediaan barang dan perbedaan statistik yang besar dapat membawa sejumlah pengaruh pada pertumbuhan untuk tahun 2013

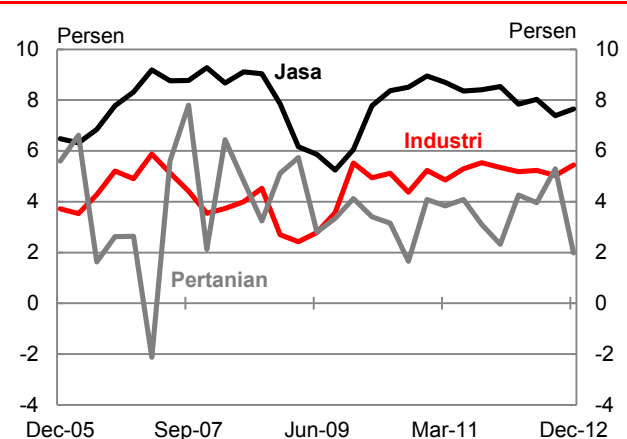
Perbedaan statistik dan persediaan barang bersama-sama menambah sekitar 2,8 poin persentase kepada pertumbuhan kuartal-ke-kuartal dengan penyesuaian musiman di kuartal empat dan sekitar 2,3 poin persentase kepada pertumbuhan tahun 2012. Sementara persediaan barang menurun pada kuartal 4, jauh lebih rendah dari biasanya, sebagai akibatnya menambah pertumbuhan secara berurutan bila disesuaikan secara musiman. Hal ini memperluas pola akumulasi persediaan barang selama tahun 2012 yang dibahas pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012. Besarnya nilai perbedaan statistik positif antara PDB yang diukur dari sisi produksi dan sisi pengeluaran, menjadi celah yang cukup besar antara pengukuran pertumbuhan PDB dan penjualan final riil (lihat Gambar 1 di ringkasan eksekutif). Hal ini mencerminkan lebih rendahnya pertumbuhan permintaan dibanding pertumbuhan produksi, maka penjualan persediaan barang (*de-stocking*) dapat menjadi beban terhadap pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikut.

Gambar 5: Investasi dan konsumsi swasta tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, melampaui lemahnya ekspor neto (pertumbuhan PDB riil tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 6: Industri dan Jasa mencatat kinerja yang kuat (pertumbuhan PDB Jasa, Industri dan Pertanian tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

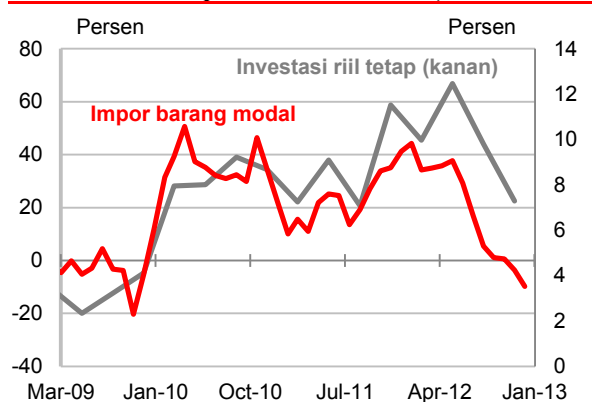
Sebagian besar indikator frekuensi tinggi tetap kuat, tetapi penjualan ritel menunjukkan sedikit perlambatan ...

Indikator-indikator dengan frekuensi tinggi secara umum tetap kuat. Pada sisi produksi, penjualan semen dan produksi industri terus meningkat pada beberapa bulan terakhir, dengan penjualan semen meningkat sebesar 20.6 persen tahun-ke-tahun pada bulan February, sejalan dengan kuatnya kinerja investasi bangunan pada kuartal 4. Pada sisi konsumsi, penjualan sepeda motor, yang mencatat penurunan yang signifikan selama tahun 2012, telah kembali stabil pada beberapa bulan terakhir, meningkat secara tahun-ke-tahun untuk pertama kali pada bulan Desember 2012 setelah menurun selama 10 bulan. Penjualan kendaraan bermotor pada bulan February juga meningkat kuat bertumbuh 19.4 persen tahun-ke-tahun. Dari indikator sisi permintaan lainnya menunjukkan terjadi penurunan, dengan indikator sentimen konsumen yang diukur oleh Bank Indonesia tetap berada pada tingkat yang tinggi, walau terjadi penurunan tipis dibanding kuartal 3 2012, sementara penjualan ritel terus menurun pada tingkat 7.1 percent tahun-ke-tahun pada January, lebih rendah dari 15.1 persen pada Desember.

...dan dengan perlambatan dalam belanja barang-barang modal

Ketidakpastian utama terhadap perkiraan (*outlook*) permintaan dalam negeri jangka pendek adalah jalur investasi yang akan datang. Dengan besarnya proporsi impor permesinan dan peralatan, impor barang modal merupakan indikator frekuensi tinggi yang baik untuk mengukur investasi. Indikator ini menunjukkan bahwa tampaknya akan terjadi perlambatan yang lebih lanjut dalam investasi permesinan dan peralatan pada beberapa bulan mendatang (Gambar 7). Pertumbuhan impor barang modal telah menurun sejak awal tahun 2012, dengan nilai impor turun sebesar 12,1 persen tahun-ke-tahun pada bulan Januari 2013. Hal ini konsisten dengan keterkaitan historis antara belanja modal dan harga komoditas, seperti dibahas pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012, dengan perlemahan ekspor dan harga komoditas selama tahun 2012 kini membawa pengaruh tertunda terhadap melemahnya pertumbuhan investasi.

Gambar 7: Lemahnya impor barang modal menunjukkan kemungkinan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan investasi (investasi riil tetap dan rata-rata 3 bulan impor barang modal dalam USD, persen, tahun-ke-tahun)



Sumber: BPS ; Perhitungan staf Bank Dunia

PDB diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2013 dan 6,5 persen pada tahun 2014...

Proyeksi Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tahun 2013 adalah 6,2 persen (Tabel 2), sedikit menurun dari proyeksi 6,3 persen pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012. Konsumsi swasta diperkirakan masih akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan potensi dorongan tambahan dari belanja yang berkaitan dengan pemilihan umum pada paruh kedua. Investasi juga akan terus menjadi sumber pertumbuhan utama tetapi diperkirakan akan sedikit melambat dari laju peningkatannya pada tahun 2012, seperti ditunjukkan oleh perlambatan laju belanja barang-barang modal seperti disinggung di atas. Ekspor bersih tampaknya akan terus membebani pertumbuhan pada tahun 2013, walaupun dengan pengaruh yang lebih kecil dibanding pada tahun 2012. Hal ini karena ekspor diperkirakan akan memulai proses pemulihan yang lambat, impor juga diperkirakan akan terus meningkat dengan pesat sejalan dengan kuatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri. Untuk tahun 2014, pertumbuhan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,5 persen, ditunjang oleh peningkatan ekspor.

Tabel 2: Menurut skenario dasar (*baseline*), pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 6,2 persen untuk tahun 2013, dan meningkat menjadi 6,5 persen untuk tahun 2014 (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Tahun berjalan ke kuartal Desember			Revisi Tahunan	
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2013	2014
1. Indikator ekonomi utama								
Jumlah pengeluaran konsumsi	4,8	5,0	5,8	3,9	5,9	5,1	-0,2	n/a
Pengeluaran konsumsi swasta	5,3	5,5	5,8	5,4	5,8	5,1	0,4	n/a
Konsumsi pemerintah	1,2	1,7	5,7	-3,3	6,6	5,3	-4,4	n/a
Pembentukan modal tetap bruto	9,8	8,0	9,6	7,3	8,8	10,0	-3,3	n/a
Ekspor barang dan jasa	2,0	5,8	11,3	0,5	8,7	12,9	2,0	n/a
Impor barang dan jasa	6,6	8,6	9,5	6,8	8,1	10,0	5,5	n/a
Produk domestik bruto	6,2	6,2	6,5	6,1	6,2	6,7	-0,1	n/a
Pertanian	4,0	2,8	3,2	2,0	4,5	3,2	-0,7	n/a
Industri	5,2	5,1	5,4	5,4	4,7	5,8	0,0	n/a
Jasa-jasa	7,7	8,0	8,1	7,6	7,9	8,2	-0,1	n/a
2. Indikator luar negeri								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	0,2	2,0	4,3	n/a	n/a	n/a	-3,5	n/a
Saldo neraca berjalan (miliar AS\$)	-24,1	-23,7	-22,4	n/a	n/a	n/a	-9,5	n/a
Neraca perdagangan (miliar AS\$)	-1,2	0,3	4,6	n/a	n/a	n/a	-7,4	n/a
Saldo neraca keuangan (miliar AS\$)	24,9	25,7	26,7	n/a	n/a	n/a	6,0	n/a
3. Pengukuran ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	4,3	5,5	5,2	4,4	5,8	5,4	0,5	n/a
Indeks keranjang kemiskinan	6,5	6,1	6,8	5,4	6,9	7,0	0,4	n/a
Deflator PDB	4,6	4,9	5,9	2,7	6,9	5,5	-1,1	n/a
PDB nominal	11,0	11,4	12,7	9,0	13,6	12,6	-1,3	n/a
4. Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9419	9600	9500	9630	9600	9500	100,0	n/a
Harga minyak Indonesia (AS\$/barel)	113	110	105	108	110	105	5,0	n/a
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,4	3,7	4,0	3,1	4,4	3,4	0,1	n/a

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional yang dapat menunjukkan pergerakan volume perdagangan yang lebih tinggi dari sebenarnya, dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam penggunaan harga. Revisi relatif terhadap proyeksi yang dilakukan pada *IEQ* Desember 2012
Sumber: MoF; BPS; BI; CEIC; Proyeksi Bank Dunia.

3. Defisit neraca transaksi berjalan menjadikan kebutuhan dan sumber pembiayaan eksternal sebagai sorotan

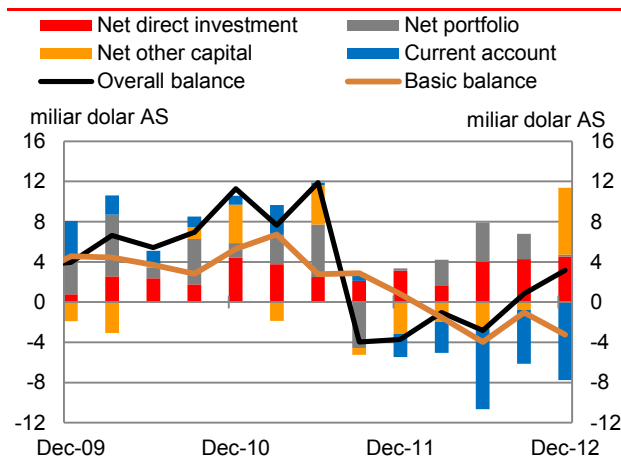
Neraca berjalan Indonesia mencatat defisit tahunan pertamanya dalam 14 tahun terakhir di tahun 2012...

Defisit neraca berjalan Indonesia melebar pada kuartal 4 tahun 2012 menjadi 7.8 miliar dolar AS, atau 3,6 persen dari PDB kuartal (Gambar 8). Hal ini mencerminkan kombinasi rendahnya permintaan ekspor dan lemahnya harga komoditas yang masih terus berlangsung, serta kuatnya permintaan impor, yang didorong oleh pertumbuhan permintaan dalam negeri. Di tahun 2012, defisit neraca berjalan mencapai 24,2 miliar dolar AS (2,7 persen dari PDB tahunan), merupakan defisit setahun penuh pertama yang terjadi dalam 14 tahun terakhir, yang juga merupakan cerminan dari mengecilnya surplus perdagangan barang yang turun dari 34,8 miliar dolar AS di tahun 2011 menjadi 8,4 miliar dolar AS di tahun 2012. Melalui pertengahan tahun 2012 sejumlah besar penurunan berasal dari penurunan surplus pada neraca perdagangan non-migas, yang diikuti oleh pelebaran defisit perdagangan minyak dan gas pada beberapa bulan terakhir.

...tetapi neraca pembayaran secara keseluruhan kembali mencatat surplus di paruh kedua tahun 2012

Walau mencatat defisit pada neraca berjalan, neraca pembayaran secara keseluruhan tetap mencatat surplus di kuartal akhir tahun 2012, seperti yang terjadi di kuartal 3, sebesar 3,2 miliar dolar AS berkat masuknya aliran modal asing yang kuat. Namun demikian, neraca dasar (saldo neraca berjalan dikurangi PMA bersih) tetap mencatat defisit, dengan aliran penanaman modal asing yang membiayai kurang dari 60 persen dari defisit neraca berjalan pada kuartal 4, turun dari 80 persen pada kuartal 3. Karenanya, kemampuan Indonesia untuk mempertahankan aliran masuk PMA dan mempertahankan kebijakan yang mendukung investasi portofolio yang dapat berkeajaiban tetap menjadi perhatian utama.

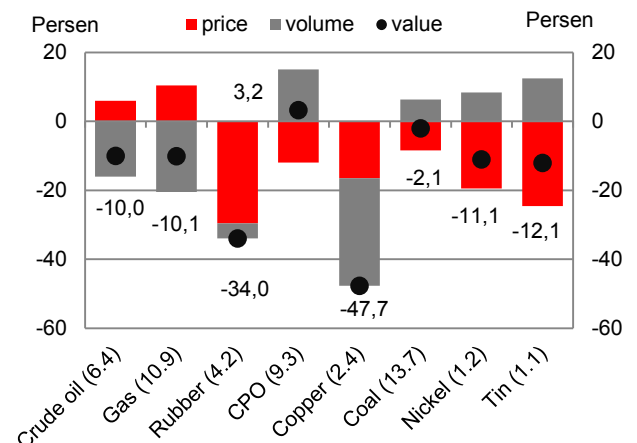
Gambar 8: Melebarnya defisit neraca berjalan membuat neraca pembayaran dasar tetap mengalami defisit... (arus neraca pembayaran, miliar dolar AS)



Catatan: neraca dasar = neraca transaksi berjalan – neraca investasi langsung
Sumber: Bank Indonesia; Perhitungan staf Bank Dunia.

Gambar 9: ...sebagai gabungan atas melemahnya harga dan volume ekspor yang membebani sebagian besar ekspor komoditas

(kontribusi perubahan harga dan volume terhadap pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: Laju pertumbuhan dari Januari hingga November; label tanda kurung pada sumbu X menunjukkan proporsi ekspor Jan-Nov 2012
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

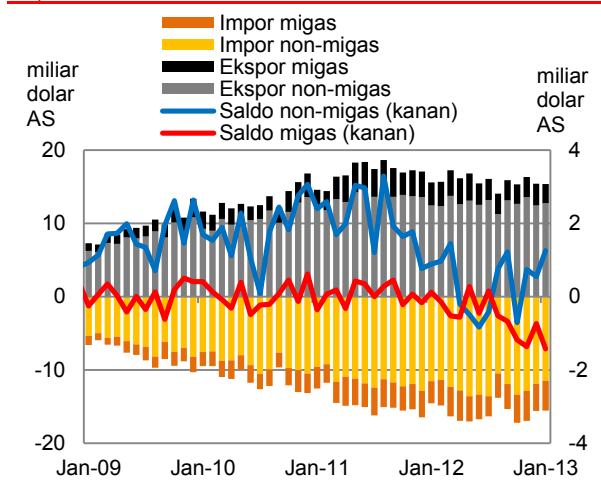
Surplus perdagangan barang terus menyempit di kuartal 4 karena kuatnya permintaan impor ditambah dengan melemahnya ekspor

Melihat dinamika perdagangan terakhir secara lebih rinci, neraca perdagangan barang turun menjadi 0,6 miliar dolar AS di kuartal terakhir, yang merupakan nilai terendahnya setidaknya sejak tahun 1993. Ekspor mencatat pemulihan yang sangat kecil di kuartal penutup tahun 2012 pada 46,7 miliar dolar AS (naik dari 45,6 miliar dolar AS di kuartal ke-3), tetapi peningkatan ini tidak dapat mengimbangi impor yang lebih kuat sebesar 46.1 miliar dolar AS (naik dari 42,4 miliar dolar AS di kuartal ke-3). Menguatnya volume perdagangan barang juga menyebabkan terjadinya pelebaran defisit perdagangan jasa menjadi 3,2 miliar dolar AS di kuartal ke-4, yang mencerminkan peningkatan permintaan pada jasa transportasi. Ekspor barang dan jasa secara keseluruhan di tahun 2012 turun sebesar 6 persen dibanding tahun 2011, sementara impor meningkat sebesar 8 persen, dalam nominal dolar AS.

Defisit perdagangan migas meningkat secara signifikan

Perkembangan negatif pada neraca perdagangan disebabkan oleh defisit neraca perdagangan migas yang meningkat sejak pertengahan tahun 2012, yang melebar ke 5,1 miliar dolar AS pada tahun 2012 dari 0,7 miliar dolar AS pada tahun 2011 (Gambar 10). Hal ini diakibatkan oleh melemahnya produksi minyak dalam negeri dan kuatnya permintaan minyak domestik di tengah tingginya harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan defisit minyak mencatatkan nilai tertinggi baru sebesar 23 miliar dolar AS di tahun 2012, yang didorong oleh peningkatan defisit perdagangan minyak tersuling (*refined*) dari 1,1 miliar dolar AS di kuartal ke-1 tahun 2012 menjadi 7 miliar dolar AS pada kuartal ke-4 2012. Defisit perdagangan migas tampaknya akan terus menjadi tantangan selama tahun 2013 dengan kuatnya permintaan energi dalam negeri, terutama jika tidak adanya kemajuan dalam reformasi subsidi BBM.

Gambar 10: Defisit perdagangan migas yang besar telah membebani neraca eksternal
(ekspor, impor, neraca perdagangan, nominal miliar dolar AS)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Aliran masuk modal asing tetap kuat tetapi masih dapat terus ditingkatkan

Surplus neraca keuangan Indonesia meningkat di kuartal ke-4 2012 menjadi 11,4 miliar dolar AS dari 6 miliar dolar AS di kuartal ke-3. Surplus di dorong oleh berlanjutnya total investasi langsung yang kuat sebesar 4,5 miliar dolar AS (dari 4,3 miliar dolar AS di kuartal ke-3). Aliran masuk dari penanaman modal asing (PMA) meningkat sebanyak 3 persen di tahun 2012 dibanding tahun 2011 sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia, sementara berdasarkan laporan BKPM hal yang sama meningkat sebesar 26 persen, dimana perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan metodologi penghitungan. Namun demikian kinerja Indonesia dalam menarik investasi asing masuk masih sangat terbatas dibanding dengan kinerja negara-negara tetangganya. Nilai investasi langsung yang masuk ke Indonesia hanya setara dengan 2 persen terhadap PDB-nya selama kurun 2010-2011, sementara negara seperti Malaysia dan Cina mencapai 4 persen terhadap PDB (Gambar 11), meningkat menjadi 2,2 persen terhadap PDB di 2012. Angka-angka ini menunjukkan masih ada ruang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing yang lebih tinggi.

... dan persepsi investor sangat berbeda antar sektor

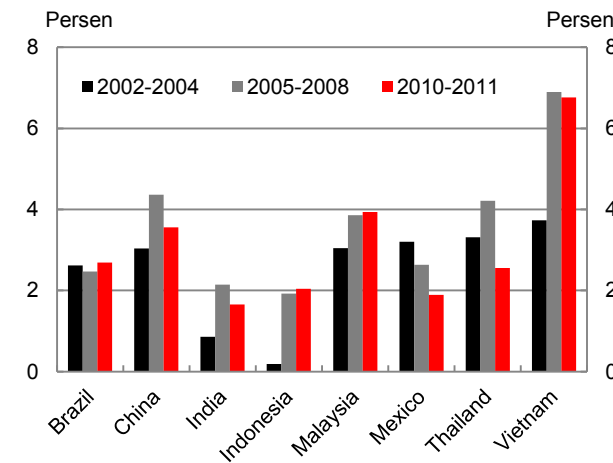
Posisi Indonesia meningkat ke peringkat tiga pada tahun 2012, setelah Cina dan India, (dari posisi nomor 5 pada tahun 2011) sebagai negara dengan potensi bagi operasi luar negeri perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang dari survei terbaru yang dilakukan oleh *Japanese Bank for International Cooperation* (JBIC).¹ Hasil survei ini menunjukkan daya tarik dari perkembangan pasar dalam negeri Indonesia dalam mendorong aliran PMA, dengan 84 persen perusahaan yang menyatakan hal itu sebagai faktor yang penting dalam penilaian mereka, walau responden survei juga menyoroti masalah peningkatan upah (bahkan sebelum kenaikan besar yang terjadi di 2013 disetujui) dan infrastruktur sebagai tantangan. Sebaliknya, lingkungan kebijakan sektor pertambangan Indonesia mendapat peringkat yang paling tidak menarik di antara 96 negara di dalam survei eksekutif pertambangan yang dilakukan oleh *Fraser Institute*, turun dari posisi 86 di tahun lalu.

¹ Perusahaan Jepang dengan operasi usaha di luar negeri di survei dari bulan Juli ke September 2012. Perusahaan-perusahaan diminta untuk memberikan daftar negara dengan prospek jangka menengah terbaik (yaitu untuk tiga tahun ke depan) bagi operasi luar negeri perusahaan tersebut.

Aliran masuk portofolio telah kembali pada awal tahun 2013 tetapi masih rendah

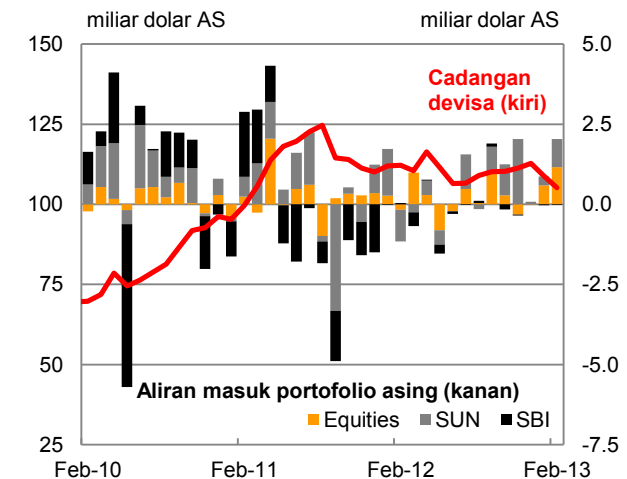
Aliran masuk investasi portofolio menunjukkan kinerja baik di awal tahun 2013. Pada bulan Februari terlihat aliran masuk bersih terbesar tercatat sejak bulan Juli 2011 (Gambar 12), yang didorong oleh tingginya minat pada saham dan obligasi pemerintah Indonesia. Aliran masuk portofolio secara kumulatif selama tahun 2012 berjumlah 5,9 miliar dolar AS, dengan pembelian bersih yang terpusat pada surat utang negara dalam mata uang lokal (SUN) (5 miliar dolar AS) dan saham (1,7 miliar dolar AS). Aliran modal yang masuk secara kumulatif di tahun 2012 lebih tinggi dari 0,7 miliar dolar AS aliran masuk modal bersih yang tercatat di tahun 2011, namun lebih rendah dari 13,3 miliar dolar AS yang tercatat di tahun 2010.

Gambar 11: Walau tumbuh kuat, FDI yang mengalir ke Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara pembandingnya (aliran masuk FDI sebagai bagian dari PDB, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 12: Cadangan devisa turun pada bulan Januari dan Februari walau aliran masuk investasi portofolio telah kembali (miliar dolar AS)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca berjalan Indonesia akan sedikit menyempit pada tahun 2013, tetapi risiko pembiayaan luar negeri tetap ada...

Memandang ke depan, Bank Dunia memproyeksikan defisit neraca berjalan menjadi 23,7 miliar dolar AS di tahun 2013 sebesar, yang sedikit turun ke 2,3 persen dari PDB, dan diperkirakan terus menyusut di tahun 2014. Membaiknya outlook perekonomian dunia diharapkan dapat mendorong penguatan permintaan atas ekspor-ekspor Indonesia, walau hal ini tampaknya akan terus diimbangi dengan permintaan impor yang juga terus menguat, terutama yang disebabkan oleh impor energi. Secara keseluruhan neraca pembayaran akan tetap mencatat sedikit surplus di tahun 2013 dan 2014, dengan ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal, namun demikian terdapat risiko-risiko seperti yang diuraikan pada akhir Bagian A.

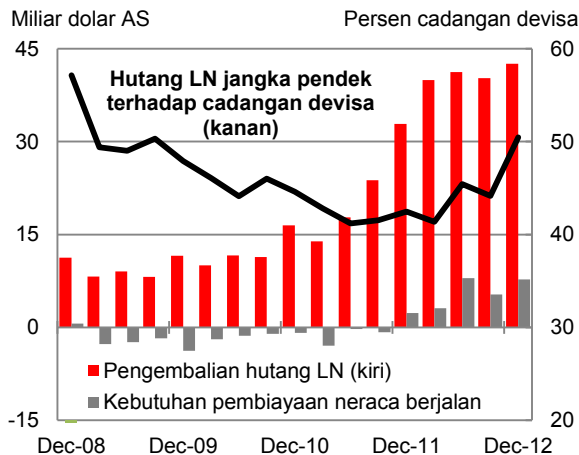
...dan hutang luar negeri swasta telah meningkat

Paparan hutang luar negeri swasta bruto terus meningkat, dengan kenaikan terutama terlihat pasca krisis keuangan global naik sebesar 70 persen dalam tiga tahun terakhir, di mana untuk pertama kalinya hutang luar negeri swasta bruto kini melampaui hutang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa resmi Indonesia tetap dalam posisi yang lebih dari cukup untuk mengatasi kebutuhan keuangan eksternal jangka pendek, walau rasio hutang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa terus meningkat dari 40 persen menjadi 50 persen selama satu tahun terakhir seiring dengan meningkatnya pertumbuhan pinjaman luar negeri yang melebihi dari pertumbuhan cadangan devisa (Gambar 13). Walau masih dianggap dalam kondisi terkendali dari sisi ketahanan hutang luar negeri jangka menengah, peningkatan hutang luar negeri telah mengakibatkan kebutuhan pembiayaan luar negeri Indonesia meningkat tajam sejak tahun 2011, dimana total pembayaran pengembalian hutang tercatat sebesar 43 miliar dolar AS di kuartal ke-4 2012, atau naik dari 15 miliar dolar AS di kuartal ke-1 2011.

Terlepas dari meningkatnya laporan hutang luar negeri, para pembuat kebijakan diharapkan dapat terus mewaspadai perkembangan yang terjadi pada neraca keuangan perusahaan-perusahaan di dalam negeri dari adanya kemungkinan terus melemahnya posisi Rupiah. Sekitar 88 persen dari hutang luar negeri swasta saat ini merupakan hutang

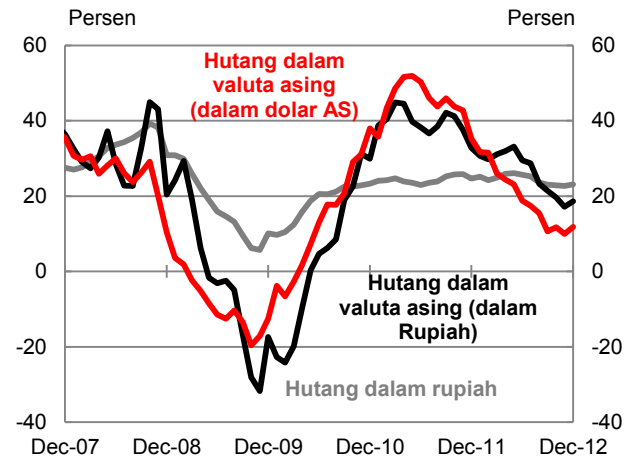
yang berdenominasi dolar AS dan perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam sektor industri pengolahan, infrastruktur dan jasa keuangan berkontribusi hanya kurang dari setengah total hutang swasta, yang mana tidak keseluruhan dari ketiga sektor ini dapat menikmati efek positif natural dari nilai tukar yang terjadi (seperti bagaimana contohnya yang dialami pendapatan ekspor). Yang cukup menggembirakan, yang berkaitan dengan pengurangan resiko sektor swasta terhadap pergerakan nilai tukar, kecepatan dari pertumbuhan pinjaman dalam mata uang asing (yang berkontribusi sebesar 15 persen dari total pinjaman perbankan dan juga merupakan sumber penggerak kerentanan nilai tukar selain hutang luar negeri), yang sementara masih cukup besar, terus mengalami penurunan ke tingkat 20 persen di bulan Januari tahun ini, dari posisi yang hampir puncaknya pada 33.1 persen di bulan Mei 2012 (Gambar 14).

Gambar 13: Kebutuhan pembiayaan eksternal bruto cenderung meningkat
(miliar dolar AS per kuartal, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 14: ...walau pinjaman dalam valuta asing telah melambat, menjadi di bawah laju pinjaman dalam negeri
(persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

4. Pertumbuhan kredit dan harga aset tetap kuat di awal 2013

Harga saham Indonesia meningkat dan harga SUN mendapat dukungan baik, sementara Rupiah melemah...

Setelah naik 12 persen selama tahun 2012, saham-saham Indonesia mengikuti penguatan saham global memasuki tahun 2013. Indeks harga saham gabungan Indonesia naik 13 persen di 2013 sampai dengan 8 Maret, didorong oleh kuatnya kinerja sektor keuangan khususnya sektor properti. Imbal hasil (*yield*) obligasi pemerintah sedikit naik dari nilai terendah sepanjang sejarahnya akan tetapi masih rendah dibandingkan standar historis dan inflasi di tahun berjalan dan yang diproyeksikan. Rupiah turun ke nilai terendah baru dalam tiga tahun terakhir terhadap dolar AS di bulan Januari, walaupun depresiasi tidak begitu lemah berdasarkan timbangan perdagangan dan nilai riil, yang mencerminkan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan depresiasi nilai tukar yang dialami Indonesia terhadap negara-negara mitra dagangnya, khususnya terhadap Jepang. Setelah membaik sepanjang paruh kedua 2012, cadangan devisa resmi turun sebanyak 4 miliar AS ke posisi 108.8 miliar AS, di tengah makin ketatnya likuiditas dolar AS di dalam negeri, yang lebih lanjut turun sebanyak 3,6 miliar dolar AS ke posisi 105,2 miliar dolar AS di bulan Februari, yang kemungkinan besar dikarenakan oleh adanya efek valuasi dan oleh adanya intervensi BI untuk mengurangi gejolak Rupiah. Pada awal bulan Februari, Bank Indonesia menegaskan larangannya kepada bank-bank dalam negeri untuk turut serta di dalam pasar *non-deliverable forward* (NDF) luar negeri, dan telah mulai memasok valuta asing secara langsung kepada badan-badan usaha milik negara dalam bidang energi.

Perlambatan pertumbuhan kredit yang belakangan terjadi telah berangsur stabil untuk saat ini...

Perlambatan pertumbuhan kredit dalam negeri sejak bulan Mei 2012 telah berangsur stabil untuk saat ini, dengan pertumbuhan kredit nominal naik ke 23 persen tahun-ke-tahun pada bulan Desember, naik dari 22 persen di bulan November. Pertumbuhan kredit secara riil (d disesuaikan dengan inflasi yang berjalan) juga meningkat menjadi 18 persen tahun-ke-tahun (Gambar 16). Pertumbuhan kredit melambat ke 25 persen pada hingga bulan Januari tahun ini, dari 30 persen di bulan Oktober. Pertumbuhan dalam pinjaman modal kerja melambat ke 24 persen tahun-ke-tahun di bulan Januari, sementara kredit

konsumsi kembali meningkat secara tahun-ke-tahun ke 20 persen pada bulan Januari, dari 12 persen di bulan November, yang mencerminkan pertumbuhan kredit bulanan yang kuat dan pengaruh dasar yang positif.

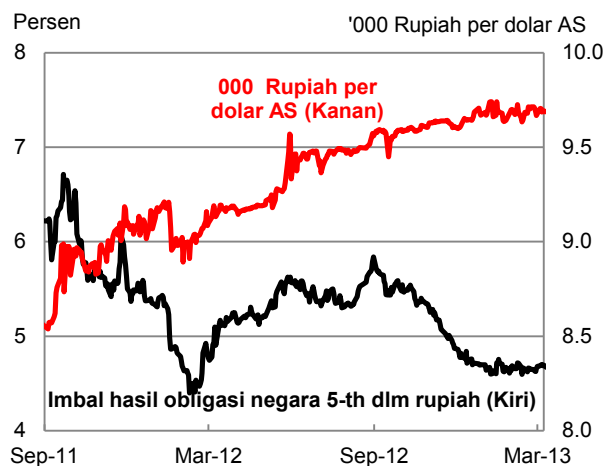
...dan pertumbuhan kredit masih tetap tinggi, mencerminkan peningkatan dari tingkat intermediasi bank yang masih rendah...

Kuatnya pertumbuhan kredit terus meningkatkan kekhawatiran akan munculnya kemungkinan risiko terhadap kualitas kredit. Sementara hal ini mencerminkan permintaan dalam negeri yang menguat, terutama bagi investasi, peningkatan neraca bank yang cepat dalam beberapa tahun terakhir (yang merupakan 80 persen dari aset-aset sistem keuangan) tampaknya juga mencerminkan upaya mengejar keteringgalan sistem keuangan Indonesia yang mulai dari tingkatan dasar yang relatif rendah (Gambar 17). Walau dengan kuatnya pertumbuhan kredit yang tercatat belakangan ini, jumlah aset-aset sistem perbankan tetap masih setara dengan 41 persen terhadap PDB di tahun 2012, dibandingkan dengan 52 persen untuk Filipina, 74 persen di India dan 121 persen di Vietnam (angka tahun 2012) (Gambar 18).

...dan membutuhkan kuatnya penekanan yang berkelanjutan pada peraturan kehati-hatian dan pemantauan kualitas kredit

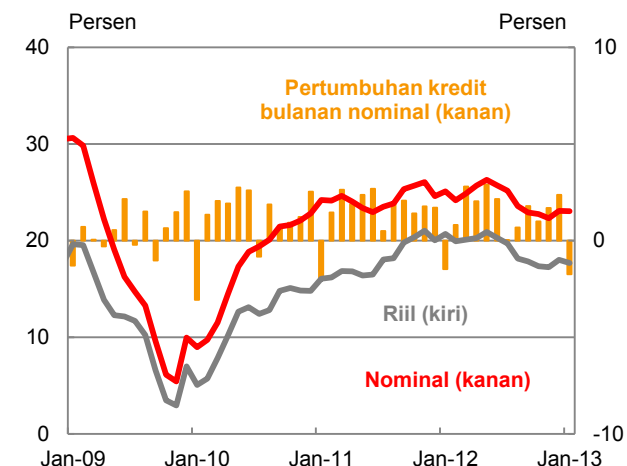
Sebagaimana diulas dalam IEQ edisi Desember 2012, Bank Indonesia juga telah menerapkan beberapa langkah batas kehati-hatian dalam rangka mengendalikan kredit, termasuk di antaranya dengan meningkatkan persyaratan uang muka minimum (*loan-to-value/LTV*) bagi kredit perumahan, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada kredit yang berkaitan dengan properti sejak pertengahan tahun 2012. Suku bunga kredit perumahan juga sedikit meningkat (lihat Kotak 1). Sektor perbankan tetap stabil hingga akhir tahun 2012 dan kualitas kredit masih tetap sehat walau dengan adanya peningkatan kredit yang kuat belakangan ini. Kelancaran bank, menurut Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tetap tinggi pada 17,4 persen, sementara tingkat kredit macet (*non-performing loan*) terus menurun, dan berada di bawah 2 persen untuk pertama kali pada di bulan Desember.

Gambar 15: Imbal hasil masih rendah dan Rupiah terdepresiasi
(Rp per dolar AS; imbal hasil, persen)



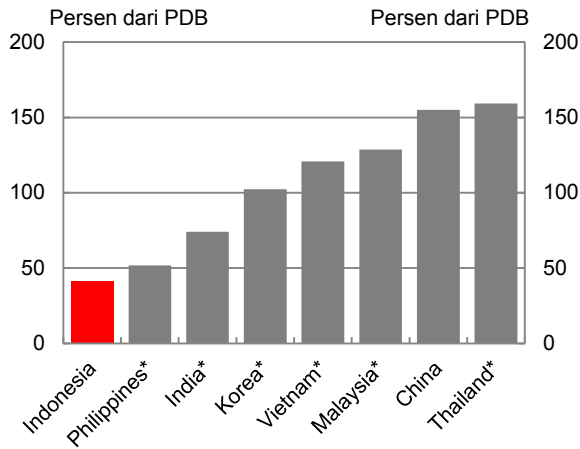
Catatan: Angka 2013 hingga 8 Maret
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 16: Penurunan pertumbuhan kredit yang belakangan terjadi telah kembali meningkat untuk saat ini (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



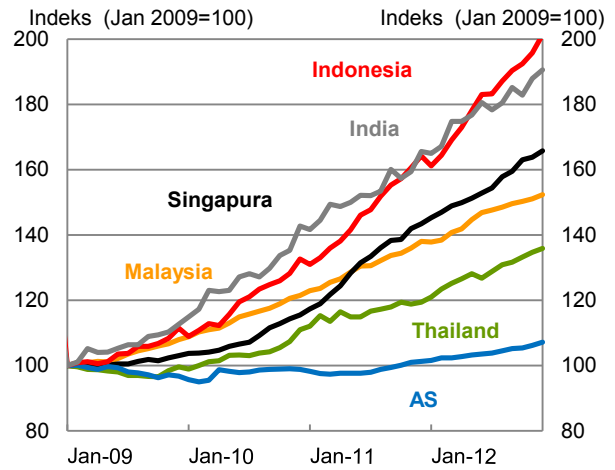
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 17: Aset-aset perbankan Indonesia sebagai bagian dari PDB masih rendah dibanding negara pembandingnya... (bagian dari PDB nominal, persen)



Catatan: *Angka tahun 2011, kecuali untuk Cina dan Indonesia (2012)
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 18: ...walau secara komparatif cepatnya pertumbuhan nominal kredit pada beberapa tahun terakhir (pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Catatan: Semua angka sampai Januari 2013, kecuali Indonesia (Desember 2012)
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Kotak 1: Harga properti, pertumbuhan kredit dan risiko terhadap stabilitas keuangan

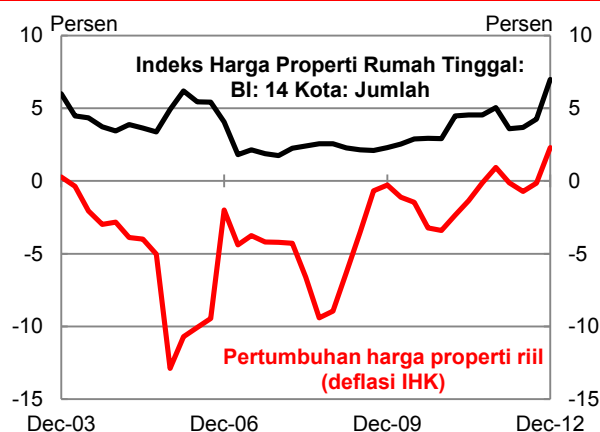
Penjualan properti yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan properti utama mencatat pertumbuhan yang menguat di tahun 2012 dan memasuki tahun 2013, yang mencerminkan besarnya permintaan properti, terutama untuk jenis apartemen, unit perbelanjaan dan perkantoran dan lahan perindustrian di beberapa kawasan industri utama. Harga jual apartemen hunian di Jakarta tumbuh sebesar 45 persen tahun-ke-tahun sampai bulan Desember 2012, bersamaan dengan peningkatan kredit bagi apartemen hunian, yang meningkat sebesar 84 persen tahun-ke-tahun. Ruang kantor komersial dan industri juga menguat, dengan harga jual ruang komersial di Jakarta meningkat sebesar 43 persen hingga Desember, dan sewa lahan di kawasan perindustrian meningkat 22 persen. Kuatnya pertumbuhan kredit dan harga properti tersebut telah meningkatkan kewaspadaan akan tekanan-tekanan kepanasan ekonomi (*overheating*) di beberapa sektor pasar properti. Kekhawatiran utama terpusat pada risiko "gelembung" properti (*property bubble*), dengan peningkatan pinjaman yang berkaitan dengan properti mendorong harga-harga properti semakin tinggi, yang menyebabkan peningkatan risiko yang dialami perbankan akan kredit yang berkaitan dengan properti bila terjadi penurunan pasar.

Sementara pasar properti telah mengalami peningkatan harga yang sangat cepat, harga rumah tinggal secara nasional seperti diukur dengan indeks 14 kota oleh Bank Indonesia ternyata hanya menunjukkan peningkatan yang relatif kecil, dengan rata-rata sebesar 4 persen sejak awal tahun 2010. Secara riil, harga rumah tinggal (menggunakan penyesuaian dengan inflasi berjalan) sesungguhnya mencatat pertumbuhan yang datar pada tiga tahun terakhir. Beberapa bulan terakhir memang memperlihatkan peningkatan harga rumah tinggal di tengah-tengah tanda-tanda bahwa pembatasan laju kredit perumahan akan mempengaruhi permintaan pokok rumah tinggal; peningkatan harga rumah tinggal melaju ke 7 persen tahun-ke-tahun pada bulan Desember 2012, laju tercepatnya selama setidaknya sepuluh tahun terakhir (Gambar 19).

Di Indonesia, seperti dibanyak negara lain, peningkatan harga properti berkaitan erat dengan pertumbuhan kredit di sektor yang sama, yaitu kredit perumahan. Peningkatan pada pinjaman yang berkaitan dengan properti mencatat percepatan di paruh pertama tahun 2012 dan mencapai nilai puncaknya pada 37 persen tahun-ke-tahun di bulan Juli 2012, yang didorong oleh pertumbuhan dalam kredit perumahan yang mencapai nilai tertinggi sebesar 44 persen di bulan yang sama (Gambar 20). Langkah BI untuk meningkatkan persyaratan besaran uang muka minimum (*loan-to-value/LTV*) bagi kredit perumahan dari bulan Juli 2012 telah mencatat perlambatan dalam laju peningkatan kredit yang berkaitan dengan properti, sementara suku bunga sedikit meningkat. Namun perlambatan dalam laju pertumbuhan kredit perumahan sejak pertengahan tahun 2012 berjalan bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan pinjaman rumah tangga lainnya, yang menunjukkan kemungkinan kredit jenis lain yang menjadi pengganti dari lebih rendahnya ketersediaan kredit perumahan.

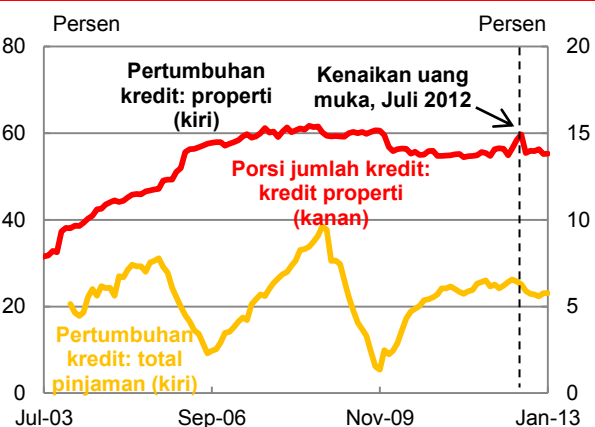
Kuatnya pertumbuhan harga properti dan kredit pada segmen properti tertentu perlu mendapat pemantauan yang cermat, tetapi risiko yang berkaitan dengan properti secara keseluruhan pada sistem perbankan masih relatif rendah pada rasio 14 persen dari jumlah aset-sistem perbankan. Angka kredit macet (*non-performing loan/NPL*) untuk pinjaman yang berkaitan dengan properti masih stabil, dengan rasio NPL untuk kredit perumahan sebesar 2,2 persen di bulan Januari, dan hanya 1 persen khusus bagi apartemen hunian. Menurut survei dari Bank Indonesia, para pengembang terus menggunakan dana internal untuk membiayai proyek-proyek mereka, dengan pinjaman bank yang hanya mencapai sepertiga dari jumlah dana pengembang. Sebagian besar rumah tangga menggunakan fasilitas pinjaman untuk membiayai pembelian properti rumah tinggal, tetapi sebagian besar pinjaman itu digunakan untuk membiayai pembelian perumahan kelas bawah. Selain itu, menurut survei terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2006, jumlah rumah besar yang dibeli dengan fasilitas kredit lebih kecil, dengan hanya 51 persen dari rumah-rumah berukuran di atas 70 meter persegi yang dibiayai oleh pinjaman.

Gambar 19: Pertumbuhan harga rumah tinggal masih rendah, terutama secara riil, tapi kini mulai meningkat...
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 20: ...sementara kredit sektor properti melaju hingga pertengahan 2012, tetapi telah melambat karena pengaruh kenaikan uang muka (*loan to value ratio*)...
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

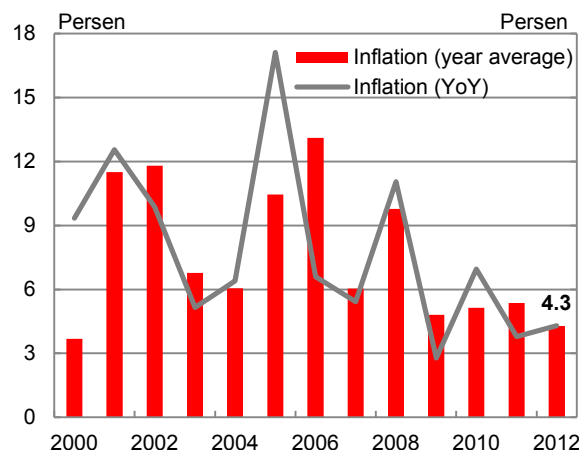
Catatan: untuk informasi tentang perkembangan terakhir sektor properti Indonesia, lihat pada "Residential Property Survey and Commercial Property Survey" bulan September kuartal 2012.

5. Inflasi ekonomi secara luas rendah tahun 2012 tetapi IHK mulai meningkat belakangan ini

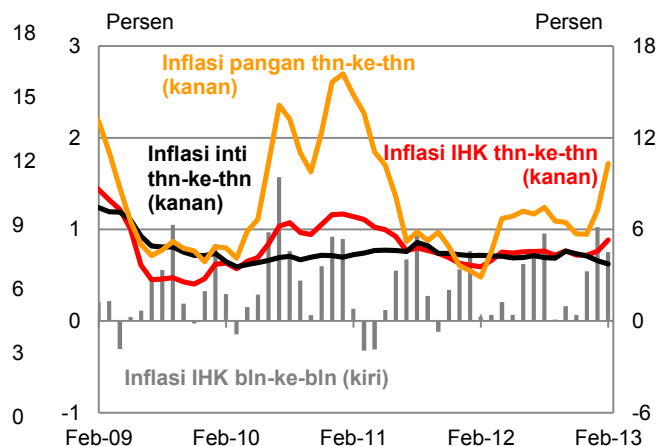
Inflasi rata-rata tahunan pada 2012 berada pada nilai terendah dalam 12 tahun namun inflasi IHK meningkat lebih dari satu poin persentase dalam 2 bulan pertama 2013

Inflasi rata-rata tahunan pada tahun 2012 berada pada tingkat yang paling rendah dalam 12 tahun, dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, yang juga didukung oleh tidak adanya gejolak harga barang yang diatur pemerintah atau harga komoditas (Gambar 21). Namun demikian, pada dua bulan pertama tahun 2013, inflasi IHK meningkat lebih dari satu poin persentase, menjadi 5,3 persen tahun-ke-tahun pada bulan Februari, disebabkan oleh dorongan harga bahan pangan dan harga barang yang diatur pemerintah (Gambar 22). Inflasi inti, suatu pengukuran tekanan harga pokok konsumen yang lebih baik, tetap bertahan rendah dan stabil, pada 4,3 persen tahun-ke-tahun di bulan Februari (Gambar 22). Sementara itu, harga pada keseluruhan ekonomi, seperti diukur oleh deflator PDB, tumbuh pada titik paling rendah sebesar 4,6 persen pada tahun 2012, dengan turunnya inflasi pada seluruh sektor produksi, dengan inflasi pada seluruh sektor produksi menurun, terutama pada bidang Pertambangan.

Gambar 21: Inflasi tahun 2012 terendah dalam 12 tahun terakhir...
(inflasi IHK, persen)



Gambar 22: ...ditunjang oleh disinflasi harga pangan pada paruh kedua 2012 sebelum meningkat pada awal 2013
(inflasi harga, persen)



Catatan: Label data adalah untuk angka inflasi tahun-ke-tahun bulan Desember
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Inflasi bahan pangan meningkat tajam

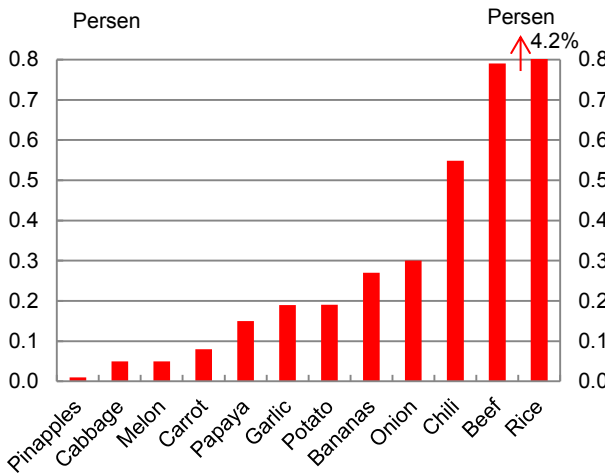
Inflasi bahan pangan pada tahun 2012 mencatat pertumbuhan paling rendah dalam 9 tahun terakhir pada 5,9 persen dengan pertumbuhan harga beras juga berada pada nilai terendahnya dalam 8 tahun. Namun inflasi harga bahan pangan melonjak menjadi 10,3 persen pada bulan Februari dari 5,7 persen pada bulan Desember 2012, yang mendorong sebagian besar peningkatan yang tercatat belakangan ini pada inflasi IHK tahun-ke-tahun. Harga bahan pangan umumnya meningkat pada bulan-bulan sebelum panen raya (yang biasanya berlangsung pada bulan Maret atau April). Pada tahun ini, dampak musiman diperburuk oleh bencana banjir yang parah pada bulan Januari (lihat Kotak 3).

Kebijakan perdagangan baru yang membatasi impor bahan pangan tertentu telah berkontribusi kepada inflasi bahan pangan

Perubahan kebijakan perdagangan baru-baru ini juga telah berkontribusi terhadap inflasi bahan pangan. Impor 13 komoditas, dimana 10 merupakan bahan pangan, mengalami pembatasan dari bulan Januari hingga Juni 2013 (Gambar 23). Pembatasan ini menyusul pembatasan impor yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2012 terhadap sejumlah bahan pangan, yang termasuk daging sapi (lihat Kotak 2), dan mulai bulan Januari 2013, terhadap bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jeruk, apel dan kentang beku. Harga daging sapi mulai meningkat dengan tajam pada waktu pembatasan impor mulai dilakukan. Harga cabai merah dan rawit, bawang putih dan bawang bombay, juga telah meningkat lebih dari 30 persen selama dua bulan sejak pembatasan impor (Gambar 24). Peningkatan ini secara signifikan lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada periode yang sama di tahun-tahun yang lalu, dan juga terhadap bahan pangan lainnya yang tidak terpengaruh oleh langkah kebijakan baru tersebut. Bagian dari keranjang pangan bagi empat bahan itu hanyalah 5 persen tetapi mereka memberi kontribusi hampir sebesar 50

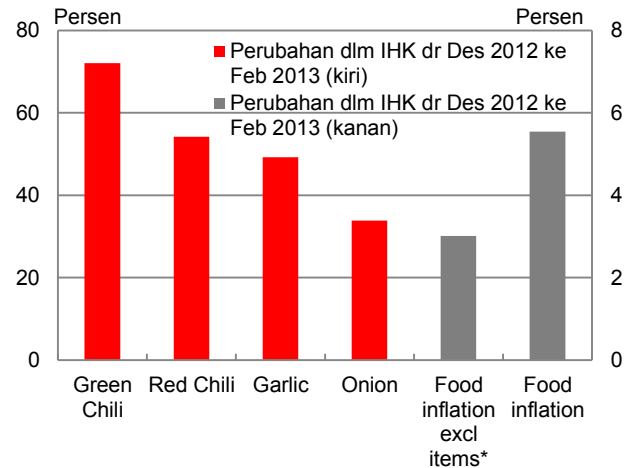
persen kepada peningkatan yang belakangan terjadi pada inflasi bahan pangan (Gambar 24). Media dalam negeri melaporkan bahwa para pengecer menghadapi kelangkaan yang signifikan karena mereka tidak dapat lagi melakukan impor untuk memenuhi kurangnya produksi dalam negeri. Peningkatan harga dapat mengakibatkan lebih banyak produsen yang pindah untuk mengusahakan produk-produk itu di masa depan, dan kemungkinan pencarian pengganti/substitusi oleh para konsumen, namun tampaknya tidak ada pasokan baru yang akan tersedia dalam waktu dekat. Peningkatan dalam tekanan harga bahan pangan mendorong peningkatan inflasi keranjang kemiskinan naik dari nilai paling rendahnya dalam 3 tahun sebesar 5,3 persen pada bulan November menjadi 6,1 persen pada bulan Februari.

Gambar 23: Besaran bobot IHK pada bahan pangan yang terpengaruh oleh kebijakan pembatasan perdagangan berpengaruh pada IHK (inflasi IHK, persen)



Catatan: Bobot dari item lain yang terkena dampak pembatasan yang baru tidak tersedia.
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 24: ...dengan naiknya harga pada waktu berlakunya kebijakan baru tersebut (inflasi harga pada dua bulan pertama tahun 2013, persen)



Catatan: *Food inflation excl items merujuk kepada pertumbuhan pada seluruh inflasi pangan IHC tidak termasuk cabai merah dan rawit, bawang bombay dan bawang putih. Harga dari barang lain yang terpengaruh oleh pembatasan baru tidak tersedia.
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Kotak 2: Tinjauan pendorong peningkatan harga daging sapi di Indonesia

Pada beberapa bulan terakhir harga daging sapi telah meningkat cukup besar (Gambar 25). Kotak ini memberikan sejumlah pandangan teoritis tentang faktor-faktor sisi permintaan dan penawaran yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan harga tersebut.

Terdapat lima kemungkinan pendorong peningkatan: (i) penurunan kuota yang dialokasikan kepada importir daging sapi; (ii) penurunan pasokan daging sapi dalam negeri; (iii) peningkatan permintaan daging sapi dalam negeri; (iv) peningkatan harga daging sapi internasional; dan (v) depresiasi kurs tukar nominal.

Di tengah keprihatinan akan keamanan bahan pangan dan kesehatan binatang, larangan impor daging sapi ditetapkan pada tahun 2011 dengan syarat bahwa importir harus memiliki izin khusus dan hanya diperkenankan untuk mengimpor daging sapi dari negara-negara tertentu yang dianggap bebas penyakit. Pada tahun 2012 Pemerintah memutuskan untuk mengurangi volume impor daging sapi yang tersedia bagi importir sebesar 57 persen, yang tampaknya mendorong peningkatan permintaan pada harga awalnya, yang menyebabkan peningkatan harga penawaran untuk memenuhi permintaan pasar.

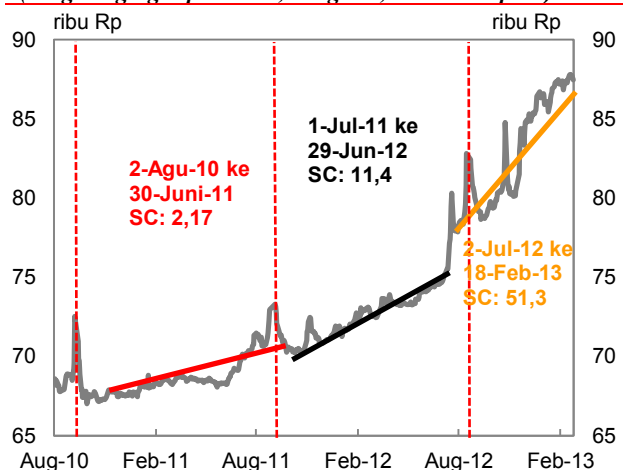
Beralih ke produksi daging sapi (ii), satu penghalang pasokan daging sapi dalam negeri berupa biaya logistik, dengan tingginya biaya menurunkan jumlah yang dipasok pada harga pasar yang ada. Dengan demikian penurunan biaya logistik akan meningkatkan pasokan daging sapi. Sebaliknya juga terjadi peningkatan permintaan/konsumsi daging sapi (iii), yang mendorong harga semakin tinggi. Peningkatan harga menjelang Idul Fitri adalah suatu contoh dari kejutan permintaan positif musiman terhadap harga daging sapi (Gambar 25).

Faktor-faktor luar negeri juga dapat turut mempengaruhi harga daging sapi dalam negeri, terutama karena Indonesia adalah importir bersih daging sapi. Peningkatan dalam harga daging sapi internasional (iv) dan depresiasi kurs tukar valuta (v) juga dapat meningkatkan harga daging sapi dalam negeri. Perubahan-perubahan dalam faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan harga daging sapi impor di dalam negeri dan mendorong penggunaan bahan pengganti/substitusi kepada sumber protein lainnya, termasuk daging sapi produksi dalam negeri, yang akan mendorong harga daging sapi domestik. Namun karena daging sapi dalam dan luar negeri memiliki perbedaan kualitas dan pangsa pasar, mereka bukanlah pengganti yang sempurna, dan pengaruhnya tidak akan bersifat satu-untuk-satu.

Walaupun sulit untuk menghitung secara empiris faktor mana yang lebih penting, masing-masing faktor di atas tampaknya telah memberi kontribusi yang signifikan kepada peningkatan harga daging sapi yang tercatat pada beberapa bulan terakhir. Namun, dari sudut pandang kebijakan, implikasi secara teori sangat jelas: peningkatan volume impor daging sapi dan menurunkan biaya yang berkaitan dengan pasokan daging sapi dalam negeri akan menurunkan harga daging sapi di dalam negeri.

Gambar 25: Harga daging sapi dalam negeri telah meningkat tajam

(harga daging sapi harian, kilogram, ribuan Rupiah)



Catatan: SC adalah koefisien lekukan. Garis titik-titik vertikal adalah hari terakhir pasar beroperasi sebelum periode Hari Raya Idul Fitri setiap tahun. Garis abu-abu adalah harga daging sapi eceran harian, dan garis hitam, merah dan kuning adalah nilai yang tepat bagi periode tersebut.

Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Besarnya kenaikan upah minimum lintas propinsi tahun 2013 akan membawa dampak langsung yang kecil terhadap IHK, sedangkan pengaruh tidak langsungnya belum terlihat

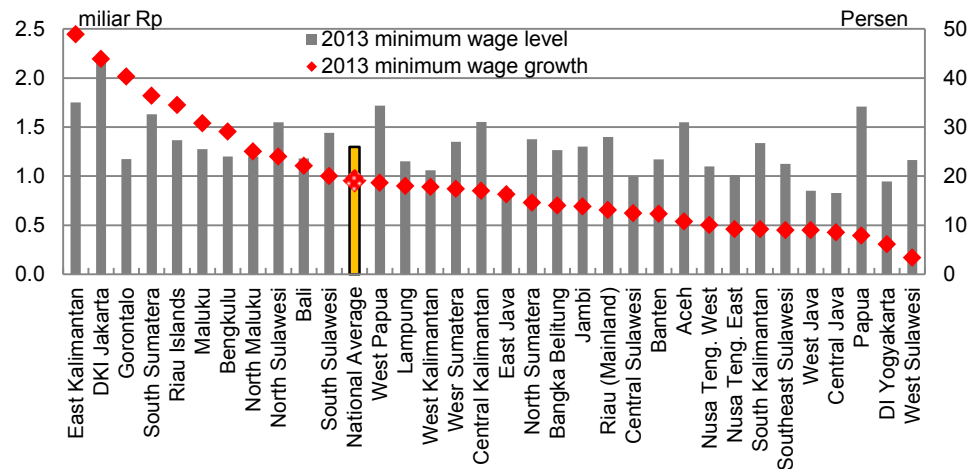
Propinsi-propinsi di seluruh Indonesia telah meningkatkan upah minimumnya untuk tahun 2013, sebagai contoh naik 49 persen dibandingkan tahun 2012 di Kalimantan Timur dan 44 persen untuk Jakarta, yang merupakan peningkatan terbesar selama dekade terakhir (Gambar 26). Peningkatan lintas Indonesia ini tampaknya akan membawa dampak yang lebih besar terhadap tekanan pendorong biaya yang lebih luas dibanding pengaruhnya yang langsung dan segera terhadap IHK (lihat *IEQ* edisi bulan Desember 2012). Masalah implementasi dan pengecualian yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan padat karya dan perusahaan-perusahaan yang mencatat kerugian selama dua tahun berturut-turut juga dapat mengurangi dampak terhadap harga dan tingkat upah umum. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga tanggal 6 Februari 2013, 52 persen dari 949 perusahaan yang menyampaikan permohonan pengecualian telah dikabulkan dan hanya 13 persen yang ditolak, dengan penundaan keputusan bagi perusahaan yang tersisa.

Perkiraan harga jangka pendek menurun

Beberapa fakta dari tidak terlihatnya dampak dari peningkatan upah minimum, sejauh ini, terhadap perkiraan harga yang lebih luas adalah jatuhnya indeks harga konsumen yang diukur pada bulan Januari 2013 sejak mencatat nilai tertingginya pada bulan Desember

2012 (walaupun ekspektasi mungkin turun lebih jauh tanpa adanya kenaikan upah). Menurut survei BI, lebih sedikit responden dibanding bulan lalu percaya bahwa harga akan meningkat dalam tiga hingga enam bulan, terutama karena harapan akan keberhasilan panen yang masanya dimulai pada bulan April 2013. Selain itu, keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik pada tahun 2013 menyebabkan peningkatan tekanan harga untuk biaya perumahan tetapi hal ini lebih dari cukup diimbangi oleh penurunan dalam harga bahan pangan, yang menyebabkan penurunan pada indeks harapan harga konsumen. Serupa dengan hal itu, para pengecer melaporkan tekanan inflasi yang lebih rendah, dengan indeks harapannya bagi harga 3-bulanan di muka penurunan pada bulan Desember.

Gambar 26: Peningkatan upah minimum mencatat variasi besar antar propinsi Indonesia (level (nominal) dalam juta Rupiah, dan pertumbuhan nominal tahunan, persen)



Catatan: Rata-rata nasional merupakan rata-rata sederhana di 33 propinsi
Sumber: CEIC; perhitungan Bank Dunia

Tahap pertama peningkatan tarif listrik menyebabkan dampak langsung yang kecil sebesar 0,08 poin persentase terhadap inflasi IHK

Dalam survei IHK bulan Februari, konsumen juga melaporkan dampak langsung yang kecil sebesar 0,08 poin persentase dari tahap pertama peningkatan tarif listrik per kuartal untuk tahun 2013. Dengan tiga tahapan peningkatan tarif selanjutnya, dampak kumulatif diperkirakan akan sebanding dengan dampak yang terlihat pada tahun 2010 ketika inflasi IHK meningkat sebesar 0,35 poin persentase.

Inflasi IHK diproyeksikan akan naik menjadi 5,8 persen tahun-ke-tahun pada kuartal akhir tahun 2013, diatas batas atas BI sebesar 4,5 ± 1 persen...

Propsek (*outlook*) inflasi IHK didominasi oleh risiko tekanan naik dari keputusan kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum, pembatasan perdagangan bahan pangan dan juga pengaruh sementara yang berkaitan dengan reformasi tarif listrik. Dampak dari faktor-faktor itu akan menjadi lebih jelas pada paruh pertama tahun 2013 dengan tanggapan dari pihak produsen dan konsumen akan kejutan-kejutan itu mulai mempengaruhi permintaan harga dan upah. Untuk jangka pendek, tekanan tambahan diperkirakan akan datang dari berlanjutnya depresiasi Rupiah, yang secara sebagian mengimbangi dampak musiman dari masa panen yang akan datang. Bank Dunia memproyeksikan inflasi IHK akan meningkat dari 4,4 persen pada kuartal akhir tahun 2012 menjadi 5,8 persen pada kuartal 4 2013, diatas batas atas sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5 ± 1 persen. Inflasi IHK untuk tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 5,5 persen.

...dan bergerak sedikit turun pada tahun 2014

Pada tahun 2014, inflasi diproyeksikan akan bergerak naik menjadi 5,2 persen untuk satu tahun, didorong oleh menguatnya Rupiah, bergerak naiknya harga makanan dan berakhirnya dampak peningkatan harga listrik yang dijadwalkan meningkat pada tahun 2013. Inflasi keranjang kemiskinan diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dibanding perkiraan pada IEQ edisi bulan Desember 2012, sebesar 6,9 persen tahun-ke-tahun pada kuartal akhir tahun 2013 dan 7,0 persen tahun-ke-tahun pada kuartal penutup tahun 2014.

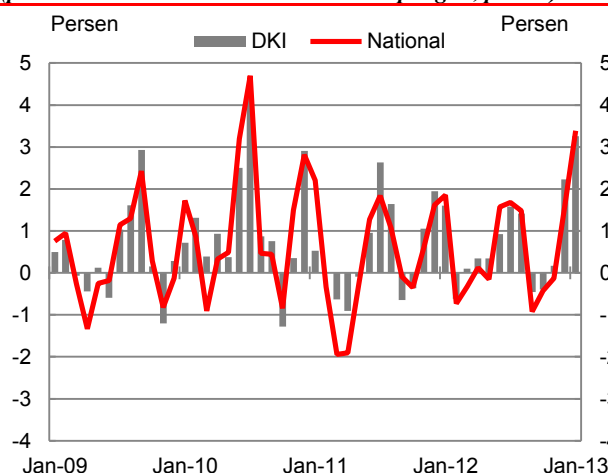
Pertumbuhan deflator PDB telah turun ke nilai terendah sejak tahun 1999 dengan melemahnya pertumbuhan harga pada sebagian besar sektor-sektor

Seperti dibahas pada Bagian 1, tingkat pertumbuhan harga pada ekonomi secara luas, seperti diukur oleh deflator PDB, mencapai 2,7 persen tahun-ke-tahun pada akhir tahun 2012, suatu angka pertumbuhan yang paling rendah dalam 13 tahun. Sepanjang tahun 2012 secara keseluruhan, pertumbuhan deflator PDB adalah 4,6 persen, laju tahunan yang paling rendah sejak setidaknya tahun 1993 ketika BPS memulai pencatatannya. Perlambatan pertumbuhan deflator PDB yang cepat dari 9,2 persen tahun-ke-tahun pada awal tahun 2011 menjadi nilai rendahnya kini sebesar 2,7 persen terlihat pada seluruh 9 sektor ekonomi, dengan penurunan terbesar pada pertumbuhan deflator yang tercatat pada sektor Pertambangan yang mencatat penurunan sebesar 22 poin persentase ke 2,2 persen tahun-ke-tahun pada bulan Desember 2012, laju pertumbuhan yang paling rendah pada dekade terakhir. Sejalan dengan itu, proyeksi pertumbuhan inflasi deflator PDB untuk tahun 2013 direvisi turun menjadi 4,9 persen. Pada tahun 2014, deflator PDB diperkirakan akan tumbuh menjadi 5,9 persen dengan didorong oleh penguatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi kredit, tetapi tetap masih kurang dari setengah dari angka rata-rata sebesar 14 persen yang dicatat sebelum krisis keuangan dunia.

Kotak 3: Banjir besar di Jakarta menyebabkan korban jiwa yang tragis, dan juga gangguan ekonomi yang besar dan peningkatan harga

Banjir besar menggenangi sejumlah daerah di Jabotabek pada tanggal 16-17 Januari, yang disebabkan oleh hujan musiman yang deras dan runtuhnya bagian tanggul kanal banjir Barat sepanjang 30 meter. Kejadian banjir tersebut merupakan banjir paling buruk sejak tahun 2007, yang secara langsung mempengaruhi 25 persen kehidupan kota, dengan 40.000 orang harus dievakuasi dan secara tragis menyebabkan 21 korban jiwa. Dalam hal dampak ekonomi, sejumlah daerah perdagangan utama termasuk Mangga Dua dan pasar Tanah Abang tergenang atau akses menuju ke wilayah tersebut tertutup banjir. Juga kawasan-kawasan industri seperti Pulogadung dan Kawasan Berikat Nusantara turut tergenang yang mengakibatkan kegiatan mereka terhenti hingga 7 hari, selain itu beberapa akses transportasi juga terganggu yang merintangai perdagangan ke berbagai pelabuhan. Kamar Dagang dan Industri Jakarta memperkirakan kerugian ekonomi dari banjir kali ini dapat mencapai Rp 20 triliun (2,06 miliar dolar AS), jauh lebih tinggi dari perkiraan Pemerintah akan kerugian ekonomi akibat banjir besar tahun 2007 yaitu sebesar Rp 3,3 triliun. Pemerintah daerah yang wilayahnya terkena banjir saat ini sedang melakukan penilaian kebutuhan pasca banjir (PDNA) dan menerapkan rencana pemulihan. Di samping memperhitungkan kerugian atas dampak banjir yang baru terjadi, hasil analisis dari kegiatan-kegiatan itu akan memberikan wawasan yang berguna akan kerentanan ekonomi terhadap, dan dampak dari, banjir yang akan datang.

Gambar 27: Peningkatan harga bahan pangan karena banjir (perubahan bulan-ke-bulan dalam IHK pangan, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Banjir dan dampaknya terhadap jaringan pasokan di dan sekitar Jakarta menyebabkan peningkatan harga konsumsi pada bulan Januari, terutama untuk harga bahan pangan mentah seperti bumbu dapur, cabai, ikan, buah-buahan dan sayur-mayur. Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) dan Depok mencatat pengaruh sebesar 38 persen kepada inflasi nasional. Pada bulan Januari 2013, inflasi bahan pangan di Jakarta adalah 3,3 persen bulan-ke-bulan, peningkatan terbesar dalam 4 tahun terakhir, sementara inflasi di Bekasi (5,0 persen) dan Depok (3,8 persen) juga mencatat peningkatan yang besar. Tangerang dan Bogor, walau mendapat dampak yang lebih rendah, mencatat peningkatan harga bahan pangan bulanan masing-masing sebesar 2,0 persen dan 1,4 persen. Peningkatan ini memberi kontribusi yang signifikan kepada naiknya inflasi bahan pangan nasional bulanan menjadi 3,4 persen.

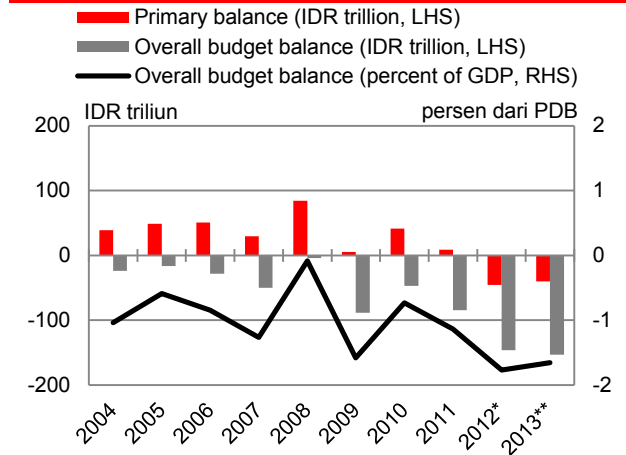
Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang kerentanan Jakarta terhadap banjir dan upaya mitigasinya, lihat Bagian B dari IEQ edisi bulan Desember 2012

6. Defisit fiskal kemungkinan meningkat tahun 2013 karena lebih besarnya belanja subsidi BBM

Posisi fiskal agregat Indonesia masih tetap kuat memasuki tahun 2013...

Kehati-hatian kebijakan fiskal (*prudent fiscal policy*) Indonesia akan berlanjut dalam jangka pendek, dimana Pemerintah menargetkan tercapainya anggaran yang berimbang pada tahun 2016. Defisit anggaran tahun 2012 sebesar 1,8 persen dari PDB atau Rp 146 triliun (Gambar 28), lebih kecil dari sasaran APBN-P sebesar 2,2 persen dari PDB dan proyeksi Bank Dunia pada *IEQ* edisi bulan Desember 2012 sebesar 2,5 persen dari PDB. Hal ini didorong oleh belanja barang dan modal yang lebih rendah dari perkiraan, dampaknya melebihi peningkatan belanja subsidi energi yang signifikan. Defisit APBN bulanan mencatat kenaikan yang tinggi pada bulan November dan Desember, yang hampir merupakan setengah dari defisit anggaran, yang mencerminkan masalah-masalah dalam pencairan anggaran. Untuk analisis selengkapnya dari realisasi APBN tahun 2012, lihat pada Bagian B. Bagian ini menekankan kepada sejumlah tren-tren terakhir dan perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan APBN tahun 2013 dengan defisit anggaran sebesar 1,7 persen dari PDB.

Gambar 28: Kebijakan kehati-hatian fiskal akan berlanjut pada tahun 2013
(keseimbangan anggaran dan keseimbangan primer, triliun Rp dan persen dari PDB)



Catatan: *2012 adalah hasil awal dan **2013 adalah APBN
Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

...tetapi peningkatan kualitas belanja masih tetap merupakan tantangan, dengan belanja subsidi BBM yang regresif terus menghabiskan porsi APBN yang signifikan...

Alokasi belanja untuk subsidi energi, terutama untuk BBM, tetap signifikan pada tahun 2013, yang hampir mencapai seperempat dari anggaran pemerintah pusat, atau 3 persen dari PDB. Angka itu lebih tinggi dari tingkat belanja yang dicatat pada tahun 2012 sebesar 3,7 persen dari PDB (yang mana subsidi BBM sendiri sebesar 2,6 persen dari PDB). Dalam hal reformasi, APBN 2013 hanya menyertakan peningkatan tarif listrik bertahap dengan rata-rata sebesar 15 persen bagi pelanggan yang berlangganan sambungan di atas 900 Volt Ampere (VA), yang mulai berlaku pada bulan Januari 2013, dan tidak menyertakan skenario reformasi subsidi BBM apapun. UU APBN 2013 memang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi tanpa meminta persetujuan DPR, bila terjadi perkembangan ekonomi makro dan indikator asumsi subsidi BBM yang menyimpang secara signifikan dari asumsi-asumsi APBN. Apakah kewenangan itu akan dilaksanakan merupakan hal yang sangat tidak pasti dengan semakin dekatnya siklus pemilihan umum tahun 2014. Dengan tidak adanya peningkatan harga BBM dan dengan rata-rata harga minyak yang diproyeksikan oleh Bank Dunia pada 110 dolar AS/barel untuk tahun 2013 selama setahun penuh, konsumsi BBM bersubsidi akan terus meningkat, dan diproyeksikan akan mendekati 50 juta KL pada tahun 2013. Angka ini akan lebih tinggi secara signifikan dari asumsi APBN sebesar 45 juta KL (Gambar 29), tetapi perbedaan ini sejalan dengan pola dari tahun-tahun yang lalu, ketika asumsi untuk harga minyak Indonesia (*Indonesian crude oil price/ICP*) dan volume subsidi BBM seringkali ditetapkan terlalu rendah.

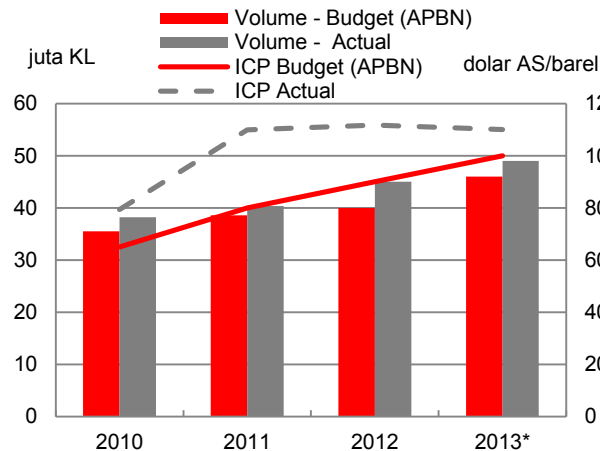
...dan tantangan yang masih berlanjut dalam penyusunan dan implementasi proyek modal

Tingkat realisasi keseluruhan pada tahun 2012 adalah 96 persen dari APBN-P, yang umumnya didorong oleh belanja subsidi energi yang lebih tinggi secara signifikan. Alokasi anggaran untuk pengeluaran barang dan modal telah meningkat secara signifikan dan dengan demikian adalah sasaran yang bergerak, tetapi pencairan APBN masih tetap menjadi tantangan. Pada tahun 2013, pencairan anggaran diperkirakan akan sedikit meningkat, berkat dukungan integrasi proses penyusunan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan dan amandemen pada peraturan

pengadaan. Namun pelaksanaan proyek-proyek modal tampaknya akan tetap menghadapi tantangan karena peraturan-peraturan baru yang terkait (termasuk peraturan menteri) baru saja diterbitkan dan masih memerlukan diseminasi lebih lanjut.²

Gambar 29: Belanja untuk subsidi BBM diperkirakan akan melampaui APBN tahun 2013...

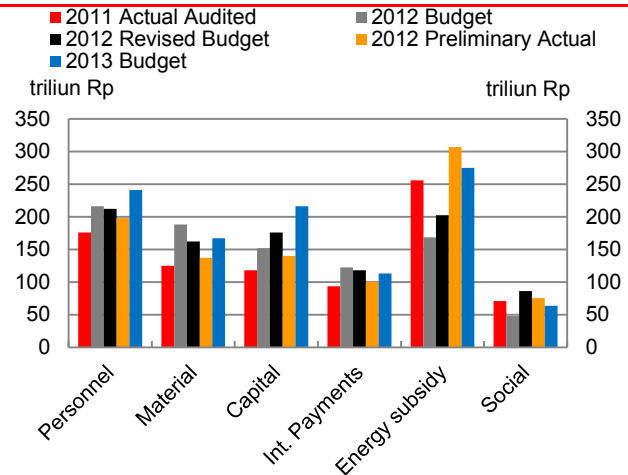
(volume BBM bersubsidi, juta kiloliter (kiri) dan harga minyak Indonesia (ICP), dolar AS per barrel)



Catatan: ICP Aktual 2013 merupakan proyeksi Bank Dunia (USD 110)

Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 30: ...dan bersama-sama dengan tantangan pelaksanaan anggaran, terus membebani kualitas belanja (triliun Rp)



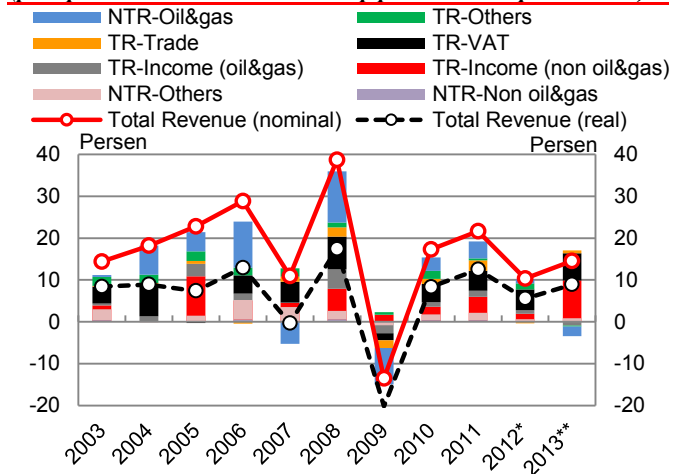
Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya risiko turunnya penerimaan Pemerintah tahun 2013

Walaupun total penerimaan secara keseluruhan di tahun 2012 hampir mencapai sasaran APBN-P sebesar 98 persen (atau Rp 1.336 triliun), penerimaan nominal setahun penuh hanya meningkat sebesar 10 persen, dibanding 22 persen pada tahun 2011. Lemahnya permintaan luar negeri dan penerimaan yang lebih rendah dalam kaitannya dengan ekspor dan komoditas terus berlanjut hingga akhir tahun 2012. Bergerak ke tahun 2013, Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan nominal sebesar 15 persen relatif terhadap realisasi tahun 2012.

Gambar 31: Pengumpulan penerimaan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2013

(*point persentase kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan*)



Catatan: *data tahun 2012 adalah hasil awal. **data tahun 2013 adalah APBN. TR: penerimaan pajak (Tax revenue); NTR: penerimaan non pajak (Non-tax revenue)

Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

² Tiga peraturan kementerian yang berkaitan adalah peraturan Badan Pertanahan Nasional tentang pedoman penerapan teknis (Peraturan Kepala BPN 5/2012), peraturan Kementerian Keuangan tentang tata kelola keuangan yang berkaitan dengan pengadaan lahan yang didanai oleh pemerintah pusat (PMK 13/PMK.02/2013), dan peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang tata kelola dan dukungan pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota (Permendagri No.72/2012)

Sejumlah perkembangan terakhir menunjukkan risiko penurunan terhadap sasaran penerimaan pada tahun 2013. Pertama, sasaran peningkatan rasio pajak terhadap PDB sebesar 1 persen pada tahun 2013 relatif terhadap pencapaian tahun 2012 (dari 11,9 persen dari PDB pada tahun 2012 menjadi 12,9 persen dari PDB pada tahun 2013) tampak ambisius karena penerimaan pada tahun 2012 hanya meningkat sebesar 0,1 persen dari PDB dibanding tahun 2011, khususnya dengan kebijakan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang baru yang akan efektif di tahun 2013. Kedua, produksi minyak mentah, merupakan sumber penerimaan negara yang penting, diperkirakan akan turun menjadi 830 ribu barel per hari (bph) oleh SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dibanding asumsi yang ditetapkan pada APBN sebesar 900 ribu bph.³ Namun harga minyak yang lebih tinggi dibanding harga konservatif yang diasumsikan sebesar 100 dolar AS per barel pada APBN dapat secara sebagian mengimbangi penurunan produksi tersebut. Produksi gas di tahun 2013 juga diharapkan akan meningkat daripada asumsi APBN⁴.

Insentif-insentif fiskal baru juga telah diumumkan untuk mendorong penerimaan dari minyak dan gas

Dalam upaya untuk menarik lebih banyak penerimaan dari sektor migas, Pemerintah baru-baru ini meluncurkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong investasi yang lebih besar dalam kegiatan eksplorasi migas. Insentif tersebut termasuk pembebasan perusahaan migas dari pajak pertambahan nilai atas barang-barang impor dan juga pajak bumi dan bangunan. Meskipun demikian, survei-survei terbaru, misalnya survey terhadap eksekutif perusahaan-perusahaan tambang yang dilakukan oleh Fraser Institute, juga masih menunjukkan adanya kekhawatiran dari investor terkait ketidakpastian peraturan di dalam sektor pertambangan.

Melihat ke depan ke tahun 2013, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,9 persen dari PDB, sedikit lebih besar dari APBN

Seperti telah dibahas di atas, dengan latar belakang lebih besarnya perkiraan belanja subsidi energi dan lebih lemahnya potensi pengumpulan penerimaan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal untuk tahun 2013 akan mencapai 1,9 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi dari proyeksi APBN sebesar 1,7 persen dari PDB. Tidak seperti APBN tahun 2012, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran cadangan khusus bagi belanja subsidi energi untuk tahun fiskal 2013. Namun, seperti dibicarakan di atas, posisi fiskal Indonesia secara keseluruhan tetap bertahan kuat dan Pemerintah memiliki dana untuk membiayai sejumlah kelebihan karena defisit fiskal; pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 37 triliun.

Pemerintah telah menerbitkan sebesar 67 persen dari sasaran penerbitan obligasi pada kuartal pertama tahun 2013

Rencana pembiayaan Pemerintah untuk tahun 2013 pada umumnya berada pada jalur yang tepat. Pada awal Maret, Pemerintah telah mengumpulkan Rp 38,3 triliun dari obligasi yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan, atau 67 persen dari sasaran penerbitan obligasi untuk kuartal pertama tahun 2013⁵. Kuatnya fundamental ekonomi makro Indonesia bersama-sama dengan tata kelola fiskal dan moneter yang berhati-hati, dan tingkat imbal hasil (*yield*) yang menarik, telah mendorong permintaan obligasi Indonesia. Investor dalam dan luar negeri menunjukkan ketertarikan kepada penawaran pada bulan Januari dan Februari. Sehingga, penerbitan sekuritas bruto pada tahun 2013 akan tetap signifikan dengan proyeksi sebesar Rp 282 triliun.

³ <http://www.thejakartapost.com/news/2013/01/31/declining-output-likely-see-drop-oil-revenue-18-percent.html>

⁴ <http://www.skspmigas-esdm.go.id/en/skk-migas-tambah-produksi-minyak-121-ribu-barel-per-hari-tahun-2013>

⁵ Lihat situs Direktorat Jenderal untuk manajemen utang.

Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,9 persen dari PDB pada tahun 2013, sedikit diatas sasaran APBN

(triliun Rp, kecuali dinyatakan lain)

	2010 Realisasi	2011 Realisasi	2012 APBN-P	2012 Realisasi sementara	2013 APBN	2013 Bank Dunia
A. Penerimaan	995	1.211	1.358	1.336	1.530	1.458
1, Penerimaan pajak	723	874	1.016	980	1.193	1.126
2, Penerimaan bukan pajak	269	331	217	352	332	327
B. Pengeluaran	1.042	1.295	1.548	1.482	1.683	1.637
1, Pemerintah pusat. yaitu	697	884	1.070	1.001	1.154	1.109
Pegawai	148	176	212	198	241	237
Barang	98	125	162	137	167	158
Modal	80	118	176	140	216	168
Subsidi. yaitu	193	295	245	346	317	355
Subsidi BBM	82	165	137	212	194	232
Sosial	69	71	86	75	63	63
2, Transfer ke daerah	345	411	479	480	529	529
C. Neraca primer	41,5	8,9	-72,3	-45,5	-40,1	-66,4
D. SURPLUS / DEFISIT	-46,8	-84,4	-190,1	-146,0	-153,3	-179,6
Defisit (% dari PDB)	-0,7	-1,1	-2,2	-1,8	-1,7	-1,9
E. Pembiayaan bersih	92	131	190,1	180	153	n.a
1, Pembiayaan dalam negeri	96	149	194,5	199	173	n.a
2, Pembiayaan luar negeri	-4,6	-17,8	-19,3	-19,2	-19,5	n.a
Asumsi/realisasi ekonomi utama						
Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,1	6,5	6,5	6,2	6,8	6,2
IHK (persen)	7,0	3,8	6,8	4,3	4,9	5,5
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9.078	8.779	9.000	9.384	9.300	9.600
Harga minyak (dolar AS/barel)	79,4	111,5	105	112,7	100,0	110
Produksi minyak (ribu barel/hari)	954	899	930	861	900	830

Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

7. Tingkat kemiskinan resmi terus menurun dengan lambat

Tingkat kemiskinan resmi turun menjadi 11,7 persen pada bulan September 2012...

Angka kemiskinan resmi yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa laju pengentasan kemiskinan di Indonesia terus menurun, meskipun berjalan lambat. BPS memperkirakan bahwa 11,7 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012, suatu penurunan sebesar 0,3 persen dari bulan Maret 2012. Penurunan ini sedikit lebih besar dari penurunan sebesar 0,1 persen yang terjadi dari bulan Maret hingga September tahun 2011. Karena data hanya dikumpulkan untuk dua periode bulan September, pengaruh pola musiman terhadap pergerakan laju kemiskinan antara bulan Maret dan September belum dipahami sepenuhnya.

...yang menyebabkan munculnya hambatan dalam pemenuhan sasaran Pemerintah pada tahun 2014, dimana tingkat kemiskinan adalah sebesar 8-10 persen

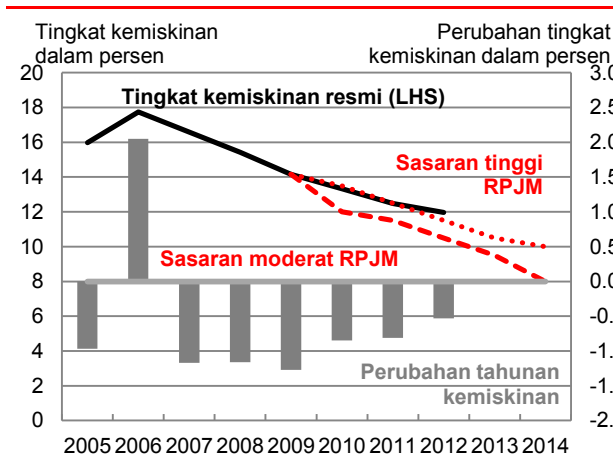
Tren yang berjalan memberi kesan bahwa akan sulit untuk mencapai sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2014 seperti ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (lihat Gambar 32). Rata-rata penurunan tahun-ke-tahun bulan Maret sejak tahun 2007 adalah 0,9 poin persentase. Tingkat kemiskinan bulan Maret 2012 sebesar 12,0 persen sudah berada di atas sasaran RPJM, dan akan dibutuhkan penurunan sebesar 1 poin persentase setiap tahun untuk tahun 2013 dan 2014 untuk memenuhi sasaran RPJM yang tinggi. Namun laju penurunan telah melambat baru-baru ini, dengan penurunan sebesar 0,5 poin

persentase yang tercatat pada tahun lalu dari bulan Maret 2011 hingga Maret 2012 sebagai penurunan yang paling rendah dalam satu dekade (dengan pengecualian peningkatan yang didorong oleh krisis harga bahan pangan pada tahun 2006). Salah satu alasan perlambatan laju pengentasan kemiskinan pada beberapa tahun terakhir adalah inflasi keranjang kemiskinan selalu lebih besar secara signifikan dibanding inflasi IHK dan inti. Hal ini tampaknya akan terus berlanjut dengan inflasi dari bulan Maret 2012 ke Februari 2013 berjumlah 6,4 persen untuk inflasi keranjang kemiskinan dibanding 5,3 persen untuk inflasi IHK dan 4,1 persen inflasi inti, yang merupakan tantangan untuk mencatat penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan pada tahun ini.

Terdapat variasi dalam tingkat pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia

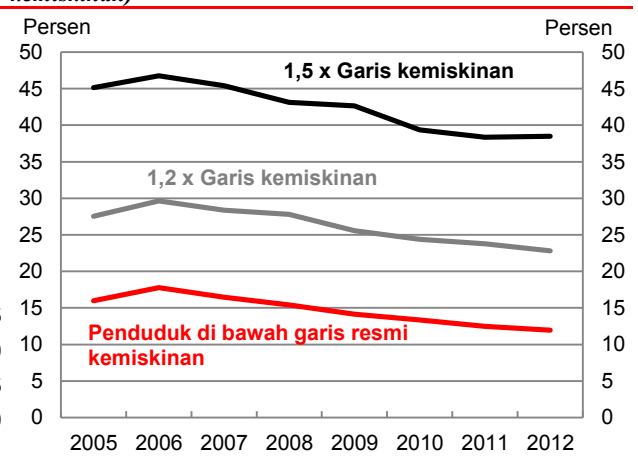
Penurunan kemiskinan lebih tinggi secara marginal pada daerah-daerah pedesaan (dari 15,1 persen pada bulan Maret 2012 menjadi 14,7 persen pada bulan September) dibanding daerah-daerah perkotaan (dari 8,8 persen pada bulan Maret 2012 menjadi 8,6 persen pada bulan September 2012). Bagian Timur Indonesia, terutama kepulauan Maluku dan Papua, terus mencatat tingkat kemiskinan yang tertinggi di seluruh Indonesia, pada tingkat 24,1 persen, sementara konsentrasi kemiskinan yang paling rendah berada di Kalimantan, dengan tingkat 6,5 persen. Secara absolut, sebagian besar penduduk miskin masih hidup di pulau Jawa yang berpopulasi tinggi.

Gambar 32: Kemiskinan terus menurun, tetapi lajunya lebih lambat dari yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran RPJM Pemerintah
(tingkat kemiskinan resmi, persen jumlah populasi)



Sumber: BPS; TNP2K; RPJM

Gambar 33: Sebagian besar penduduk masih berada dekat dengan garis kemiskinan resmi, menunjukkan kerentanan yang tinggi terhadap kemiskinan
(persen populasi di bawah rasio tertentu dari garis kemiskinan)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Sebagian besar penduduk masih sangat rentan terhadap kemiskinan

Kerentanan tetap tinggi, dengan banyak penduduk yang telah keluar dari kemiskinan masih tetap hidup pada tingkat yang dekat dengan garis kemiskinan, yaitu Rp 248.707 per orang per bulan pada bulan Maret 2012. Selain itu, jumlah penduduk yang hidup pada 1,5 kali tingkat garis kemiskinan telah sedikit meningkat, dari 38,0 persen pada tahun 2011 menjadi 38,5 persen pada tahun 2012 (lihat Gambar 33). Hal ini menunjukkan bahwa sementara tingkat kemiskinan resmi terus menurun, kerentanan tidak ikut menyusut, dan hampir 94 juta penduduk Indonesia berada dalam keadaan yang sangat lemah terhadap kejutan yang dapat mengirimkannya kembali ke dalam jurang kemiskinan.

Masih banyak ruang untuk memperluas bantuan sosial

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan lingkungan bantuan sosial dan memperluas perlindungan kepada rumah tangga yang lemah. Salah satu upaya itu adalah peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 3 juta rumah tangga pada tahun 2014. Diluncurkan pada tahun 2007, program itu memberikan bantuan tunai kepada 500.000 rumah tangga berpenghasilan rendah pada tujuh propinsi dalam proyek uji coba, sesuai dengan kehadiran di sekolah dan kunjungan perempuan dan anaknya ke fasilitas kesehatan. Pada awal tahun 2013 program itu akan mencakup 1,2 juta keluarga pada 25 propinsi. Penerima bantuan secara rata-rata menerima bantuan yang setara dengan 10 persen dari pengeluaran tahunan keluarga miskin; pengalaman

internasional menunjukkan bahwa transfer dengan jumlah antara 15 hingga 25 persen akan membawa dampak yang lebih bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

8. Risiko terhadap perkiraan (*outlook*) menguat disebabkan oleh faktor-faktor domestik

Prospek (*outlook*) pertumbuhan menghadapi risiko...

Perkiraan dasar Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh secara berkesinambungan selama tahun 2013. Ketidakpastian tentang prospek (*outlook*) ekonomi dunia masih tetap tinggi, tetapi kegiatan ekonomi global yang lebih kokoh dan kondisi pasar keuangan yang lebih baik sejak akhir tahun 2012 mengesankan bahwa risiko yang berasal dari faktor luar negeri telah menurun terhadap ekonomi Indonesia. Namun terdapat sejumlah perkembangan dalam negeri yang dapat melemahkan pertumbuhan.

...yang berasal dari pertumbuhan investasi tetap atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang lebih rendah...

Risiko utama terhadap pertumbuhan berasal dari prospek investasi, dengan tiga risiko.

Pertama, pelemahan harga komoditas sejak pertengahan tahun 2011 tampaknya telah mulai membebani investasi menuju akhir tahun 2012. Hal ini sejalan dengan kaitan historis antara harga komoditas dan pertumbuhan investasi, dikarenakan pentingnya komoditas untuk ekspor, laba perusahaan dan pendapatan rumah tangga di sektor sumber daya adalah bagian yang penting bagi penghasilan pekerjaan buruh, seperti pada daerah-daerah perkebunan kelapa sawit. Saluran pendapatan buruh tersebut berada pada persimpangan antara investasi dan konsumsi, dan ini adalah hal kedua di mana pertumbuhan investasi menghadapi risiko. Investasi telah semakin menuju pemenuhan permintaan pasar konsumen Indonesia yang meningkat dengan pesat. Sementara konsumsi diperkirakan akan terus meningkat dengan kuat, didorong oleh kekuatan struktural yang mendorong perkembangan, pertumbuhan dapat menemui rintangan bila inflasi meningkat karena naiknya tekanan pendorong biaya yang membatasi daya beli, dan bila kepercayaan konsumen terhalang oleh besarnya biaya pinjaman yang berkaitan.

Ketiga, investasi tampaknya akan menghadapi sejumlah rintangan dari ketidakpastian aturan dan pengaruh politik dengan semakin dekatnya pemilu tahun 2014. Indonesia juga menghadapi persaingan yang ketat dari negara-negara tetangga dalam investasi yang berorientasi ekspor pada waktu di mana biaya tenaga kerja, atau setidaknya upah minimum pekerja, telah meningkat secara signifikan.

Risiko-risiko itu membuat laju belanja investasi swasta dan FDI sebagai hal yang sangat penting bagi prospek pertumbuhan PDB. Sebagai contoh indikatif, penurunan pertumbuhan investasi hingga setengahnya, yaitu menjadi 5 persen pada tahun 2013 (dibanding mendekati 10 persen pada tahun 2012 dan perkiraan dasar Bank Dunia sebesar 8,0 persen pada tahun 2013), akan menurunkan pertumbuhan PDB riil sebesar sekitar 1 poin persentase.

...meningkatnya tekanan inflasi dorongan biaya (*cost-push*)...

Risiko inflasi cenderung meningkat. Pengaruh dari lemahnya kurs tukar nominal Rupiah hanya bersifat terbatas pada tahun 2012 tetapi tampaknya akan turut mempengaruhi harga konsumen dengan suatu jeda waktu, dan pelemahan lebih lanjut kepada valuta akan semakin menambah pengaruhnya. Penyesuaian naik tarif listrik bersubsidi sebesar rata-rata 15 persen, walaupun memang baik dalam hal efisiensi dan fiskal, penyesuaian itu akan membawa pengaruh inflasi sementara, seperti juga untuk peningkatan harga yang mendapat subsidi manapun hingga tahun 2014. Tekanan yang lebih besar akan datang dari potensi pengaruh harga putaran kedua dari peningkatan upah minimum yang ditetapkan untuk tahun 2013, walaupun masih perlu dilihat bagaimana peningkatan yang besar itu akan mempengaruhi keseluruhan distribusi upah dan tenaga kerja secara umum. Akhirnya, upaya-upaya yang ada yang membatasi perdagangan produk seperti bahan pangan dan peralatan elektronika akan cenderung mendorong peningkatan harga. Bank Indonesia harus mengukur risiko faktor sisi penawaran ini yang mempengaruhi peningkatan inflasi umum, yang dapat mengharuskan pengetatan kebijakan moneter. Tantangan ini muncul bersamaan dengan pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang baru, yang akan mulai bertugas pada bulan Mei 2013 setelah pengumuman pensiun dari Gubernur BI sekarang, Darmin Nasution.

...dan pengelolaan neraca eksternal Upaya-upaya yang membatasi perdagangan dan peningkatan retorika proteksionis memunculkan kekhawatiran bagi para penyusun kebijakan terhadap timbulnya defisit neraca berjalan kuartalan dan depresiasi Rupiah, yang juga menjadi fokus dari para investor. Menuju ke depan, akan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tanggapan kepada dinamika neraca luar negeri Indonesia akan menghindari konsekuensi kontra-produktif yang tidak diinginkan, seperti peningkatan persepsi risiko pada waktu terdapat kebutuhan pembiayaan hutang luar negeri bruto yang signifikan, atau menurunkan daya saing dengan meningkatkan harga dalam negeri dan merintang ekspor yang bergantung kepada masukan barang impor. Selain itu, terdapat episode-episode dimana likuiditas pasar valuta asing mengalami pengetatan, dan dengan demikian, penting bagi pengambil kebijakan untuk mengambil langkah agar hal tersebut tidak berlanjut.

Sementara menjaga pertumbuhan akan memerlukan tindakan untuk meminimalkan ketidakpastian yang berkaitan dengan kebijakan

Selain menghindari tantangan-tantangan jangka pendek yang timbul dari kondisi ekonomi dalam dan luar negeri, keberlanjutan penanganan tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia akan membutuhkan lebih banyak kemajuan dalam reformasi dan implementasi kebijakan ekonomi. Tantangan-tantangan yang besar termasuk memastikan bahwa komunikasi dan implementasi kebijakan mendorong pertumbuhan investasi swasta yang berkelanjutan, sementara juga meningkatkan efisiensi investasi pemerintah, terutama dalam bidang infrastruktur. Intensifikasi politik menjelang pemilihan umum pada tahun 2014 tampaknya akan mempersulit hal tersebut. Karenanya, selama periode ini sangatlah penting untuk mengurangi ketidakpastian kebijakan dan menekankan pentingnya komunikasi yang jelas terkait potensi reformasi kebijakan. Penunjukan di masa datang untuk posisi-posisi kunci terkait perekonomian, menyusul nominasi Menteri Keuangan sebagai Gubernur Bank Indonesia, juga akan turut mewarnai lingkungan kebijakan makro ekonomi ke depan.

B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA



1. Tinjauan terhadap realisasi sementara APBN 2012

Realisasi sementara APBN 2012 menunjukkan defisit Anggaran yang lebih rendah dari perkiraan yaitu 1,8 persen dari PDB

Walaupun tahun 2012 telah lewat, suatu tinjauan awal terhadap realisasi APBN tahun akan memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana perkembangan penerimaan, belanja dan pinjaman pemerintah. Bagian ini memberikan tinjauan singkat tentang angka-angka APBN yang terakhir. Angka *headline*, defisit anggaran, mencapai Rp 146 triliun (1,8 persen dari PDB), lebih rendah secara signifikan dibanding asumsi pada APBN-P sebesar 2,2 persen dari PDB. Gambaran dalam pengeluaran dan penerimaan beragam. Jumlah realisasi penerimaan mencapai Rp 1.336 triliun atau 98 persen dari sasaran APBN-P, dengan penerimaan yang lebih lemah dari penerimaan pajak dan ekspor non-migas dibanding kuatnya pertumbuhan PPN dan cukai. Jumlah pengeluaran mencapai Rp 1.482 triliun (96 persen dari alokasi APBN-P), dengan lebih rendahnya realisasi belanja barang dan modal diimbangi dengan lebih besarnya biaya subsidi energi secara signifikan.

Realisasi ekonomi makro tahun 2012 beragam dibandingkan terhadap asumsi-asumsi APBN

Realisasi indikator ekonomi makro tahun 2012 bervariasi dibandingkan terhadap asumsi APBN (Tabel 4). Dari sisi positif, rata-rata inflasi dan suku bunga (SPN 3-bulanan) berada jauh di bawah sasaran yang ditetapkan pada APBN-P masing-masing sebesar 4,3 persen (yoy) dan 3,2 persen (yoy). Pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati dan peningkatan peringkat hutang negara telah turut berperan menurunkan imbal hasil (*yield*). Tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2012, yang menurut APBN-P

Tabel 4: Realisasi indikator ekonomi makro tahun 2012 bervariasi dibandingkan asumsi APBN

	2011	2012		Realisasi sementara
	Realisasi	APBN	APBN-P	
Pertumbuhan PDB riil (% yoy)	6,5	6,7	6,5	6,2
Inflasi (% yoy)	3,8	5,3	6,8	4,3
Kurs tukar (Rp/USD)	8.779	8.800	9.000	9.384
Suku bunga SPN 3-bulanan (%)	4,8	6,0	5,0	3,2
Harga minyak mentah (dolar AS/Barel)	111,5	90,0	105	113
Produksi minyak (000 bpd)	899	950	930	861

Sumber: Kemenkeu

hanya dapat dilakukan bila rata-rata harga minyak selama enam bulan berada di atas 121 dolar AS per barel, juga membantu mempertahankan inflasi yang cukup rendah. Di sisi lain, Rupiah mengalami depresiasi sebesar 6,9 persen terhadap dolar, dari Rp 8.779 per dolar AS pada tahun 2011 menjadi Rp 9.384 per dolar AS pada tahun 2012, yang umumnya mencerminkan tekanan terhadap neraca berjalan (lihat pembahasan pada Bagian A). Realisasi Harga Minyak Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*) sebesar 113 dolar AS per barel juga lebih tinggi dari asumsi, sementara produksi minyak terus menurun, yang mencerminkan rendahnya investasi baru dan semakin tuanya ladang minyak yang ada. Produksi minyak hanya mencapai 861 ribu barel per hari (bpd), cukup jauh dibanding asumsi APBN-P sebesar 930 ribu bpd. Pertumbuhan PDB mencapai 6,2 persen (yoy) pada tahun 2012, berada di bawah asumsi APBN-P sebesar 6,5 persen.

a. Angka sementara defisit anggaran adalah 1.8 percent dari PDB...

Defisit APBN untuk sepanjang tahun 2012 mencapai 1,8 persen dari PDB (Rp 146 triliun), lebih rendah dari sasaran APBN-P sebesar 2,2 persen dari PDB (Rp 190 triliun) dan proyeksi di IEQ edisi bulan Desember sebesar 2,5 persen dari PDB

Defisit APBN yang lebih rendah ini mencerminkan lebih lemahnya pencairan belanja secara keseluruhan, terutama bagi belanja barang, modal dan pengeluaran lain selain subsidi energi yang jumlahnya melampaui alokasi revisi yang ditargetkan pada APBN-P. Meskipun demikian, penerimaan secara keseluruhan mendekati sasaran APBN-P.

Secara umum rencana pembiayaan berada pada jalur yang tepat, dengan pembiayaan bersih sebesar Rp 180 triliun merupakan 95 persen dari sasaran APBN-P (Gambar 34). Disatu sisi,

pembiayaan dalam negeri, yang umumnya dipenuhi dengan surat utang pemerintah, sedikit meningkat dari proyeksi pada APBN-P (Rp 199 triliun dibanding Rp 195 triliun), yang sebagian besar diterbitkan pada semester pertama tahun 2012. Di sisi lain, pembiayaan luar negeri berada di bawah sasaran (64 persen dari sasaran pada APBN-P) karena rendahnya realisasi pembiayaan proyek.

Saldo pembiayaan mencatat surplus (SILPA) sebesar Rp 34 triliun dikarenakan rendahnya realisasi defisit (Rp 146 triliun) dibandingkan dengan pembiayaan bersih (Rp 180 triliun)

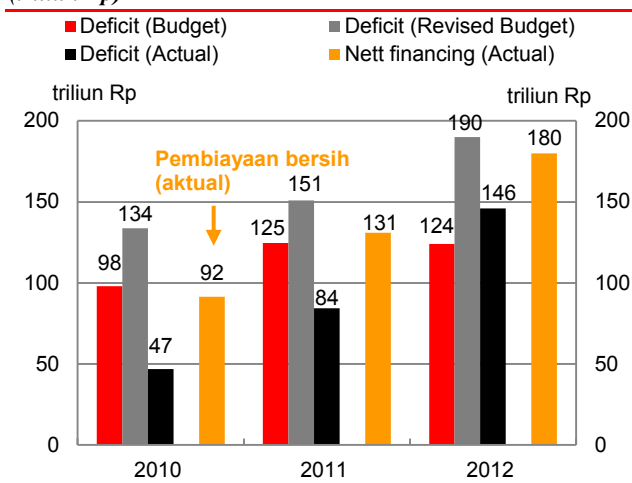
Sebagian untuk mengantisipasi defisit yang lebih tinggi karena peningkatan perkiraan pengeluaran subsidi energi yang signifikan, Pemerintah melakukan pra-pembiayaan defisitnya pada semester pertama tahun 2012, umumnya melalui penerbitan obligasi negara. Namun ternyata realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sangat rendah dibandingkan APBN-P, menghasilkan defisit yang lebih rendah dan surplus pembiayaan bersih sebesar Rp 34 triliun. Akan tetapi, angka ini termasuk pengurangan sisa anggaran lebih (SAL), yang turun dari Rp 92 triliun pada akhir 2011, menjadi Rp 70 triliun pada 31 Desember 2012. Saldo SAL akhir Desember 2012, Rp 33 triliun direncanakan untuk membiayai defisit tahun 2013, sebesar Rp 10 triliun dan untuk membayar subsidi energi yang diakumulasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp 23 triliun, yang menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah sisa Rp 37 triliun adalah saldo SAL untuk 2013, yang akan digunakan untuk dan akan digunakan untuk pembiayaan sementara pengeluaran pada awal tahun fiskal 2013, seperti pembayaran gaji dan transfer daerah.

b. ... penurunan pertumbuhan penerimaan diimbangi oleh rendahnya realisasi belanja utama

Jumlah total realisasi penerimaan mencapai 98 persen dari sasaran APBN-P, atau Rp 1.356 triliun, dengan gambaran beragam antar komponen penerimaan

Pertumbuhan penerimaan secara nominal pada tahun 2012 menurun menjadi 10.3 persen (yoy) dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2010 dan 2011 yang masing-masing mencapai 17,3 persen dan 21,6 persen. Rasio pajak terhadap PDB mendekati sasaran dengan mencapai 11,9 persen dari PDB, karena lebih rendahnya realisasi penerimaan pajak dibanding APBN-P dan pertumbuhan PDB nominal dan riil yang lebih rendah dari perkiraan. Pengumpulan penerimaan dari pajak pendapatan dan pajak ekspor non-migas terus menyusut sepanjang tahun, yang mencerminkan lemahnya permintaan luar negeri, penurunan harga komoditas dan pertumbuhan PDB nominal yang lebih lemah. Namun perlambatan ini diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dari pajak pertambahan nilai (PPN), cukai dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas (Gambar 35). Kuatnya realisasi PPN mencerminkan kuatnya konsumsi domestik dan juga upaya-upaya yang terus berlangsung untuk meningkatkan pengaturan pajak. Lebih tingginya realisasi penerimaan pajak dan bukan pajak dari minyak umumnya didorong oleh lebih tingginya harga minyak dibandingkan dengan asumsi anggaran, yang besarnya

Gambar 34: Realisasi defisit anggaran tahun 2012 lebih rendah dari asumsi APBN-P (triliun Rp)



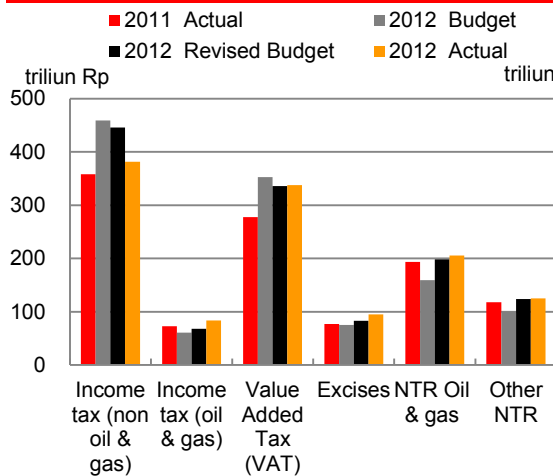
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

lebih dari cukup untuk mengimbangi kenyataan bahwa produksi minyak berada di bawah sasaran sebesar 861 ribu bpd.

Pencairan belanja secara keseluruhan adalah 96 persen dari alokasi APBN-P, juga mengikuti kinerja yang beragam antar komponen belanja

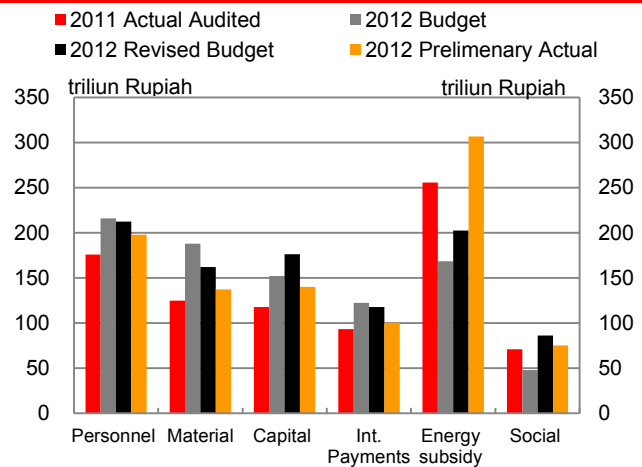
Salah satu hal yang menjadi perhatian di sisi pengeluaran adalah biaya subsidi energi mencapai Rp 307 triliun, lebih tinggi sebesar 51 persen dari alokasi pada APBN-P dan setara dengan 3.7 persen dari PDB (Gambar 36). Subsidi BBM mencapai 2.6 persen dari PDB dan subsidi listrik mencapai 1.1 persen. Selain itu, terdapat tambahan biaya subsidi energi sebesar Rp 23 triliun yang harus dibayar oleh Pemerintah pada tahun berikutnya, yang menunggu pemeriksaan oleh BPK. Jumlah belanja berlebih yang cukup besar ini didorong oleh harga rata-rata minyak (ICP) yang lebih tinggi dan volume konsumsi BBM bersubsidi, pelemahan Rupiah, dan tidak adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi karena syaratnya seperti ditetapkan pada APBN-P tidak tercapai (121 dolar AS per barel atau 15 persen di atas asumsi APBN). Celah yang semakin membesar antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, bersama-sama dengan semakin meningkatnya permintaan, mendorong konsumsi BBM bersubsidi yang mencapai 45,2 juta KL, dibanding sasaran APBN-P sebesar 40 juta KL.

Gambar 35: Penerimaan hampir mencapai sasaran tapi kinerjanya bervariasi antar jenis penerimaan (triliun Rupiah)



Catatan: NTR adalah penerimaan non pajak (non-tax revenue)
Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 36: Tantangan pencairan APBN tetap ada untuk belanja inti, belanja subsidi energi meningkat pesat (triliun Rupiah)

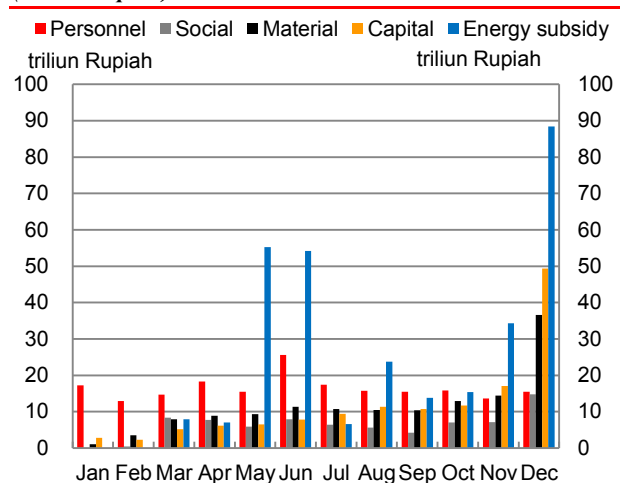


Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

Di sisi lain tantangan eksekusi anggaran terus berlanjut

Jumlah belanja kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk pembayaran transfer, subsidi dan bunga) hanya mencapai 87,5 persen dari tingkat APBN-P, di bawah kinerja tahun 2011 yang mencapai 90,5 persen (Gambar 37). Walau belanja barang dan modal berada cukup signifikan di bawah sasaran, masing-masing sebesar 85 persen dan 80 persen, secara nominal jumlah mereka meningkat masing-masing sebesar 10 dan 19 persen dibanding tahun 2011. Sesungguhnya pertumbuhan nominal belanja modal hanya di bawah pertumbuhan nominal

Gambar 37: Seperti tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran 2012 dicairkan pada bulan Desember (triliun Rupiah)



Sumber: Kemenkeu dan perhitungan staf Bank Dunia

untuk subsidi BBM, yang tumbuh sebesar 28 persen. Pencairan APBN untuk barang dan modal tidak dapat mengimbangi alokasi anggaran yang lebih besar, walaupun perlu dicatat bahwa alokasi belanja modal telah naik tajam.

Di dalam belanja modal, realisasi belanja untuk pembebasan tanah relatif paling rendah (72 persen), diikuti oleh bangunan (78 persen). Selain tantangan-tantangan lama yang masih bertahan, seperti revisi anggaran dan proses pengadaan yang rumit, pencairan anggaran pada tahun 2012 juga dipengaruhi oleh sejumlah masalah seperti restrukturisasi yang dilakukan pada sejumlah kementerian negara (Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dan Kementerian Perdagangan), kebijakan-kebijakan baru yang diluncurkan selama tahun fiskal tersebut yang sementara merintang pelaksanaan anggaran (seperti kebijakan efisiensi anggaran), alokasi tambahan bagi infrastruktur pada APBN-P, dan peraturan baru tentang bangunan-bangunan baru yang harus memperoleh izin dari Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terdapat pula hal yang positif, dengan pembayaran bunga yang hanya mencapai 85 persen dari perkiraan pada APBN-P, yang umumnya disebabkan oleh lebih rendahnya tingkat imbal hasil (*yield*).

Selain daya serap anggaran yang rendah, pola belanja juga sangat condong kepada akhir tahun fiskal

Penumpukan belanja pada akhir tahun, terutama pada bulan Desember, tetap sangat signifikan khususnya untuk barang, modal dan subsidi energi. Pola ini, yang sekali lagi mencerminkan tantangan yang masih bertahan dalam pencairan anggaran, membawa risiko terhadap kualitas belanja dan potensi penyalahgunaan dana pemerintah. Jumlah pencairan belanja di bulan Desember mencapai Rp 272 triliun, 2,5 kali rata-rata pada bulan Januari hingga November sebesar Rp 110 triliun. Di lihat secara selektif pada kelompok belanja, sejumlah besar belanja modal tahun 2012 (35 persen), barang (27 persen) dan subsidi energi (29 persen) dicairkan pada bulan Desember. Secara kuartalan, 56 persen belanja modal, 47 persen belanja barang dan 45 persen belanja subsidi energi dicairkan pada kuartal terakhir tahun 2012.

Secara ringkas, realisasi APBN tahun 2012 menegaskan bahwa tingkat belanja dan pinjaman secara keseluruhan tetap konservatif, dan peningkatan kualitas belanja masih merupakan tantangan

Mungkin hal yang paling menarik perhatian dari realisasi APBN tahun yang lalu adalah besarnya belanja subsidi energi. Rendahnya defisit *headline* menutupi hal ini, sebagian karena belanja modal yang tidak mencapai sasaran – salah satu realisasi yang kurang optimal lainnya – walau pertumbuhan penerimaan PPN dan lebih rendahnya biaya pendanaan dibanding perkiraan, juga turut membantu. Angka-angka anggaran terakhir itu memperkuat keinginan untuk mengarahkan kembali belanja selain untuk subsidi energi. Kemajuan di bidang-bidang lain juga berlanjut, walaupun masih terdapat tantangan, terutama untuk meningkatkan kualitas belanja dari waktu ke waktu (mengurangi penumpukan pada akhir tahun fiskal) dan wilayah (lihat, sebagai contoh, *IEQ* edisi bulan Desember 2012 tentang hasil survei Infrastruktur Pedesaan).

2. Memahami konsep nilai tambah dalam perdagangan di Indonesia

Data perdagangan baru berdasarkan konsep nilai tambah menawarkan perspektif berbeda tentang perdagangan barang dan jasa Indonesia

Pola perdagangan Indonesia menjadi sorotan sejak neraca perdagangan terus mengalami kemerosotan sejak pertengahan tahun 2011. Bagian ini menawarkan sudut pandang baru yang cukup menarik dalam menganalisa data perdagangan internasional, dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh OECD-WTO. Konsep yang ditawarkan adalah penggunaan statistik yang diukur berdasarkan “nilai-tambah” yang dalam analisa lebih lanjut memperlihatkan aspek yang cukup berbeda dari statistik perdagangan bruto yang umumnya digunakan. Lebih dalam, bagian ini mengulas secara singkat tentang data terbaru perdagangan menggunakan nilai-tambah yang dimaksud, mengulas tentang pentingnya peran-serta Indonesia dalam rantai pasokan global, serta akhirnya mencoba memperlihatkan keterkaitan yang cukup kuat antara kinerja ekspor dan impor.

a. Apa yang dapat dipelajari dari perdagangan berdasarkan konsep nilai tambah?

Data perdagangan OECD-WTO yang baru memberikan wawasan baru tentang pola perdagangan luar negeri Indonesia...

Data statistik terbaru dari OECD-WTO tentang perdagangan berdasarkan konsep nilai tambah (TiVA) memberikan wawasan baru tentang pentingnya perdagangan internasional.⁶ Data TiVA menelusuri kontribusi komponen luar negeri dalam ekspor bruto suatu negara, yang menciptakan sebuah perkiraan penghitungan ekspor dalam sebuah terminologi nilai tambah; yaitu mencari tahu nilai barang dan jasa yang terkandung di dalam ekspor dari suatu perekonomian, dengan memperhitungkan barang baku impor dan penambahan jasa yang digunakan.

...dengan mengungkap pentingnya peran ekspor dan impor yang tersembunyi

Pengukuran arus perdagangan berdasarkan nilai tambah menggunakan data TiVA membantu pemahaman atas peran suatu perekonomian di dalam mata rantai pasokan. Sifat dari konsep ini mencoba menghindari kelebihan perhitungan nilai perdagangan yang biasa dijumpai dalam data statistik perdagangan bruto, di mana barang yang sama dilaporkan secara beberapa kali dalam data statistik perdagangan ketika melewati batas-batas negara. Dicontohkan dalam sebuah studi tentang kegiatan produksi Apple iPhone di tahun 2009, bahwa dari keseluruhan total biaya produksi yang dilaporkan, hanya sekitar 6,50 dolar AS (atau 3,6 persen) dari total biaya yang sebenarnya merupakan kegiatan produksi yang dilakukan di dalam Cina. Sementara sebagian besar dari total produksi yang terjadi sebenarnya berasal dari biaya komponen-komponen yang diimpor dari negara lain, seperti dari Jepang (34 persen), Jerman (16 persen) dan Korea Selatan (13 persen).⁷ Namun demikian, nilai penjualan barang yang dilaporkan di dalam ekspor bruto—dalam contoh ini adalah nilai penuh dari Apple iPhone – senilai 178,96 dolar AS, sebagai ekspor Cina. Pengukuran nilai tambah perdagangan dibanding nilai bruto, akan menjelaskan keterkaitan antara ekspor dan impor, sementara ketersediaan bahan baku / setengah jadi (*intermediate goods*) yang berkualitas tinggi merupakan faktor penting lain dalam kinerja ekspor.

b. Produk komoditas menjadi faktor pendorong nilai tambah ekspor Indonesia

Kontribusi nilai tambah domestik dari ekspor terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tidak terlalu besar

Pertumbuhan ekspor berdasarkan nilai tambah domestik diperkirakan hanya mencapai 8 persen dari pertumbuhan PDB riil Indonesia selama satu dekade hingga tahun 2011, yang mencerminkan pertumbuhan yang tidak menonjol pada ekspor Indonesia, walau terdapat peningkatan yang berarti pada harga komoditas selama dekade yang lalu (Gambar 38). Perkiraan dengan menggunakan data TiVA juga menunjukkan bahwa nilai tambah domestik dari ekspor sebagai bagian dari PDB menurun menjadi 21,9 persen pada tahun 2011 dari 28 persen pada tahun 2005, sejalan dengan penurunan ekspor bruto sebagai bagian dari PDB (Gambar 38).

Secara keseluruhan, ekspor Indonesia hanya

Data TiVA tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah ekspor barang bruto Indonesia pada tahun 2009,⁸ hanya 14,3 persen yang mengandung barang *input* dari luar negeri, yaitu

⁶<http://www.oecd.org/industry/industryandglobalisation/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm>

⁷Xing, Y, dan Detert, N 2010, 'How the iPhone widens the United States trade deficit with the People's Republic of China', ADBI Working Paper No. 257, Desember

⁸Data TiVA yang tersedia untuk umum memperhitungkan nilai tambah aliran perdagangan hanya untuk tahun 2005, 2008 dan 2009, dengan ketidaklengkapan data yang mencerminkan tantangan yang dijumpai dalam melakukan perhitungan

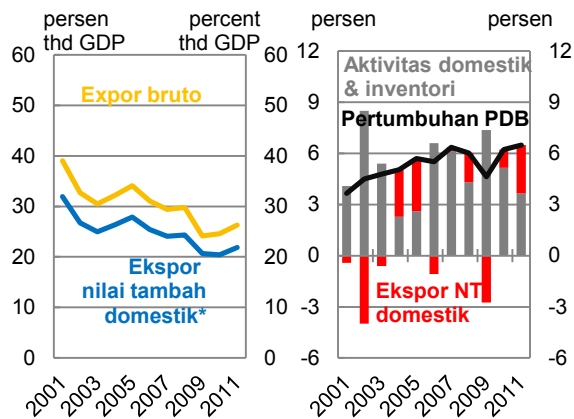
mengandung sebagian kecil nilai tambah yang berasal dari komponen luar negeri

penyertaan bagian asing ke dalam produksi ekspor barang (Gambar 39). Ini berarti bahwa 85,7 persen dari total ekspor barang bruto mengandung nilai tambah dalam negeri yang relatif lebih tinggi dibanding Cina (71 persen), namun lebih rendah dari Brasil (97 persen) (Gambar 39).

Hal ini disebabkan oleh besarnya ekspor sumber daya alam, sementara sebenarnya ekspor manufaktur Indonesia tampaknya cukup terintegrasi dengan baik di dalam mata rantai pasokan global

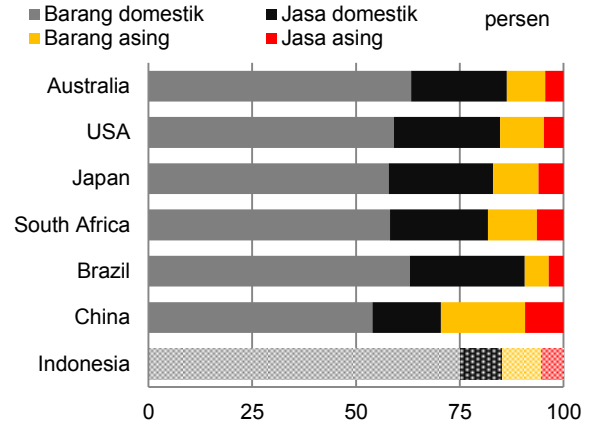
Porsi nilai tambah dalam negeri yang relatif tinggi di dalam ekspor disebabkan oleh dominasi produk berbasis sumber daya alam pada ekspor Indonesia (yang mencapai dua per tiga dari jumlah ekspor bruto). Bila menggunakan pertimbangan yang terpisah, ternyata sektor manufaktur Indonesia dapat dipandang sebagai sektor yang terhubung cukup baik terhadap mata rantai pasokan global (Gambar 40). Sebagai contoh, hampir 40 persen dari nilai ekspor permesinan bruto Indonesia mengandung komponen nilai tambah yang berasal dari luar negeri, yang mencerminkan partisipasi Indonesia di dalam jaringan produksi dunia, terutama dengan Jepang dan Korea. Kandungan asing juga banyak dijumpai dalam ekspor barang elektronik, dan pada ekspor tekstil, pakaian dan alas kaki (TCF) (25 persen). Kandungan komponen asing dalam ekspor bruto Indonesia untuk sejumlah industri bahkan mengalahkan ekspor Cina, terutama untuk produk permesinan (29,7 persen) dan TCF (14,8 persen) (Gambar 41).

Gambar 38: Ekspor berdasarkan nilai-tambah domestik hanya menyumbang 8 persen dari pertumbuhan Indonesia dalam dekade terakhir hingga tahun 2011 (pertumbuhan dan porsi dari PDB, persen)



Catatan: *menggambarkan ekspor nilai tambah barang dan jasa
Sumber: Statistik OECD-WTO TiVA; Database CEIC dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 39: Ekspor barang dagangan bruto Indonesia menunjukkan kandungan nilai tambah dalam negeri yang tinggi dan jasa yang rendah (porsi dari jumlah ekspor bruto, tahun 2009, persen)

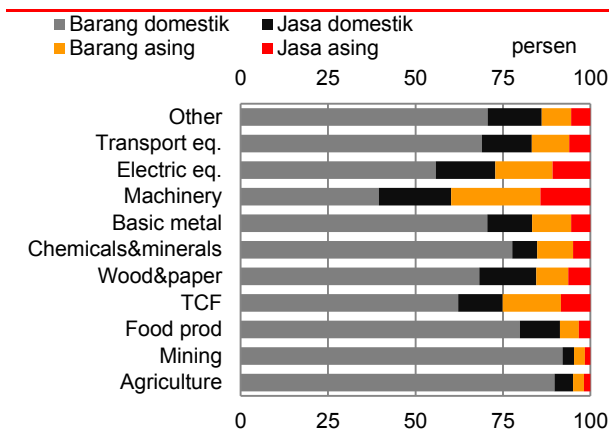


Sumber: Statistik OECD-WTO TiVA; Perhitungan staf Bank Dunia

Hanya sedikit penambahan jasa kepada ekspor barang dagangan Indonesia

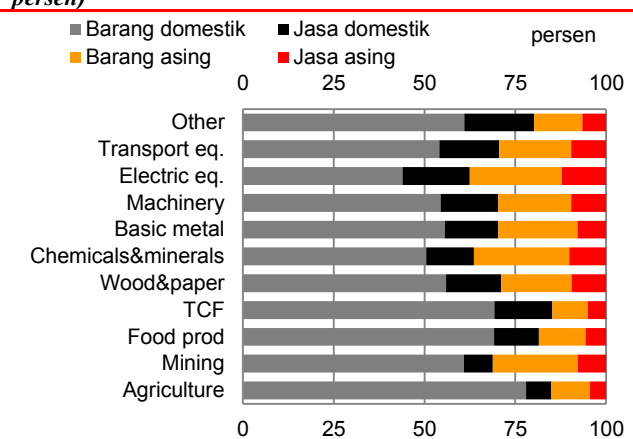
Produk dengan teknologi dan proses produksi yang lebih maju umumnya berkaitan dengan besarnya bagian jasa perdagangan di dalam jumlah nilai tambah ekspor. Dalam hal ini, agar produk-produk berteknologi tinggi dapat bersaing, ekspor harus didukung oleh penunjang jasa yang memadai, seperti jasa penunjang di bidang keuangan-asuransi, transportasi-logistik, penelitian dan pengembangan (litbang) dan jasa-jasa lainnya. Hal yang menarik dari statistik TiVA adalah porsi jasa yang relatif rendah di dalam nilai tambah perdagangan Indonesia (Gambar 39). Tampaknya hal ini mencerminkan terbatasnya jumlah barang-barang manufaktur dengan teknologi tinggi yang diekspor oleh Indonesia, dan juga dapat berasal dari kurangnya akses pihak eksportir kepada jasa masukan (*input*) berkualitas tinggi. Hal ini juga turut menjelaskan masih lemahnya kinerja ekspor manufaktur Indonesia dibanding negara tetangganya.

Gambar 40: Porsi nilai tambah asing dalam sejumlah ekspor produk manufaktur Indonesia cukup besar... (porsi terhadap total ekspor bruto di tiap jenis industri, 2009, persen)



Sumber: Statistik OECD-WTO TiVA; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 41: ...sementara ekspor Cina mengandung lebih banyak masukan impor dibanding Indonesia, kecuali untuk permesinan dan TCF (porsi terhadap total ekspor bruto di tiap jenis industri, 2009, persen)



Sumber: Statistik OECD-WTO TiVA; Perhitungan staf Bank Dunia

c. Bahan baku impor semakin banyak digunakan untuk produksi dalam negeri

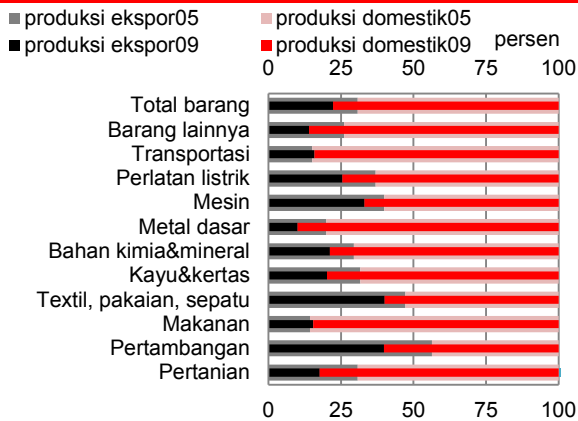
Jumlah impor bahan baku yang cukup besar ditujukan kepada hasil produksi manufaktur untuk diekspor kembali

Hal lain yang menarik untuk diamati dari data ini adalah peran penting dari impor bahan baku / setengah yang besarnya merupakan sepertiga dari total impor (Kotak 4). Sekitar dua per tiga dari impor bahan baku digunakan untuk produksi dalam negeri (Gambar 42). Sementara sisanya, sekitar sepertiga dari total impor bahan baku , digunakan untuk diekspor kembali—dalam hal ini merupakan sesuatu yang terkandung dalam produk final yang kemudian diekspor. Dengan demikian impor bahan baku setengah jadi mendukung manufaktur baik untuk digunakan di pasar dalam negeri maupun untuk produksi untuk tujuan ekspor.

Porsi bahan setengah jadi sebagai input manufaktur untuk ekspor tercatat lebih rendah pada tahun 2009 dibanding tahun 2005

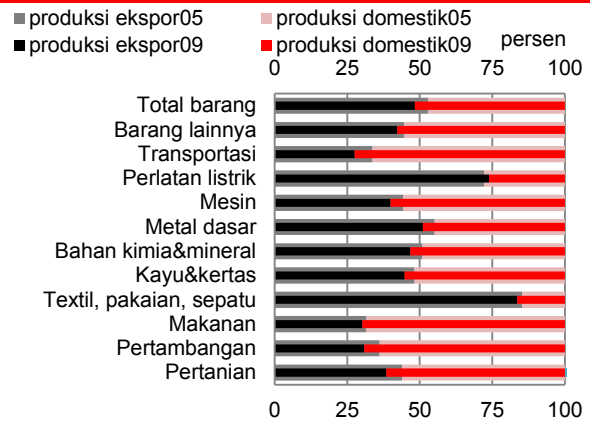
Perubahan yang menarik terlihat dengan membandingkan data TiVA tahun 2005 dengan 2009. Bagi Indonesia, proporsi impor bahan baku yang ditujukan untuk ekspor, walau berjumlah signifikan seperti dilaporkan di atas, ternyata lebih rendah di tahun 2009 dibanding tahun 2005 (Gambar 42, bandingkan grafik batang abu-abu untuk impor yang diekspor kembali pada tahun 2005 dengan grafik batang yang hitam untuk tahun 2009). Sebagai pembandingnya adalah Cina, di mana bagian impor bahan baku yang digunakan untuk produksi bagi penggunaan dalam negeri dan ekspor hanya sedikit menurun antara tahun 2005 dan 2009 (Gambar 43). Hal ini mencerminkan dampak sementara dari krisis keuangan dunia. Namun hal itu juga dapat menunjukkan tren kebutuhan impor bahan setengah jadi sebagai input untuk manufaktur di pasar dalam negeri yang meningkat lebih cepat dibanding bahan yang sama untuk kepentingan pasar ekspor. Dibutuhkan data-data yang lebih baru untuk lebih memahami tren apapun tentang arah impor bahan baku.

Gambar 42: Impor barang dagang setengah jadi Indonesia mendukung produksi domestik dan bertujuan ekspor... (alokasi impor bahan setengah jadi, persen, 2005 dan 2009)



Sumber: Statistik OECD-WTO TIVA; Perhitungan staf Bank Dunia.

Gambar 43: ...sementara di Cina, bagian impor produk setengah jadi yang diekspor kembali berjumlah lebih besar (alokasi impor bahan setengah jadi, 2005 dan 2009)



Sumber: Statistik OECD-WTO TIVA; Perhitungan staf Bank Dunia.

d. Integrasi dengan rantai pasokan internasional dapat membantu diversifikasi ekspor

Impor berkontribusi secara signifikan kepada pertumbuhan nilai ekspor Indonesia, dan terdapat ruang yang signifikan untuk memperluas peran sektor jasa

Data perdagangan berdasarkan nilai tambah menawarkan penyegaran dalam menganalisa pola perdagangan Indonesia. Data itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan, porsi nilai tambah dalam negeri di dalam total ekspor Indonesia mencapai nilai yang tinggi, yang mencerminkan porsi yang besar dari komoditas yang diekstrak di dalam negeri di dalam ekspor. Dalam penelusuran lebih lanjut, nilai tambah asing ternyata mempunyai porsi yang signifikan pada segmen ekspor tertentu, terutama di dalam sektor industri tekstil, pakaian, sepatu, permesinan dan peralatan listrik. Pentingnya impor bahan masukan bagi produksi ekspor adalah sekitar sepertiga dari impor bahan baku digunakan untuk pertumbuhan nilai ekspor. Keadaan dunia perdagangan Indonesia ini menunjukkan kaitan yang kuat antara kinerja ekspor dan impor. Hal ini berarti bahwa pembatasan impor akan membawa konsekuensi yang tidak dikehendaki yang dapat merintangikan ekspor. Ulasan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk memperdalam integrasinya dengan rantai pasokan global, serta kuatnya keterkaitan antara kinerja ekspor dan impor. Ini mempunyai arti bahwa pembatasan terhadap impor dapat berkonsekuensi terhadap pelemahan yang tidak dikehendaki di sisi ekspor. Data yang ada juga menunjukkan ruang yang masih terbuka bagi Indonesia untuk memperdalam keterkaitannya dengan rantai pasokan internasional dengan mengakomodir lebih banyak komponen nilai tambah asing dalam barang dan jasa yang diekspor oleh Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Cina dalam pola perdagangannya, yang menunjukkan kebergantungan yang lebih besar terhadap bahan masukan impor dibanding Indonesia. Secara lebih khusus juga ditunjukkan bahwa nilai tambah jasa dalam ekspor Indonesia sangatlah rendah, baik itu yang berupa komponen domestik maupun asing. Hal ini mencerminkan perkembangan sektor jasa penunjang ekspor yang relatif terbatas serta menunjukkan rendahnya penggunaan jasa ekspor yang ditawarkan oleh pihak asing kepada para eksportir Indonesia. Dukungan atas pengembangan jasa-jasa itu tampaknya akan membantu kinerja ekspor secara keseluruhan dan membantu diversifikasi ekspor untuk tidak hanya terfokus kepada produk komoditas.

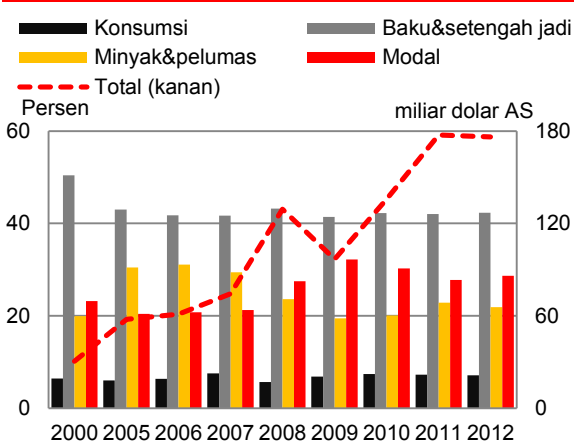
Kotak 4: Perubahan komposisi impor Indonesia: pertumbuhan impor barang modal dan peningkatan peran Asia

Komposisi impor Indonesia menurut kelompok fungsi yang luas hanya mengalami sedikit perubahan sejak tahun 2000, dengan bahan bakar dan pelumas sebagai pengecualian (umumnya disebabkan oleh gejolak harga), dan barang-barang modal. Dari tahun 2007 hingga 2009 terdapat peningkatan signifikan dalam barang modal sebagai bagian dari jumlah impor (Gambar 44). Karenanya, barang modal merupakan 29,3 persen dari jumlah impor per tahun dari tahun 2008-12, meningkat dari rata-rata sebesar 21,4 persen pada tahun 2001-07. Impor “permesinan” dan “mesin listrik” mendorong sebagian besar peningkatan bagian barang modal pada jumlah impor dari tahun 2005 hingga 2011, terutama alat dan suku cadang elektronika umum, produk dan suku cadang yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi, mesin-mesin berat, dan generator (Tabel 5a).

Peningkatan peran penting barang modal telah membawa impor Indonesia menjadi lebih tergantung pada Cina dan Ekonomi Industri Baru (*Newly Industrialized Economies/NIE*), dibanding negara lainnya, atas konsekuensi penurunan ketergantungan terhadap Jepang dan Uni Eropa (Tabel 5b). Impor barang modal dari Cina mencapai 7,2 persen dari jumlah impor pada tahun 2011, naik 4,6 poin persentase dari tahun 2005 (selama periode yang sama impor barang modal dari NIE meningkat sebesar 2,3 poin persentase menjadi 5 persen dari jumlah impor).

Kuatnya permintaan bagi impor barang modal juga berlangsung dalam waktu yang sama dengan peningkatan penanaman modal asing langsung (FDI) sejak tahun 2008, dengan aliran masuk FDI tahunan selama periode 2008-11 meningkat menjadi 15,3 miliar dolar AS dari rata-rata sebesar 6 miliar dolar AS pada tahun 2001-07. Peningkatan FDI terjadi pada sektor-sektor yang lebih banyak menarik impor, seperti telekomunikasi, manufaktur mesin, dan sektor elektronika dan pertambangan. Sementara dibutuhkan lebih banyak analisis untuk mengetahui gambaran yang tepat atas keterkaitannya. Peningkatan aliran masuk FDI di Indonesia tampaknya merupakan salah satu pendorong permintaan bagi impor barang modal, terutama permesinan dan peralatan. Di saat yang bersamaan investasi padat modal untuk kepentingan dalam negeri seperti pesawat terbang penumpang, alat-alat berat untuk kegiatan pertambangan dan permesinan untuk pembangkit listrik baru juga meningkat.

Gambar 44: Impor barang-barang modal meningkat sebagai bagian total impor Indonesia (bagian jumlah impor, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 5: Barang modal dan peningkatan peran Cina dan NIE di dalam impor Indonesia

a. Pola impor Indonesia sesuai asalnya pada tahun 2011 (bagian jumlah impor dan kategori per negara/wilayah, persen)

Produk impor	Sub-kategori	Impor dari:							
		China	ASEAN3	NIEs	Japan	EU25	USA	RoW	World
Barang konsumsi	Bukan makanan	1.0	1.1	0.6	0.5	0.4	0.1	0.3	4.0
	Makanan	0.6	0.7	0.1	0.0	0.1	0.2	1.5	3.3
Baku & setengah jadi	Bukan makanan	5.7	3.7	6.1	3.6	2.3	2.0	10.9	34.3
	Makanan	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	1.0	2.3	4.2
Minyak & pelumas		0.4	2.7	11.8	0.1	0.1	0.1	7.9	23.1
Barang modal	Permesinan & mesin elektronik	6.4	2.1	4.2	4.1	3.0	1.2	2.1	23.1
	Transportasi	0.8	1.4	0.8	1.8	1.0	1.6	0.8	8.1
Total impor		15.0	12.3	23.6	10.1	7.1	6.2	25.8	100

b. Perbandingan pola impor Indonesia sesuai asalnya pada tahun 2005 dan 2011 (perubahan dari tahun 2005, poin persen)

Produk impor	Sub-kategori	Impor dari:							
		China	ASEAN3	NIEs	Japan	EU25	USA	RoW	World
Barang konsumsi	Bukan makanan	↔ 0.3	↔ -0.2	↔ 0.2	↔ 0.1	↔ -0.1	↔ 0.0	↔ 0.1	↔ 0.5
	Makanan	↔ 0.2	↔ -0.1	↔ -0.1	↔ 0.0	↔ -0.2	↔ 0.0	↔ 0.8	↔ 0.6
Baku & setengah jadi	Bukan makanan	↔ 1.4	↔ 0.5	↔ 0.9	↔ -0.6	↔ -1.6	↔ -0.6	↔ 0.5	↔ 0.7
	Makanan	↔ 0.0	↔ 0.3	↔ 0.0	↔ 0.0	↔ 0.0	↔ 0.3	↔ -0.1	↔ 0.4
Minyak & pelumas		↘ -1.8	↘ 0.7	↘ -1.6	↔ 0.0	↔ 0.0	↘ -0.2	↘ -4.7	↘ -7.6
Barang modal	Permesinan & mesin elektronik	↗ 4.2	↔ 0.7	↗ 2.2	↔ 0.0	↘ -1.5	↘ -0.6	↔ 0.4	↗ 5.4
	Transportasi	↔ 0.4	↔ 0.1	↔ 0.1	↘ -1.4	↔ 0.3	↔ 0.4	↔ 0.1	↔ 0.0
Total impor		↗ 4.8	↗ 2.0	↗ 1.6	↘ -1.9	↘ -3.1	↘ -0.6	↘ -2.8	

Catatan: Perbandingan bagian barang impor pada tahun 2011 ke 2005. Angka-angka pada bagian b menunjukkan bagian tahun 2011 – bagian tahun 2005

Sumber: COMTRADE melalui WITS; Perhitungan staf Bank Dunia

C. INDONESIA TAHUN 2014 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN



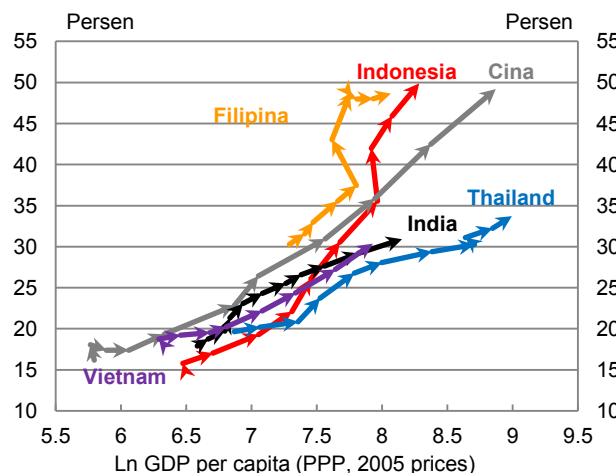
1. Mempersiapkan masa depan perkotaan Indonesia: mengelola dan mengarahkan ekonomi

a. Kota sebagai masa depan Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang mencatat proses urbanisasi yang tercepat di Asia dan bentuknya akan ditentukan oleh masa depan dari kota-kotanya

Seperti ekonomi-ekonomi lain yang berkembang pesat, Indonesia juga mengalami urbanisasi. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduknya (51 persen) tinggal di daerah perkotaan. Laju urbanisasi yang pesat itu terus berlanjut; pada tahun 2025 diperkirakan 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan. Dengan rata-rata laju urbanisasi tahunan diperkirakan mencapai 4,2 persen antara tahun 1993 dan 2007, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami proses urbanisasi yang paling cepat di Asia (Gambar 45).

Gambar 45: Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami urbanisasi yang tercepat di Asia (laju urbanisasi PDB per kapita, persen)



Catatan: Data Vietnam dari 1970 ke 2010
Sumber: UN Population Division (2012), World Urbanization Prospects: The 2011 Revision; Penn World Tables

Data statistik itu menunjukkan cerita yang mengagumkan tentang transisi struktural, dengan pergeseran Indonesia dari negara dengan dominasi ekonomi pertanian dan pedesaan menjadi ekonomi perkotaan yang berlandaskan kepada manufaktur dan jasa. Sejalan dengan pergeseran tempat tinggal sebagian besar penduduknya ke daerah perkotaan, kebanyakan nilai tambah ekonomi di Indonesia juga berlangsung di daerah-daerah perkotaan. Pada tahun 2010, sekitar 74 persen dari PDB dihasilkan di kota-kota, suatu proporsi yang akan semakin meningkat mengikuti kemajuan urbanisasi. Kenyataan ini menunjuk kepada masa depan pembangunan Indonesia: Indonesia pada saat ini adalah, dan akan semakin menjadi, negara yang dibentuk oleh kota-kotanya. Bagaimana penyusunan kebijakan pusat dan daerah menghadapi tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang diakibatkan oleh urbanisasi akan menjadi faktor penentu utama bagi Indonesia untuk melaju menuju pertumbuhan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Bagian ini membahas kesempatan dan tantangan yang timbul karena

urbanisasi di Indonesia, dengan penekanan pada pemanfaatan potensi aglomerasi atau pengelompokan ekonomi.⁹

b. Aglomerasi perkotaan membawa manfaat dan tantangan

Pembentukan pengelompokan ekonomi meningkatkan produktivitas

Bagaimana wujud urbanisasi pada pertumbuhan ekonomi? Urbanisasi dikaitkan dengan peningkatan pada *output* dan produktivitas yang secara normal merupakan hasil dari pembentukan pengelompokan ekonomi perkotaan. Hal ini merujuk kepada peningkatan produktivitas yang berkaitan dengan lebih besarnya dasar ekonomi secara umum—yang umum disebut sebagai “ekonomi urbanisasi” — dan peningkatan dalam kegiatan ekonomi di dalam sektor-sektor industri tertentu—umumnya dikenal sebagai “ekonomi terlokalisasi”.

Pengelompokan ekonomi memperoleh manfaat dari kedekatan dengan industri dan input yang sejenis

Pengelompokan ekonomi bekerja dalam sejumlah cara. Peningkatan konsentrasi populasi memang membawa tantangan, tetapi hal itu juga memudahkan pemberian layanan-layanan yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan lebih efisien. Lapangan kerja lebih mudah didapat di kota-kota. Pengelompokan industri memungkinkan pemakaian infrastruktur secara bersama-sama, yang menurunkan biaya, dan kedekatan berbagai kontributor rantai nilai juga membantu meringkas proses produksi. Perusahaan-perusahaan baru yang terletak pada daerah yang terpusat mendapatkan akses terhadap pemusatan tenaga kerja terampil yang sudah terbentuk disekitar daerah tersebut.

Lembah Silikon adalah pengelompokan yang membentuk pusat industri perangkat lunak Amerika

Contoh yang jelas akan kekuatan pengelompokan adalah pada daerah Lembah Silikon (Silicon Valley) di Amerika Serikat. Secara umum orang mengira bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak, yang tidak membutuhkan sumber daya alam khusus dan terhubung secara global melalui *internet*, tidak perlu berada di suatu tempat khusus yang sama. Namun karena infrastruktur yang dapat digunakan bersama, akses terhadap pemusatan keterampilan dalam bidang yang sama, lokasi yang dekat dengan universitas-universitas terbaik, kualitas hidup, dan suasana yang mendorong persaingan yang kompetitif, daerah di California bagian utara ini telah berkembang menjadi pusat industri perangkat lunak Amerika yang tidak terbantahkan.

Indonesia dapat memetik manfaat dari pengaruh pengelompokan seperti luapan pengetahuan sejalan dengan pergeseran menuju ekonomi berbasis jasa dan pengetahuan

Dengan bergesernya Indonesia menuju industri jasa dan pengetahuan, sejumlah pengaruh pengelompokan yang lebih tidak berwujud akan menjadi penting, seperti “luapan” pengetahuan antar perusahaan. Pengelompokan akan mendorong persaingan, yang pada gilirannya memacu inovasi. Untuk menjadi kompetitif secara global, perusahaan-perusahaan harus terletak pada tempat yang memberikan kualitas hidup dan konektivitas yang dicari oleh para pekerja dengan tingkat keterampilan yang tinggi, yang paling mudah dijumpai pada pusat-pusat kota yang sudah mapan. Manfaat ekonomi dari kedekatan letak dan kepadatan yang diberikan oleh pengelompokan akan mendorong produktivitas yang lebih besar.

Agglomerasi adalah daerah metropolitan pusat perkotaan dan daerah-daerah sekitar yang terhubung secara ekonomi

Daerah-daerah aglomerasi adalah daerah-daerah metropolitan dengan batas fungsional, yang terdiri dari sebuah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial dan daerah-daerah sekelilingnya yang memenuhi kriteria tingkat kepadatan populasi dan konektivitas minimum dalam hubungannya terhadap pusat perkotaan tersebut. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia menetapkan sembilan daerah metropolitan sebagai prioritas nasional (daerah metropolitan Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado dan Balikpapan-Samarinda) melalui Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁹ Bagian ini menyoroti manfaat dan tantangan potensial akibat dari daerah aglomerasi di Indonesia dan mengambil dari laporan Bank Dunia (2012), “Indonesia: The Rise of Metropolitan Regions”. Untuk informasi lebih lengkap tentang geografis ekonomi Indonesia dan tiang pertumbuhan yang muncul, lihat laporan IEQ edisi September 2010.

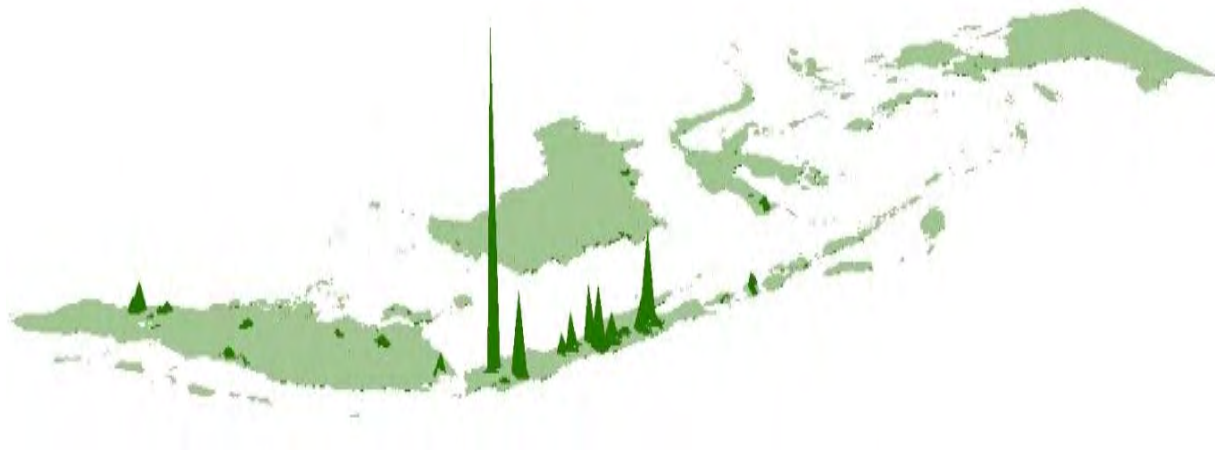
Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terbatas kepada sembilan daerah metropolitan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional...

Sementara daerah-daerah metropolitan itu telah lama memantapkan dirinya sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial di wilayahnya masing-masing, diperkirakan masih ada pusat-pusat pertumbuhan lain di luar daerah metropolitan tersebut. Tinjauan singkat atas angka-angka pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi menunjukkan pertumbuhan yang pesat yang juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Indonesia, termasuk pada provinsi yang tidak mendapatkan penetapan daerah metropolitan. Dengan demikian perlu diselidiki di mana terletak pusat-pusat ekonomi yang berada di luar sembilan daerah metropolitan yang ditetapkan secara resmi tersebut.

...dan terdapat daerah-daerah aglomerasi lain yang telah diketahui di seluruh Indonesia

Metode Indeks Aglomerasi (AI) mendefinisikan aglomerasi berdasarkan ukuran pusat perkotaan, kepadatan penduduk, dan jarak suatu daerah ke pusat perkotaan.¹⁰ Dengan menggunakan metode ini sesuai dengan keadaan di Indonesia, penelitian terbaru oleh Bank Dunia Indonesia menemukan bahwa aglomerasi sebetulnya terbentuk juga di tempat-tempat lain selain sembilan daerah metropolitan resmi tersebut. Aglomerasi itu mungkin berukuran lebih kecil dari daerah metropolitan yang resmi, tetapi mereka juga berfungsi sebagai pusat-pusat ekonomi di wilayahnya masing-masing, menarik angkatan kerja untuk bekerja di kota-kota utama karena alasan ekonomi, dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup besar. Gambar 46 menunjukkan lokasi daerah aglomerasi dan ukurannya menurut kepadatan penduduk, yang menegaskan bahwa terdapat daerah-daerah aglomerasi di seluruh pulau-pulau utama di Indonesia, termasuk di Papua. Peta ini juga menunjukkan bahwa berlawanan dengan pendapat umum, Jawa bukanlah suatu kota daerah perkotaan yang besar, karena masih ada sejumlah daerah di Jawa yang bukan merupakan bagian dari daerah aglomerasi manapun.

Gambar 46: Terdapat daerah-daerah aglomerasi penting yang padat penduduk di seluruh Indonesia (daerah aglomerasi dan kepadatan penduduk, tahun 2007)



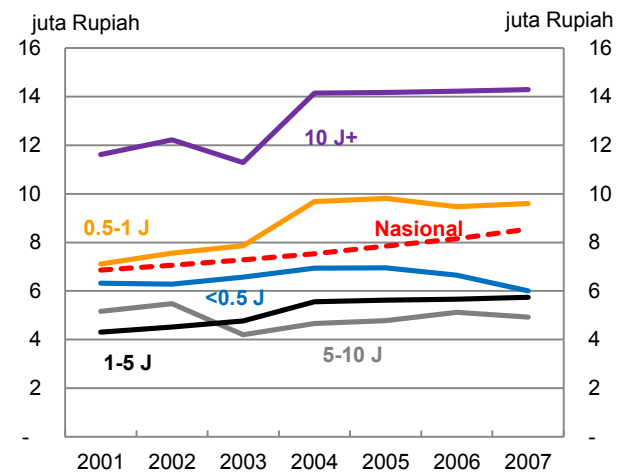
Catatan: warna yang gelap menunjukkan lokasi aglomerasi dan ujung runcing menunjukkan ukuran populasi
Sumber: "Indonesia: The Rise of Metropolitan Regions", Bank Dunia (2012)

¹⁰ Uchida, H. and Nelson, A., 2008, "Agglomeration index: towards a new measure of urban concentration."

Sejumlah daerah aglomerasi berkembang dengan baik, sementara yang lain tertinggal

Manfaat aglomerasi ekonomi lebih dirasakan oleh sejumlah daerah aglomerasi di Indonesia, tetapi tidak oleh yang lain. Dengan meningkatnya ukuran populasi aglomerasi, terdapat perkiraan bahwa produk domestik bruto daerah (PDRB) per kapitanya juga turut meningkat – suatu indikator peningkatan produktivitas karena aglomerasi ekonomi. Kota-kota besar dengan jumlah penduduk di atas 10 juta jiwa adalah kota-kota dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia (Gambar 47). Namun kelompok dengan besar ukuran berikutnya, aglomerasi dengan tingkat penduduk antara 1 hingga 10 juta jiwa, mencatat prestasi yang kurang cemerlang, dengan PDRB per kapita yang selalu bertahan di bawah tingkat nasional. Aglomerasi yang lebih kecil (dengan penduduk 0,5 hingga 1 juta jiwa) mencatat hasil yang lebih baik, dengan tingkat pendapatan yang hanya dibelakang pendapatan dari kota-kota besar.

Gambar 47: Kota-kota besar dan pusat aglomerasi yang lebih kecil berkembang baik, tidak seperti aglomerasi berukuran menengah
(PDB riil per kapita menurut ukuran aglomerasi, tahun 2001-2007, dalam harga konstan Rupiah tahun 2000)



Catatan: J berarti ukuran populasi dalam juta
Sumber: "Indonesia: The Rise of Metropolitan Regions". Bank Dunia (2012); BPS

Ukuran bukanlah faktor utama dalam penentuan produktivitas dari suatu aglomerasi

Bagi aglomerasi ekonomi, ukuran bukanlah faktor yang terpenting, karena tidak terdapat korelasi antara jumlah populasi dengan produktivitas ekonomi. Karenanya, aglomerasi populasi saja tidaklah cukup untuk mendorong produktivitas, dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi – seperti lemahnya infrastruktur, buruknya akses pasar, susunan tata ruang yang kurang efisien, besarnya kegiatan ekonomi dengan sedikit penambahan nilai dan iklim usaha yang tidak mendukung. Seluruh hal itu merintangai pertumbuhan dan inovasi usaha.

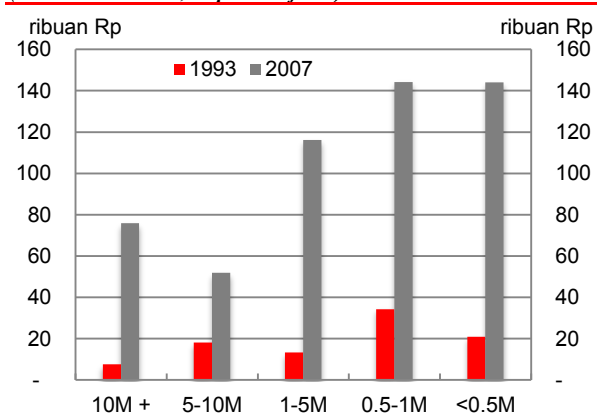
Rendahnya akses terhadap infrastruktur dapat membawa pengaruh negatif terhadap produktivitas

Seperti disinggung pada bagian lain pada IEQ edisi ini, akses terhadap infrastruktur dasar masih tetap menjadi tantangan utama. Untuk periode tahun 2001 - 2008, investasi modal untuk infrastruktur pada tingkat pemerintah daerah mencatat tingkat rata-rata sebesar 2 persen dari PDRB, yang tidak cukup untuk mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi dan populasi pada daerah-daerah perkotaan. Tanpa infrastruktur yang memadai, dunia usaha seringkali terpaksa harus mengeluarkan investasi untuk mengadakan infrastruktur itu sendiri, umumnya dengan biaya yang lebih tinggi dibanding dengan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Lemahnya infrastruktur dapat membawa pengaruh negatif kepada produktivitas rumah tangga karena mereka terpaksa mengadakan layanan, seperti air bersih, atau menanggung waktu perjalanan pulang-pergi kerja yang panjang karena terbatasnya fasilitas perumahan yang berdekatan dengan tempat kerja dan jaringan transportasi umum.

Investasi modal pada infrastruktur sangatlah penting, dan juga peningkatan dalam efisiensi investasi

Tingkat belanja infrastruktur berbeda ditandai dengan ukuran aglomerasi yang berbeda (Gambar 48). Kelompok aglomerasi dengan PDRB per kapita yang paling rendah – aglomerasi dengan penduduk 5 hingga 10 juta jiwa – melakukan investasi di bidang infrastrukturnya yang lebih rendah dibanding kelompok berukuran lain. Namun aglomerasi berukuran 1 hingga 5 juta jiwa perlu meningkatkan efisiensi belanja modalnya, karena belanja per kapita mereka yang tinggi tidak berwujud kepada produktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Gambar 48: Belanja per kapita untuk infrastruktur berbeda-beda lintas ukuran aglomerasi (tahun 1993 – 2007, Rupiah berjalan)



Catatan: M menunjukkan ukuran populasi dalam juta
Sumber: "Indonesia: The Rise of Metropolitan Regions", Bank Dunia (2012)

Akses terhadap infrastruktur dasar di Indonesia lebih rendah dari negara tetangganya

Akses Indonesia kepada infrastruktur dasar lebih rendah secara signifikan dibanding negara-negara tetangganya, sebagaimana disoroti dalam IEQ edisi sebelumnya. Pada tahun 2009, hanya 50 persen dari penduduk perkotaan memiliki akses terhadap air bersih. Sistem pembuangan limbah air hanya terdapat pada 11 kota, yang memberikan akses terhadap sistem sanitasi tersentralisasi hanya pada 2 persen populasi yang hidup di perkotaan. Secara rata-rata, kepadatan jalan di Indonesia sebesar 1,5 km per 1.000 jiwa adalah setara dengan rata-rata kepadatan jalan regional; namun kualitas infrastruktur jalan lebih rendah dibanding Malaysia dan Thailand. Untuk tenaga listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat bahwa pada tahun 2010 hanya 66,5 persen dari rumah tangga di seluruh Indonesia memiliki akses resmi kepada sambungan listrik PLN.

Selain infrastruktur dasar perkotaan, pembangunan perumahan juga dibutuhkan untuk mendukung urbanisasi

Selain investasi pada infrastruktur dasar perkotaan seperti jalan-jalan, air bersih, sanitasi dan drainase, terdapat bidang lain yang membutuhkan perhatian di Indonesia untuk meningkatkan taraf pemanfaatan ekonominya dari urbanisasi. Indonesia mengalami urbanisasi yang cepat, dengan penduduk usia muda yang membutuhkan perumahan. Sejauh ini sebagian besar kebutuhan akan perumahan di Indonesia (sekitar 80 persen) dipenuhi dengan perumahan yang dibangun dan diperluas sendiri. Hal ini tampaknya akan terus berlanjut. Namun keterjangkauan harga perumahan tampaknya semakin menurun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Keterbatasan ini seringkali berkaitan dengan akses terhadap tanah dan pendanaan. Sementara terdapat berbagai perkiraan akan defisit perumahan di Indonesia, semuanya menunjukkan tumpukan pasokan yang masih harus dibangun (*backlog*) yang berukuran signifikan. Satu metode analisis untuk periode tahun 2001-2007 memperkirakan jumlah defisit sebesar 1,7 juta rumah, dan memperkirakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, jumlah rumah yang harus dibangun per tahun setidaknya mencapai antara 600.000 dan 900.000 rumah. Jumlah itu semakin meningkat sejalan dengan laju urbanisasi, dengan perkiraan kebutuhan rumah sebesar 700.000 hingga 1 juta rumah per tahun untuk periode tahun 2014 hingga 2021.

Menjawab tantangan perumahan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat

Tantangan perumahan ini membutuhkan pendekatan dengan banyak sisi. Unsur-unsur utama dari strategi nasional harus melibatkan reformasi kebijakan pertanahan dan peraturan perizinan; peningkatan akses kepada, dan penargetan dari, pembiayaan dan subsidi perumahan; perluasan keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas di dalam bidang perumahan; koordinasi pengaturan kelembagaan; dan pemberdayaan sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan.

Perkembangan tata ruang perkotaan belakangan ini mengarah ke luar

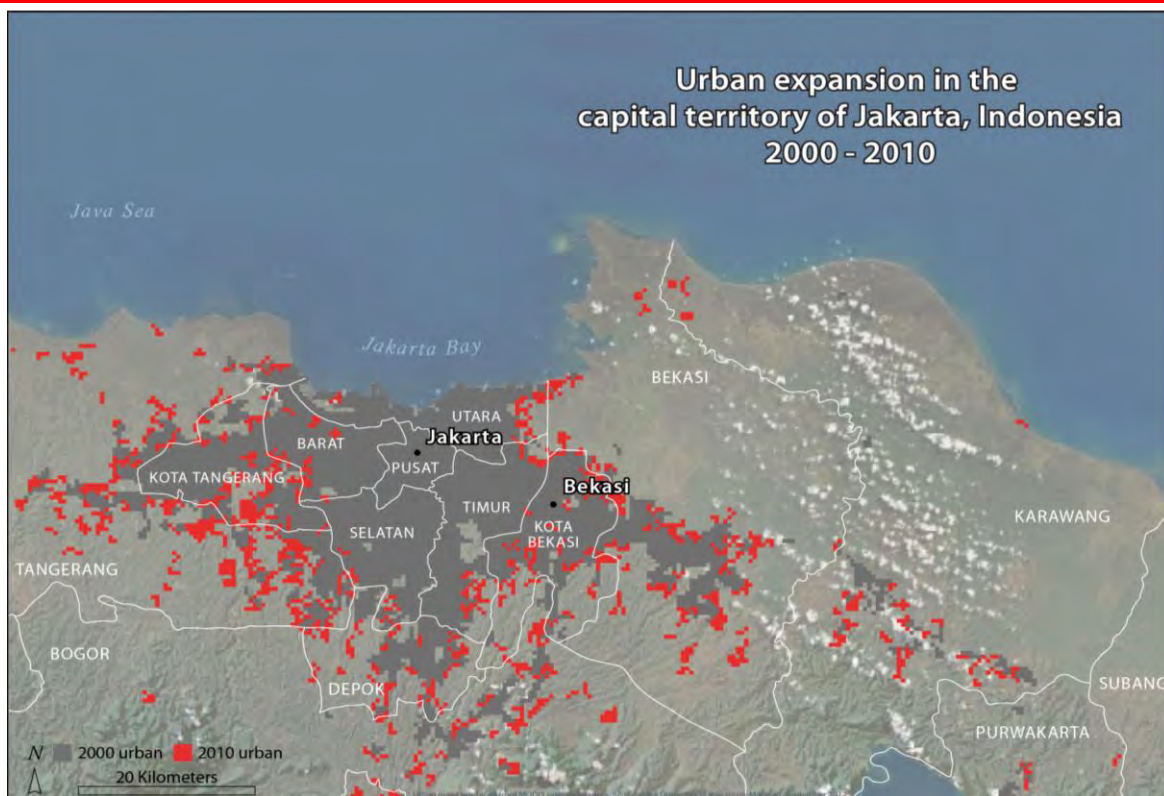
Kurangnya perumahan yang terjangkau, mahalnya harga tanah di kota-kota utama dan peraturan pertanahan yang tidak efisien telah menjadi alasan peningkatan pertumbuhan tata ruang kota yang kurang optimal. Antara tahun 1996 dan 2007, 84 persen pertumbuhan populasi pada 21 daerah metropolitan terbesar terjadi pada daerah perumahan satelit. Tren-tren pada pengelolaan tanah perkotaan, perubahan populasi dan

kepadatan penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan fungsi tanah terjadi di daerah perumahan pinggiran kota. Dengan sedikit pengecualian, daerah metropolitan umumnya telah meluas (*sprawl*), karena para pengembang *real estate* dan dunia usaha menemukan bahwa ternyata lebih mudah, lebih hemat dan lebih cepat untuk membangun proyek-proyek di daerah yang jauh dari pusat kota. Karenanya mereka mendorong kepadatan penduduk perkotaan keluar dari kota. Data tentang penggunaan lahan perkotaan dan populasi, ketika digabungkan untuk PDRB daerah, secara jelas menunjukkan korelasi yang kuat dan positif antara kepadatan ekonomi (PDRB daerah/lahan perkotaan) dan produktivitas (PDRB daerah per kapita). Karenanya, kota-kota tidak hanya mencatat tingkat layanan yang menurun dengan penambahan ukuran luasnya, mereka juga menjadi semakin tidak produktif.

Sebagai contoh, tingkat pembangunan di metropolitan Jakarta berlangsung dua kali lebih cepat di daerah pinggiran kota dibanding di tengah kota

Daerah metropolitan Jakarta adalah contoh dari perluasan daerah perkotaan ini, seperti terlihat pada analisis pencitraan satelit. Gambar 49 di bawah menunjukkan perkiraan daerah di Jakarta pada tahun 2000, dengan warna abu-abu. Daerah perkotaan yang berkembang pada periode tahun 2000 hingga 2010 ditunjukkan dengan warna merah. Gambar ini menunjukkan bahwa sekitar dua kali lipat daerah metropolitan Jakarta sesungguhnya terletak di luar batas administrasi DKI Jakarta (1.100 km persegi pada tahun 2010) seperti di dalam batas tersebut (560 km persegi pada tahun 2010). Lebih penting lagi, sementara daerah di dalam DKI Jakarta hanya meningkat rata-rata sebesar satu persen per tahun, daerah metropolitan disekelilingnya bertumbuh sebesar empat persen, dengan sejumlah daerah seperti Bogor dan Tangerang mencatat pertumbuhan sebesar lima atau enam persen setiap tahunnya.

Gambar 49: Daerah perkotaan Jakarta telah meningkat pesat antara tahun 2000 dan 2010



Sumber: A. Schneider, Universitas Wisconsin, di laporan World Bank, East Asia Flagship (2013, yang akan datang)

Pelebaran yang terjadi di kota-kota di Indonesia berpotensi untuk memperburuk masalah perkotaan yang ada

Jika diamati secara sekilas, pelebaran yang terjadi di kota-kota di Indonesia tampaknya bukan merupakan masalah. Sering kali diperkirakan bahwa konsentrasi kegiatan perkotaan yang tinggi akan menyebabkan kepadatan lalu lintas, bahwa lebih baik jika pusat kegiatan perkotaan terletak menyebar sehingga dapat menurunkan kepadatan lalu lintas, yang akan menurunkan polusi dan meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini adalah asumsi yang keliru yang dibuat oleh banyak kota di seluruh dunia, yang seringkali

semakin memperburuk masalah. Kenyataannya, penurunan konsentrasi kegiatan perkotaan akan mengharuskan penduduk untuk menggunakan kendaraan bagi kebutuhan yang paling dasar sekalipun, seperti membeli bahan makanan atau pergi ke sekolah, dan semakin jauh tujuannya maka waktu yang dibutuhkan akan semakin besar pula. Sehingga bentuk perkotaan yang meluas akan mendorong semakin tingginya jumlah kendaraan di jalan dengan waktu perjalanan yang juga semakin bertambah, yang meningkatkan kepadatan lalu lintas dan emisi karbon. Pada sisi lain, bentuk daerah perkotaan yang rapat, dengan rancangan daerah dengan banyak tujuan yang terjangkau dengan hanya berjalan kaki, akan mendorong lebih banyak perjalanan dengan berjalan kaki, dan penggunaan kendaraan akan berlangsung lebih singkat, yang kemudian akan menurunkan kepadatan lalu lintas. Sehingga berlawanan dengan asumsi pertama, daerah perkotaan yang padat sesungguhnya dapat menurunkan kepadatan lalu lintas.

c. Langkah ke depan: memanfaatkan urbanisasi dan aglomerasi di Indonesia

Indonesia membutuhkan strategi dengan berbagai sisi untuk mengelola urbanisasi dan memberdayakan pertumbuhan

Indonesia harus memberdayakan urbanisasi untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi ke tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang telah dicapai selama ini. Diperlukan strategi yang berbeda dan memiliki banyak sisi, untuk mengelola urbanisasi agar dapat memberdayakan pertumbuhan secara lebih baik. Tindakan, kebijakan dan intervensi yang mungkin dilakukan harus menjadi suatu rangkaian tindakan kebijakan terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah. Mengenai kebijakan daerah perkotaan terkoordinasi, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana kota-kota dan aglomerasi disekelilingnya bekerja sebagai pusat kegiatan ekonomi, dan untuk menargetkan kebijakan-kebijakan khusus yang dirancang untuk aglomerasi-aglomerasi sesuai dengan ukuran populasi yang berbeda.

Koordinasi metropolitan yang melampaui batas-batas administratif adalah kunci untuk memberdayakan daerah-daerah metropolitan ukuran besar

Pada daerah-daerah metropolitan besar, koordinasi dalam hal investasi infrastruktur yang strategis dan pengembangan ekonomi daerah merupakan hal yang sangat penting. Batas-batas administratif daerah metropolitan yang ada tidak mencerminkan dengan baik batas tata ruang kegiatan ekonomi atau dinamika pasar daerah. Masalah-masalah yang mempengaruhi pasar dan kegiatan-kegiatan tersebut harus dikoordinasikan lintas batas administratif. Sebagian besar kota-kota di Indonesia sedang mengalami pergeseran dalam struktur tata ruang, dari susunan tata ruang dengan satu pusat kota (monosentrik) ke susunan polisentrik. Pada sebagian besar kasus, perkembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru memiliki rancangan yang buruk dengan lemahnya keterpaduan antara investasi yang sedang berjalan, pembangunan daerah perumahan dan layanan perkotaan. Pergeseran dalam susunan tata ruang kota ini harus ditanggapi dengan perencanaan kota yang lebih baik, untuk mendukung penciptaan susunan yang lebih efisien dan mendorong konektivitas yang lebih baik antara kota inti dan kota atau daerah lain di dalam satu daerah metropolitan. Kota-kota besar harus mempertimbangkan revitalisasi dan peremajaan pusat-pusat kota dan daerah perumahan yang tidak lagi memadai, yang membutuhkan keterampilan perencanaan yang mahir, dan yang lebih penting, mekanisme yang baru untuk mendorong konsolidasi lahan.

Masa depan pembangunan daerah perkotaan di Indonesia terletak pada kota-kota berukuran kecil hingga menengah

Pada dekade yang akan datang sebagian besar pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada kota-kota berukuran kecil hingga menengah dengan populasi yang kurang dari 5 juta jiwa. Kota-kota ini akan membutuhkan dukungan pembiayaan dan teknis untuk menampung pertumbuhan sesuai perkiraan. Namun banyak kota-kota kecil yang tidak bertumbuh dan membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kemakmuran pada penduduknya. Kota-kota dengan ukuran yang lebih kecil akan sangat terbantu dengan peningkatan lingkungan usaha, investasi pada layanan dasar dan konektivitas yang lebih baik ke pusat-pusat regional.

Indonesia memiliki kesempatan untuk merealisasikan manfaat potensial urbanisasi dengan kebijakan dan investasi yang tepat

Transformasi Indonesia dari negara pedesaan ke mayoritas perkotaan sedang berlangsung dengan pesat, dan mungkin merupakan tantangan yang paling kritis di saat ini, terutama dengan dampak jangka panjangnya bagi ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Pada tahap ini, Indonesia memiliki kesempatan yang berharga untuk mengarahkan urbanisasi dengan tepat sebelum terlanjur terjebak ke suatu susunan tata ruang yang perbaikannya akan berbiaya sangat besar. Namun dengan besarnya manfaat potensial yang dapat dicapai dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia memiliki alasan untuk bersikap optimis tentang masa depan pembangunan perkotaannya.

2. Menyusun gambaran tren investasi infrastruktur Indonesia

Tantangan infrastruktur menghambat potensi pertumbuhan Indonesia...

Setelah mengalami penurunan tajam pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998, investasi infrastruktur Indonesia belum mampu kembali ke tingkatan sebelum krisis di atas 7 persen dari PDB. Hal ini sangat berlawanan dengan peningkatan tingkat investasi secara keseluruhan, yang kini berada jauh di atas tingkatan sebelum tahun 1997/98. Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, jumlah dan kualitas infrastruktur tidak mampu memenuhi meningkatnya kebutuhan, yang didorong oleh peningkatan pendapatan, proses produksi yang modern dan cepatnya urbanisasi (seperti dibahas pada bagian yang sebelumnya). Seperti dapat dibenarkan oleh penduduk Jakarta yang telah lama menghadapi permasalahan ini, lalu-lintas di ibukota sering mengalami kemacetan, dan kemacetan parah kini menjadi masalah di banyak kota-kota. Sementara alur perdagangan melalui Tanjung Priok, pelabuhan utama untuk masuk dan keluar dari Indonesia, mengalami penundaan yang panjang, bandar udara sangat padat, pasokan listrik sering mengalami masalah, dan layanan air dan sanitasi, di banyak daerah, tidak dapat mengimbangi permintaan.

...yang memicu peningkatan fokus kebijakan pada investasi infrastruktur

Tantangan infrastruktur Indonesia telah diketahui dan Pemerintah telah bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.¹¹ Sejumlah kerangka kebijakan dan kelembagaan telah diluncurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan terdapat peningkatan alokasi APBN yang signifikan terhadap belanja modal dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, informasi yang konsisten dan andal tentang investasi infrastruktur di Indonesia tidak mudah untuk didapatkan

Walaupun infrastruktur dan kebutuhan akan data yang baik untuk kebijakan yang baik (good data to make good policy) sangat penting, data dan informasi yang konsisten tentang tingkat investasi infrastruktur di Indonesia, dan tingkat stok infrastruktur, sangat minim dan tidak mudah untuk didapatkan. Untuk mengisi kesenjangan ini, Bank Dunia telah menghimpun data tentang investasi infrastruktur, menurut sektor dan menurut sumber—pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta—dari pertengahan tahun 90an.¹² Upaya penghimpunan data ini menemui banyak kesulitan, terutama dalam upaya memastikan konsistensi antar waktu (Kotak 5). Data itu karenanya harus dilihat sebagai data awal dan masih membutuhkan banyak penyesuaian dan juga tidak membahas kualitas maupun efisiensi dari investasi tersebut. Dengan catatan-catatan ini, bagian ini menyajikan temuan-temuan awal tentang tren terakhir tingkat investasi infrastruktur di Indonesia dan menyoroti bidang yang dapat menjadi analisis di masa depan, seperti memahami keterkaitan antara investasi infrastruktur Indonesia, dan stok modal infrastruktur dan kinerja pertumbuhan.¹³

¹¹ Untuk analisis yang berkaitan lihat pada *IEQ* edisi bulan Juni 2012 untuk tinjauan infrastruktur Indonesia dan tentang Masterplan:

Lihat juga *IEQ* edisi bulan Desember 2012 untuk tinjauan APBN 2013 dan analisis terpilah dari akses terhadap layanan infrastruktur dari Sensus Infrastruktur Desa:

¹² Pengumpulan data menggunakan analisis yang lalu dari Bank Dunia sebagai landasan: Bank Dunia (2005), "Averting Infrastructure Crisis: A Framework for Policy and Action dan Bank Dunia (2007), *Spending for Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities*"

¹³ Bagian ini mengambil dari analisis Bank Dunia yang akan segera diterbitkan tentang "The State of Indonesia's Infrastructure: How it is and how it might have been" oleh Ahya Ihsan, Paul Lemaistre, Jon Saariatmadja dan William Wallace

Kotak 5: Catatan metodologi tentang data investasi infrastruktur di Indonesia

Sangat penting untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan investasi infrastruktur. Dalam pengumpulan data ini, investasi infrastruktur didefinisikan sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara dan pihak swasta di dalam bidang transportasi, irigasi, air bersih dan sanitasi, energi (listrik) dan telekomunikasi. Definisi ini digunakan untuk memastikan konsistensi data lintas periode, entitas dan sektor. Karena sebagian besar informasi berasal dari laporan keuangan atau anggaran, investasi diukur oleh tingkat belanja investasi per periode waktu dan bukan oleh pengukuran fisik, seperti panjang jalan, sistem irigasi dan perairan, kapasitas pembangkitan listrik atau jumlah sambungan telepon. Fokus di bawah ini adalah kepada investasi infrastruktur (belanja modal), yang merupakan sub-bagian dari total belanja infrastruktur yang termasuk pemeliharaan dan belanja lain.

Untuk pemerintah, data dipisahkan menurut pemerintah pusat dan daerah. Pertama, data investasi infrastruktur pemerintah pusat diambil dari informasi anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan merujuk kepada belanja modal kementerian untuk fungsi-fungsi dan sub-fungsi yang berkaitan dengan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan definisi belanja infrastruktur dari Pemerintah yang menyertakan anggaran dan pembiayaan kontingensi seperti belanja untuk dana pembebasan tanah dan suntikan modal kepada Fasilitas Pendukung Infrastruktur, infrastruktur sosial atau masyarakat, pembangunan rumah, pembangunan daerah khusus, dan perkiraan transfer kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti bagian dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)¹⁴. Kedua, data pemerintah daerah dikumpulkan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan dan kemudian diproses lebih lanjut oleh Bank Dunia. Karena format anggaran dan pelaporan pemerintah daerah mengalami perubahan antar waktu, sejumlah asumsi dan penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi. Data belanja modal Pemerintah berbeda dengan investasi infrastruktur karena belanja modal Pemerintah mencakup investasi pada seluruh sektor termasuk, misalnya, gedung-gedung pemerintah dan peralatan militer. Sejumlah masalah yang dijumpai dalam pengumpulan data pemerintah ini termasuk perubahan dalam klasifikasi anggaran dan sistem pelaporan, seperti perubahan dalam klasifikasi dari pemisahan antara belanja rutin dan pembangunan menjadi klasifikasi ekonomi dan fungsional mengikuti klasifikasi fungsi-fungsi pemerintah (COFOG) dari Panduan Statistik Keuangan Pemerintah IMF tahun 2001 (*IMF Government Finance Statistics Manual 2001*).

Untuk sektor swasta, data diperoleh dari *database* Partisipasi Swasta untuk Infrastruktur (*Private Participation in Infrastructure/PPi*) Fasilitas Advisor Infrastruktur Bank Dunia-Pemerintah-Swasta (*World Bank-Public-Private Infrastructure Advisory Facility*). *Database* itu mencakup proyek-proyek yang telah mencapai tahap financial closure (persetujuan pendanaan) yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan swasta dan yang melayani masyarakat secara langsung maupun tidak langsung; fasilitas bersama (seperti kerjasama pembangkit listrik dan jaringan telekomunikasi swasta) tidak disertakan kecuali bagian yang signifikan dari produksinya (20 persen atau lebih) dijual kepada masyarakat sesuai dengan kontrak dengan suatu perusahaan umum (lihat http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_methodology.aspx untuk penjelasan lebih lanjut tentang metodologinya).

Pengumpulan data bagi investasi infrastruktur oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah yang paling menantang. Laporan keuangan dari setiap BUMN (baik cetak maupun elektronik) digunakan karena laporan keuangan BUMN terpusat tidak tersedia. Investasi infrastruktur oleh BUMN diperkirakan dengan menggunakan laporan belanja modal (*capital expenditure/capex*) pada laporan keuangan bila tersedia atau laporan arus kas dari kegiatan investasi bagi mereka yang tidak secara jelas melaporkan belanja modal. Karena tidak adanya sistem pelaporan terpusat dan upaya yang signifikan untuk mengumpulkan data dari perusahaan daerah air minum (PDAM) lintas pemerintah daerah, investasi PDAM dalam air bersih dan sanitasi tidak disertakan.

Catatan: Pembahasan lebih lanjut tentang metodologi, asumsi dan sumber-sumber yang digunakan untuk menghitung data pada bagian ini didokumentasikan pada catatan teknis Bank Dunia Indonesia yang akan datang tentang Data Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Data*)

a. Investasi infrastruktur belum pulih ke tingkatan pra-krisis Asia

Tingkat investasi infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya pulih ke tingkat pra-krisis Asia...

Lebih dari satu dekade setelah krisis tahun 1997/1998, investasi infrastruktur Indonesia belum mampu untuk melampaui 3 hingga 4 persen dari PDB (Gambar 50), dengan pengecualian periode tahun 2007 hingga 2009 dengan rata-rata 5,7 persen dari PDB. Peningkatan yang tiba-tiba ini disebabkan oleh program percepatan investasi dalam pembangkit listrik batu bara oleh PLN (yang juga mendorong impor barang modal— lihat Kotak 4 di Bagian B). Secara riil, rata-rata investasi infrastruktur pada tahun 2010-2011 berada sekitar dua per tiga dari nilainya pada tahun 1995-1997, walaupun secara nominal Rupiah nilainya telah meningkat hampir empat kali lipat. Rata-rata tingkat investasi infrastruktur sebesar 3 persen dari PDB (2010-2011) berada jauh di bawah sebagian besar negara tetangga Indonesia, seperti Cina, Thailand, dan Vietnam, yang telah cenderung memiliki tingkat rata-rata investasi infrastruktur di atas 7 persen dari PDB.¹⁵

...walaupun rasio investasi keseluruhan (*fixed capital investment*) terhadap PDB secara agregat telah meningkat

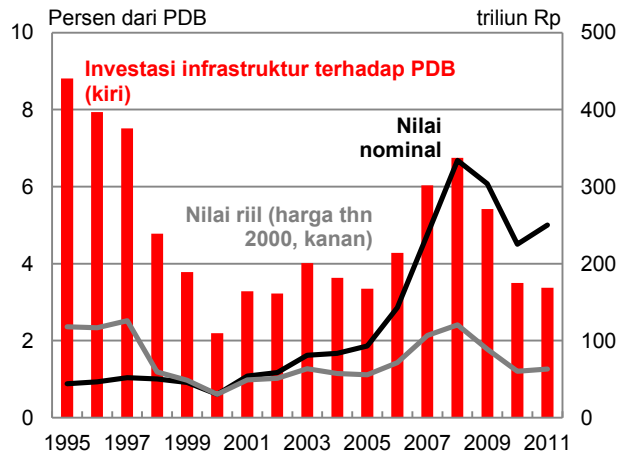
Tingkat investasi modal tetap bruto (*gross fixed capital investment*) lintas seluruh sektor di dalam ekonomi (termasuk konstruksi, mesin dan peralatan, dan peralatan transportasi) juga turun secara signifikan setelah krisis tahun 1997/1998. Namun, dengan didorong oleh investasi konstruksi, rasio keseluruhan investasi terhadap PDB telah pulih dengan

¹⁴ Untuk informasi lebih lengkap tentang definisi Pemerintah, lihat situs Direktorat Jenderal Anggaran.

¹⁵ Bank Pembangunan Asia; Bank Dunia; "Japan Bank for International Cooperation. 2005. Connecting East Asia : A New Framework for Infrastructure.

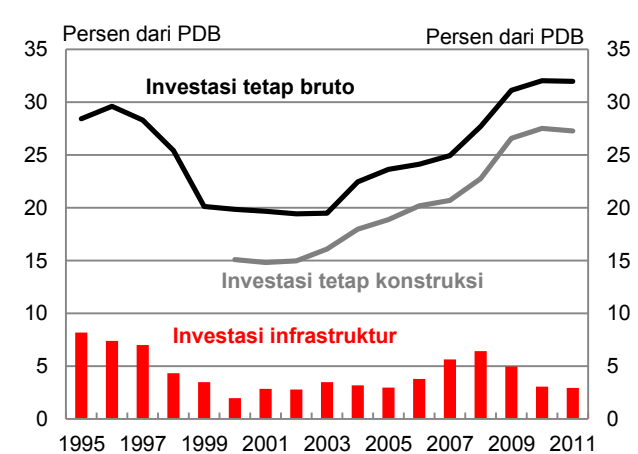
kuat pada beberapa tahun terakhir lebih kuat dibanding investasi infrastruktur, meningkat menjadi 32 persen pada tahun 2010-11, melampaui tingkat yang tercatat sebelum krisis Asia sebesar 29 persen dari PDB (Gambar 51). Secara khusus, rasio investasi keseluruhan juga terus meningkat pada tahun 2010 dan 2011 ketika investasi infrastruktur menurun.¹⁶

Gambar 50: Walau meningkat kuat pada tahun 2007 hingga 2009, investasi infrastruktur kembali turun pada tahun 2010 dan 2011
(investasi infrastruktur sebagai bagian dari PDB, persen; investasi infrastruktur nominal dan riil, triliun Rp)



Catatan: Nilai riil dihitung menggunakan deflator investasi PDB investasi
Sumber: Data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 51: Tidak seperti investasi infrastruktur, rasio investasi tetap secara keseluruhan telah melampaui tingkat pra-krisis tahun 1997/1998
(tingkat investasi nominal sebagai bagian dari PDB, persen)



Catatan: Investasi tetap bruto (pembentukan modal) dan investasi tetap konstruksi dari data PDB nasional
Sumber: BPS; data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

b. Apa yang mendorong tren terakhir dalam investasi infrastruktur?

Terdapat sejumlah perubahan besar di dalam komposisi investasi infrastruktur Indonesia pada tahun-tahun setelah krisis tahun 1997/1998

Dalam tren investasi infrastruktur keseluruhan yang menurun, terdapat sejumlah perubahan komposisi baik dalam sumber investasi dan sektor-sektor ke mana investasi ditujukan. Secara khusus, dengan proses desentralisasi, terjadi peningkatan dalam belanja pemerintah daerah dalam dekade yang lalu, dengan tingkat investasi infrastruktur terhadap PDB-nya telah meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2001 dan 2011.¹⁷ Pada saat bersamaan, bagian investasi infrastruktur oleh swasta telah turun tajam. Secara sektoral, transportasi menunjukkan peningkatan proporsi terhadap keseluruhan, dengan energi mengalami penurunan yang relatif.

Melihat investasi infrastruktur terhadap PDB, investasi oleh pemerintah (pusat dan daerah) menurun sebesar 0,7 poin persentase dari tahun 1995-1997 ke tahun 2010-2011 (Gambar 52). Masing-masing sektor swasta dan BUMN mencatat penurunan sebesar sekitar 2 poin persentase (dari masing-masing 2,3 persen dan 2,8 persen dari PDB pada tahun 1995-1997). Pada periode pra-krisis tahun 1995-1997, BUMN, Pemerintah dan sektor swasta memiliki bagian yang relatif setara. Dibanding penurunan tajam investasi sektor swasta dan perlambatan investasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor publik terhadap keseluruhan investasi infrastruktur meningkat secara pesat didorong oleh pemerintah daerah (Gambar 53). Pada tahun 2010-11, investasi infrastruktur pemerintah daerah mencapai hampir 40 persen dari jumlah investasi infrastruktur, diikuti oleh BUMN, pemerintah pusat dan sektor swasta.

¹⁶ Sementara dua rangkaian angka-angka ini tidak dapat dibandingkan dengan langsung karena susunan dan metodologinya yang berbeda, pola relatifnya cukup menarik dan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut, terutama untuk memahami rincian dari jenis-jenis konstruksi bukan infrastruktur yang berbeda yang dapat mendorong pertumbuhan investasi secara agregat.

¹⁷ Perbandingan deret waktu bagi tingkat pemerintah pusat dan daerah dengan rentangan pra dan pasca periode tahun 2001 mungkin tidak dapat dibandingkan secara langsung karena dampak dari desentralisasi fiskal

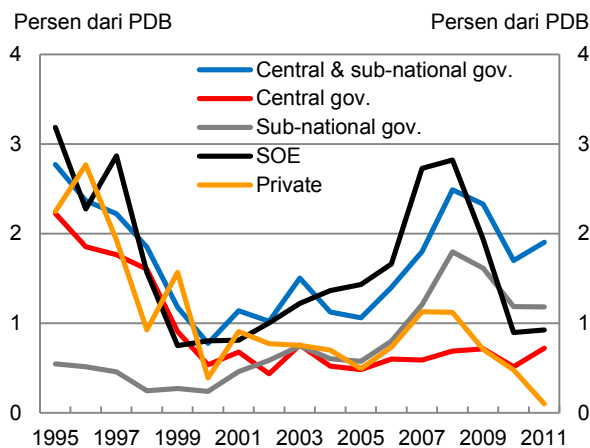
Investasi Pemerintah dalam infrastruktur hampir pulih dari kemerosotannya setelah krisis Asia...

Pada pertengahan tahun 90an, investasi infrastruktur pemerintah berada sekitar 3 persen dari PDB. Investasi itu menurun secara dramatis antara tahun 1998 dan 2000 menjadi di bawah 1 persen. Investasi mulai pulih menjadi 1,7 persen antara tahun 2001 dan 2006, sebelum meningkat menjadi 2,6 persen pada tahun 2007 hingga 2009, yang didorong oleh peningkatan belanja pemerintah daerah, dan mencapai nilai rata-rata sekitar 2,2 persen pada tahun 2010 hingga 2011. Sebagian besar peningkatan dari tahun 2000 merupakan investasi dalam infrastruktur transportasi (jalan) dan air bersih dan sanitasi.

...didorong oleh belanja pemerintah daerah, yang mencerminkan dampak desentralisasi fiskal dari tahun 2001

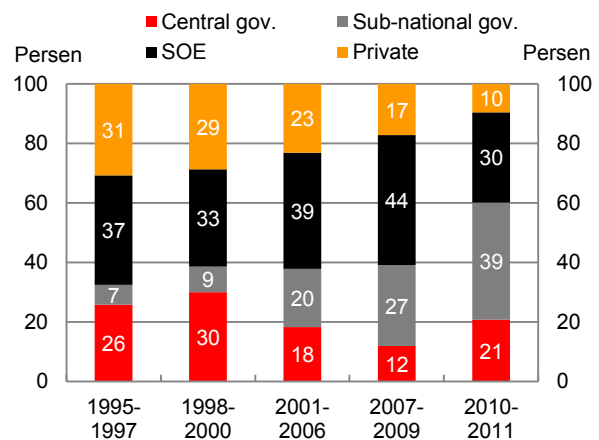
Desentralisasi fiskal, yang mulai berlaku pada tahun 2001, mengubah struktur fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan banyaknya fungsi pengeluaran/expenditure assignment (11 sektor, termasuk pengelolaan dan investasi jalan dan air bersih dan sanitasi) yang ditransfer kepada pemerintah daerah. Sebelum desentralisasi, sekitar 80 persen investasi infrastruktur pemerintah berasal dari pemerintah pusat, dengan hanya 20 persen berasal dari pemerintah daerah. Setelah 2001, komposisi ini bergeser menjadi sekitar 65 persen belanja oleh pemerintah daerah dan hanya 35 persen oleh pemerintah pusat.

Gambar 52: Perbandingan investasi infrastruktur sektor swasta terhadap PDB turun tajam... (investasi infrastruktur sebagai bagian dari PDB, persen)



Sumber: BPS; data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 53: ...sementara porsi pemerintah daerah telah meningkat dengan proses desentralisasi (bagian dari jumlah investasi infrastruktur, persen)



Sumber: Data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

BUMN masih tetap menjadi sumber investasi infrastruktur yang penting...

Walau data tentang investasi infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN sulit didapat, data yang tersedia menunjukkan bahwa BUMN tetap memiliki peran yang penting dalam investasi infrastruktur. Mereka mencatat kontribusi yang relatif stabil terhadap jumlah investasi, bergerak dari 36 persen pada tahun 1995-1997 menjadi 30 persen pada tahun 2010-2011. Investasi BUMN turun secara signifikan setelah krisis Asia, dan meningkat secara marginal antara tahun 2001-2006. Seperti disinggung di atas, investasi BUMN meningkat dengan jelas pada tahun 2007 hingga 2009 didorong oleh belanja modal yang signifikan oleh PLN untuk mendukung penerapan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW. Namun investasi infrastruktur BUMN kemudian menurun, sebagian tampaknya mencerminkan keterbatasan dana setelah krisis keuangan tahun 2008/2009.

...tetapi peranan investasi sektor swasta telah turun dengan tajam

Kontribusi sektor swasta terhadap jumlah investasi infrastruktur di Indonesia menurun menjadi 10 persen pada tahun 2010-2011 dari hampir sepertiga pada tahun 1995-1997. Hal ini juga tercermin dalam nilai investasi nominal yang telah menurun ke di bawah 2 miliar dolar AS, kecuali pada tahun 2007 dan 2008. Tren ini tampaknya mencerminkan tantangan peraturan dan kelembagaan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menarik Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) (lihat IEQ edisi bulan Juni 2011 untuk pembahasan tentang tantangan-tantangan dan kesempatan yang disajikan oleh KPS di Indonesia).

Per sektor, penurunan terbesar dalam investasi swasta adalah pada sektor energi (kecuali pada tahun 2008 dan 2010). Sementara itu, telekomunikasi tetap menjadi sektor yang menarik dengan peningkatan yang kuat dalam investasi pada tahun 2006-2009. Sebaliknya, investasi swasta pada sektor transportasi relatif terbatas. Kinerja investasi infrastruktur sektor swasta yang rendah ini harus ditingkatkan secara signifikan jika harapan besar Pemerintah untuk peran pendanaan sektor swasta, seperti diuraikan di dalam Masterplan, akan direalisasikan.

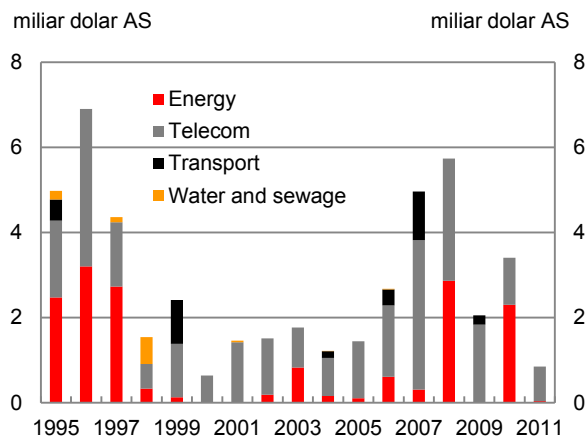
Di dalam penurunan keseluruhan investasi infrastruktur, porsi sektor transportasi telah meningkat secara signifikan, dengan energi mencatat penurunan

Walau jumlah investasi infrastruktur menurun hampir sebesar 30 persen secara riil antara tahun 1995-97 dan 2010-11, sejumlah sektor menunjukkan peningkatan yang kuat. Mereka umumnya adalah sektor-sektor di mana sektor publik memainkan peran utama, seperti transportasi (investasi riil meningkat hingga hampir 60 persen), irigasi (62 persen), dan air dan sanitasi (16 persen). Untuk menempatkan peningkatan tersebut ke dalam konteks, perlu dicatat bahwa selama periode yang sama PDB riil meningkat sebesar lebih dari 50 persen. Sementara itu, energi merosot dengan tajam, sebesar 63 persen, walau terdapat peningkatan yang kuat pada tahun 2008 dan 2010, seperti juga penurunan dalam komunikasi (merosot 69 persen). Penurunan yang tajam di dalam sektor energi dan telekomunikasi pada tahun 2010-11 memiliki pengaruh yang besar kepada keseluruhan penurunan investasi infrastruktur riil.

Sektor transportasi, dan terutama jalan, menunjukkan peningkatan terhadap investasi infrastruktur

Melihat sektor-sektor di mana sebagian besar investasi terjadi, sektor transportasi mencatat peningkatan investasi, dengan penurunan tercatat untuk energi dan telekomunikasi. (Gambar 55). Sebagai akibatnya, sektor transportasi mencatat peningkatan proporsi terhadap jumlah investasi infrastruktur dari 20 persen pada tahun 1995-1997 menjadi lebih dari setengah pada tahun 2010-2011 (Gambar 56). Namun hal ini pada umumnya didorong oleh investasi pemerintah daerah untuk jalan. Menurut analisis terbaru dari Bank Dunia, panjang jalan daerah telah meningkat sebesar sepertiga antara tahun 2001 dan 2009 dari 287.577 km pada tahun 2001 menjadi 384.810 km pada tahun 2009.¹⁸ Namun terdapat sejumlah keprihatinan efisiensi yang berkaitan dengan belanja ini, seperti tidak cukupnya tingkat belanja operasional dan pemeliharaan, dan fragmentasi kelembagaan yang mendorong investasi jalan baru yang tidak sejalan dengan jaringan transportasi terpadu, dan rancangan dan kualitas jalan yang di bawah standar. Pada sisi lain, laju pembangunan jalan tol sangatlah lambat karena tantangan implementasi. Panjang jalan tol hanya sedikit sekali bertambah pada beberapa tahun terakhir, sepanjang 742 km pada tahun 2010 (kurang dari sepertiga dari sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang 2.400 km).

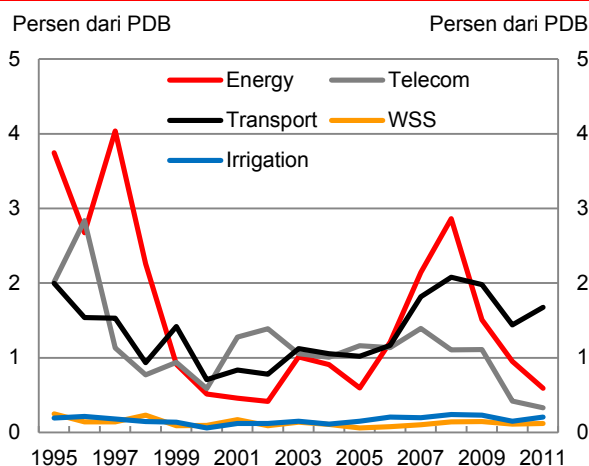
Gambar 54: Investasi infrastruktur sektor swasta di Indonesia menurun sejak tahun 2008
(investasi infrastruktur sektor swasta, miliar dolar AS)



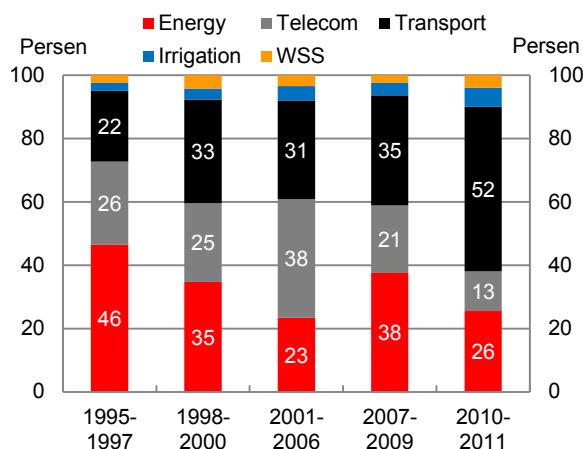
Sumber: Database PPI Bank Dunia

¹⁸ Bank Dunia. 2012. "Investing in Indonesia's Roads: Improving efficiency and closing the financing gaps".

Gambar 55: Setelah meningkat pada tahun 2007 hingga 2009, investasi sektor energi telah menurun, dan juga pada telekomunikasi...
(investasi infrastruktur sebagai bagian dari PDB, persen)



Gambar 56: ...tetapi investasi dalam transportasi meningkat, terhitung setengah dari jumlah investasi (bagian dari jumlah investasi infrastruktur, persen)



Catatan: WSS adalah water supply and sanitation (air bersih dan sanitasi)
Sumber: BPS; data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: Data investasi infrastruktur seperti dirinci pada Kotak 5 dan perhitungan staf Bank Dunia

Investasi irigasi dan pasokan air dan sanitasi telah meningkat tetapi jumlahnya tetap relatif kecil

Irigasi dan air bersih dan sanitasi mewakili bagian yang relatif kecil dari jumlah investasi infrastruktur, yang secara umum didorong oleh belanja pemerintah. Proporsi investasi yang dialokasikan kepada irigasi menunjukkan sedikit peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Proporsi air bersih dan sanitasi tetap relatif stabil, yang dapat mencerminkan tidak adanya informasi tentang investasi pemerintah daerah dari PDAM.

Kegagalan untuk meningkatkan investasi infrastruktur tampaknya telah membawa dampak kepada pertumbuhan Indonesia dan hasil pembangunan

e. Menghubungkan infrastruktur, pertumbuhan dan hasil pembangunan

Penelitian yang luas menemukan bahwa investasi infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur meningkatkan produktivitas dan menarik kegiatan usaha dengan menurunkan biaya transportasi dan produksi dan memfasilitasi akses pasar. Infrastruktur yang bekerja dengan baik memungkinkan penduduk untuk mengakses layanan utama dan kesempatan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan-perusahaan dalam negeri, memberi stimulasi kepada investasi dalam dan luar negeri, mengintegrasikan pasar-pasar dalam negeri dan menghubungkannya secara rendah biaya kepada pasar-pasar di wilayah dan negara lain. Sebaliknya, kegagalan untuk mempertahankan tingkat investasi infrastruktur yang memadai dapat menjadi beban yang signifikan terhadap realisasi pembangunan dan pertumbuhan.

Kebutuhan investasi infrastruktur cukup besar, bahkan hanya untuk menjaga tingkat stok infrastruktur yang telah ada

Seberapa besar dampak dari tren dalam investasi infrastruktur Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi selama dekade yang lalu dan yang akan datang? Jawaban atas pertanyaan yang rumit ini berada di luar cakupan bagian ini, tetapi terdapat sejumlah poin utama yang perlu disoroti dalam konteks data yang dibicarakan di atas. Pertama, dampak dari peningkatan investasi infrastruktur terhadap peningkatan pertumbuhan dapat berukuran signifikan. Penelitian empiris OECD yang terakhir yang meneliti kaitan antara investasi infrastruktur (termasuk perbaikan dan pemeliharaan) dan kinerja PDB menemukan bahwa investasi dalam infrastruktur fisik dapat mendorong hasil (*output*) ekonomi jangka panjang lebih tinggi dari investasi fisik apapun.¹⁹ Sebagai contoh, elastisitas infrastruktur yang diperkirakan untuk *output* di Cina berada pada kisaran 0,20 hingga 0,41—yaitu bahwa peningkatan 10 persen dalam stok infrastruktur berkaitan

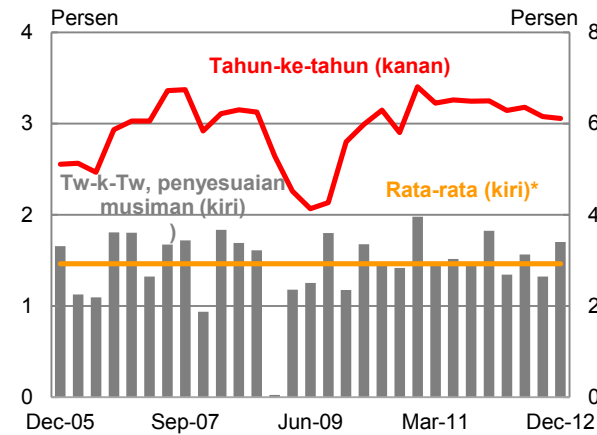
¹⁹ D. Sutherland, S. Araújo, B. Égert and T. Kozluk, 2009, "Infrastructure investment: links to growth and the role of public policies", *OECD Working Paper* No. 686

dengan peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 2 hingga 4,1 persen.²⁰ Kedua, walaupun sebagian besar penekanan tertuju pada tingkat investasi infrastruktur, perlu juga mendapat penekanan pada kualitas dan efisiensi investasi, termasuk alokasi belanja lintas berbagai jenis infrastruktur. Ketiga, investasi baru bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan tetapi bagaimana aset-aset infrastruktur yang ada dipelihara untuk memperpanjang masa penggunaan dan kualitasnya. Jika tidak, dibutuhkan tingkat investasi bruto yang cukup besar hanya untuk menutupi depresiasi dari, apalagi meningkatkan, persediaan stok infrastruktur.

²⁰ Sahoo dan Nataraj, 2010, "Infrastructure development and economic growth in China, Institute of Developing Economies"

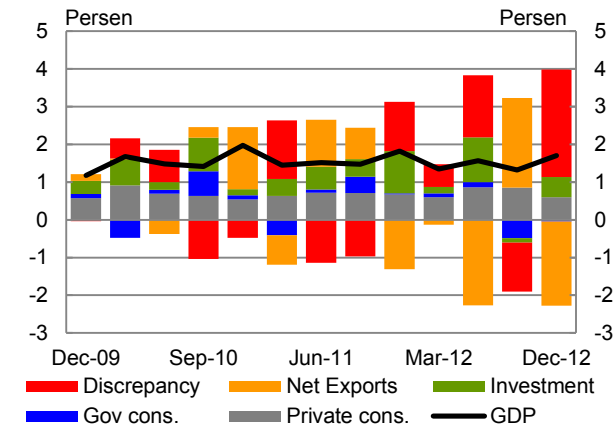
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran gambar 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan (pertumbuhan PDB riil, persen)



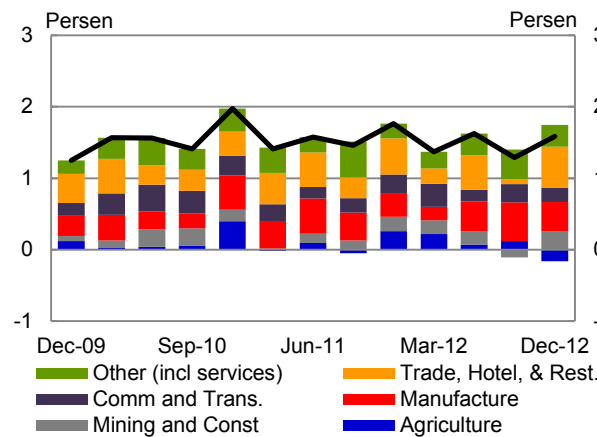
*Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw pada Q4 2005-Q4 2012
Sumber: BPS, kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran (kontribusi pertumbuhan trimulan-ke-triwulan riil PDB, penyesuaian musim, persen)



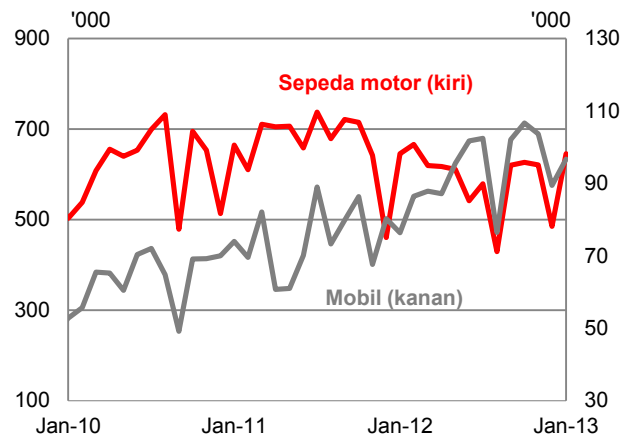
Sumber: BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 3: Kontribusi produksi terhadap PDB (Kontribusi GDP triwulan dengan penyesuaian musiman)



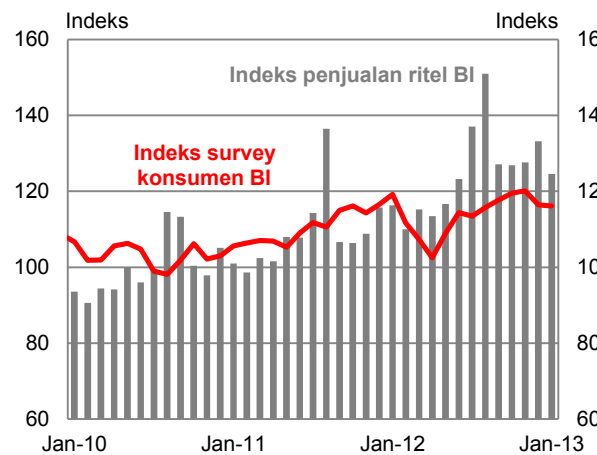
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil (bulanan, unit)



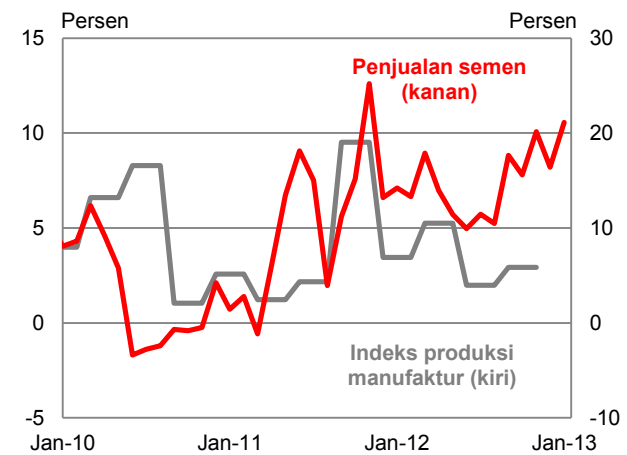
Sumber: CEIC

Lampiran gambar 5: Indikator konsumen (indeks)



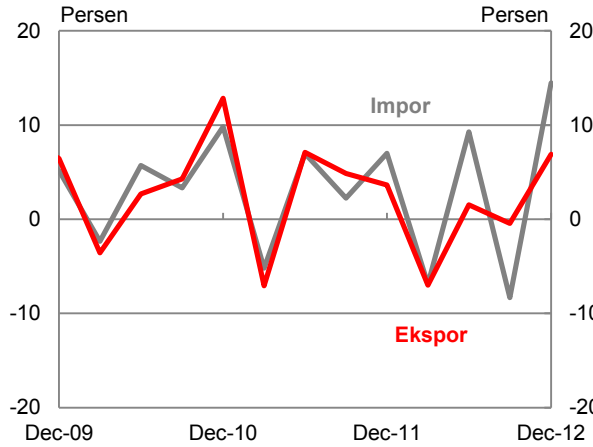
Sumber: BI

Lampiran gambar 6: Indikator kegiatan industri (rata-rata 3 bulanan, pertumbuhan tahun-ke-tahun)



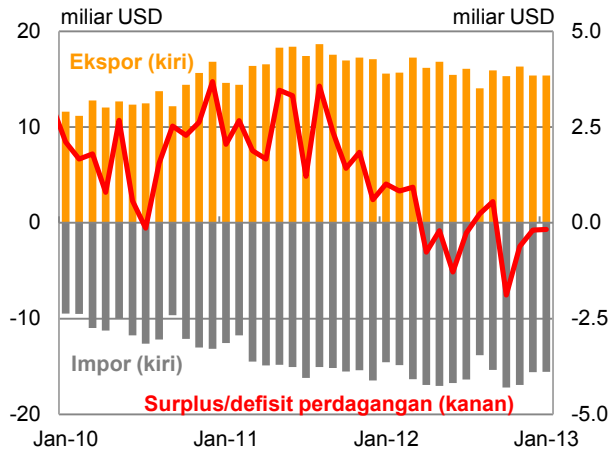
Sumber: CEIC

Lampiran gambar 7: Aliran perdagangan riil
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan)



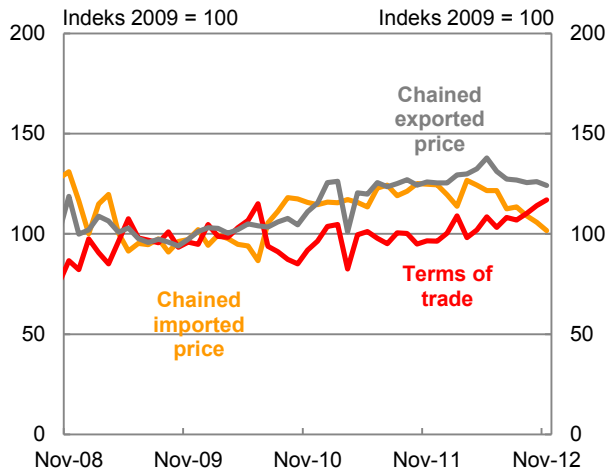
Sumber: BPS (Neraca Nasional) dan Bank Dunia

Lampiran gambar 9: Neraca perdagangan
(miliar USD)



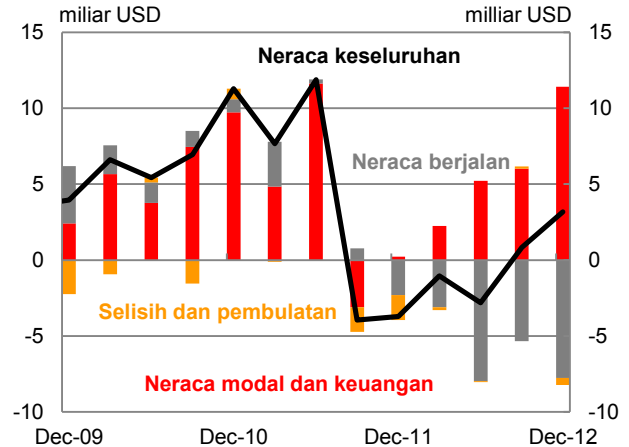
Sumber: BPS

Lampiran gambar 11: Term of trade dan implisit ekspor-impur berdasarkan chained Fisher-indices
(indeks 2009=100)



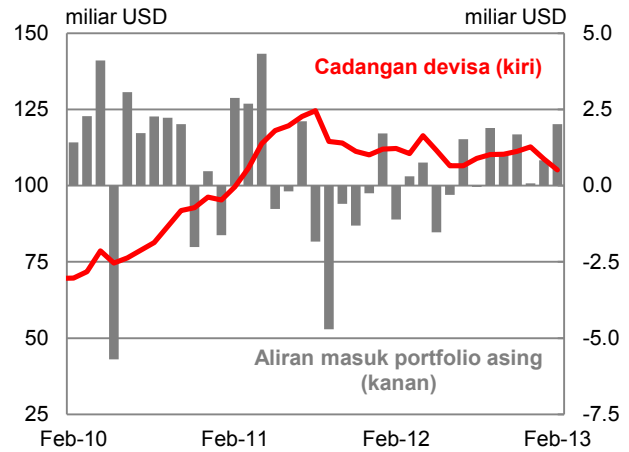
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 8: Neraca pembayaran
(miliar USD)



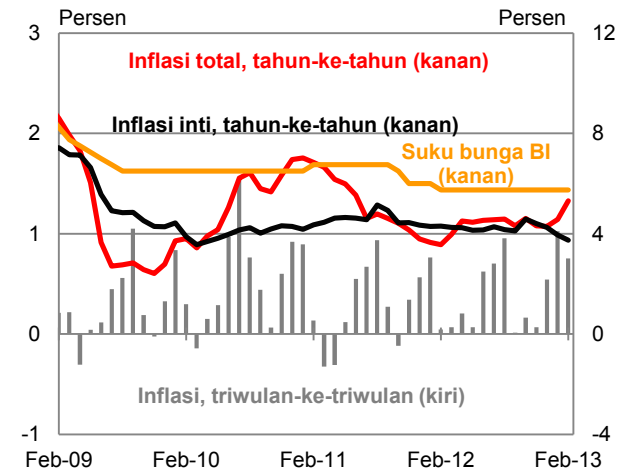
Sumber: BI

Lampiran gambar 10: Cadangan devisa dan modal asing
(miliar USD)



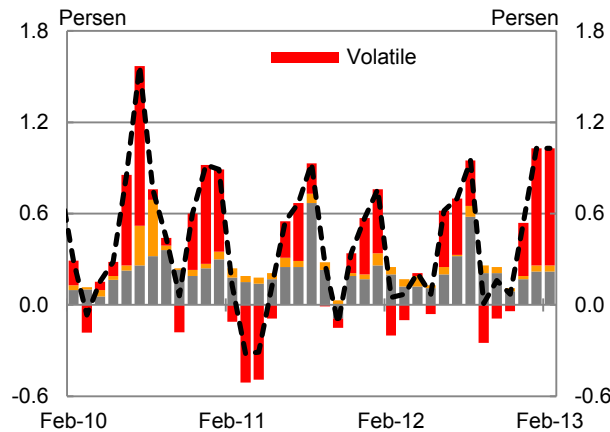
Sumber: BI; CEIC; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)



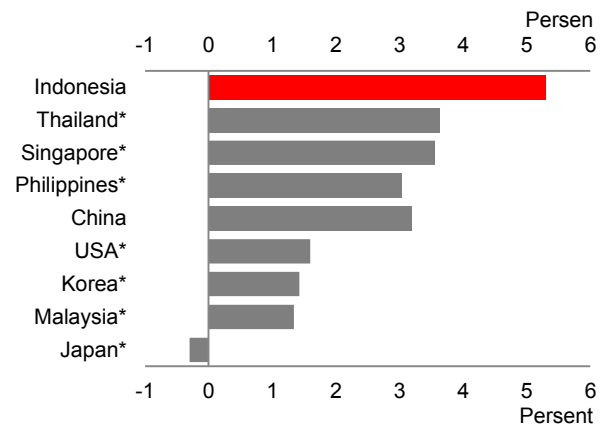
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 13: Rincian bulanan tingkat harga konsumen (persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)



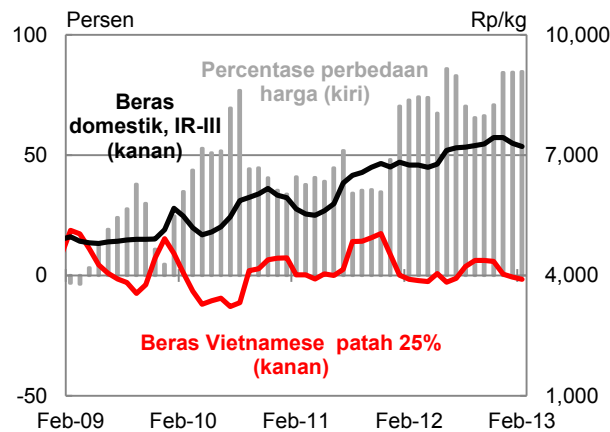
Sumber: BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 14: Perbandingan tingkat inflasi antar negara tetangga (pertumbuhan tahun-ke-tahun, Februari 2013)



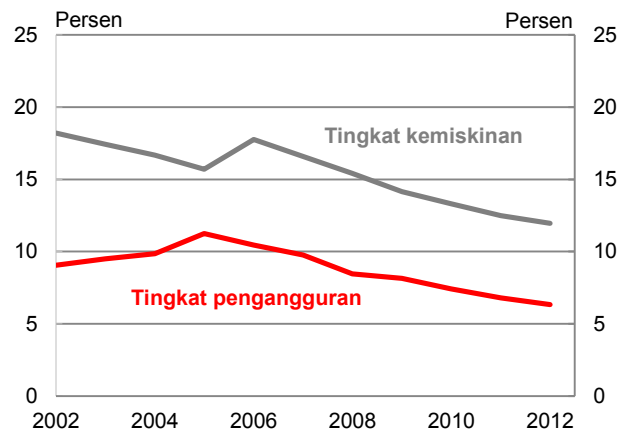
*January merupakan data terkini
Sumber: BPS; CEIC

Lampiran gambar 15: Harga beras kulakan di pasar domestik dan internasional (Rupiah per kg)



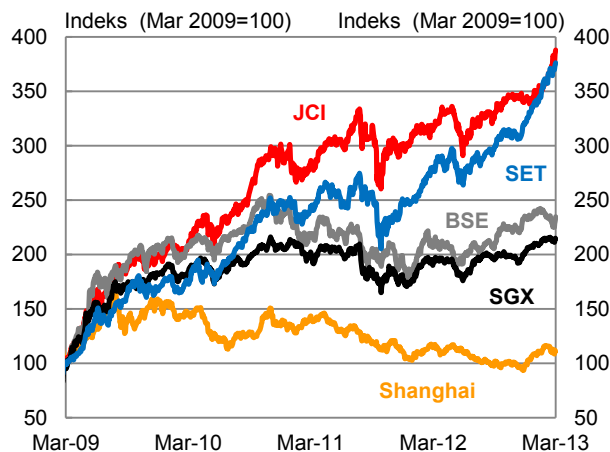
Sumber: PIBIC; FAO; Bank Dunia

Lampiran gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (data tahunan, persen)



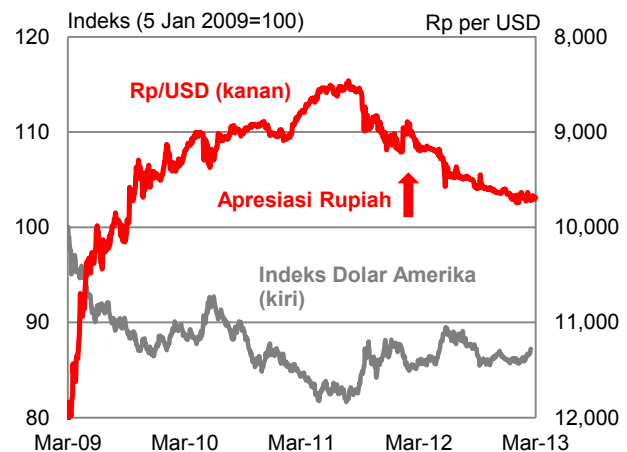
Note: Data tenaga kerja dari Sakernas Februari
Source: BPS

Lampiran gambar 17: Indeks saham regional (indeks harian)



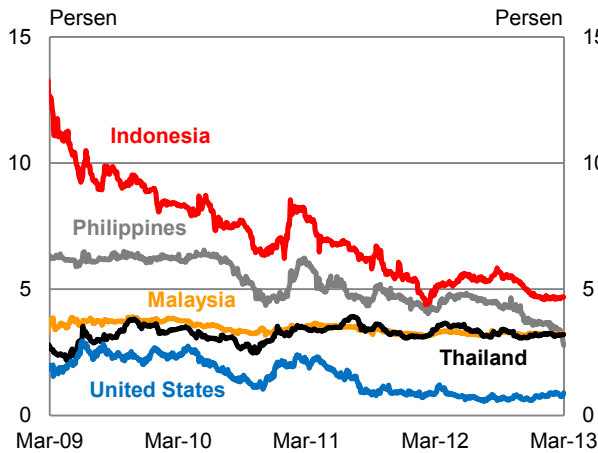
Sumber: CEIC; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 18: Indeks spot dolar Amerika & rupiah (indeks dan tingkat harga harian)



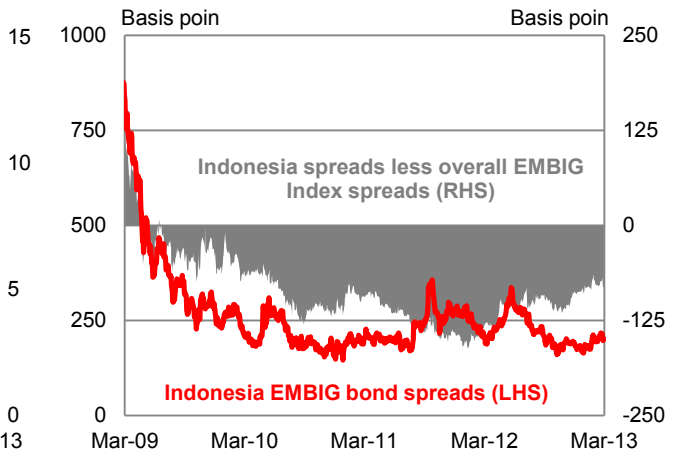
Sumber: CEIC; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal (persen, harian)



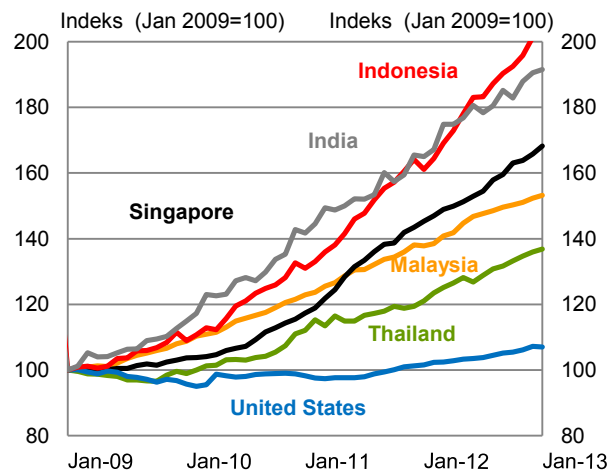
Sumber: CEIC; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 20: Spread EMBIG obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika (basis poin, harian)



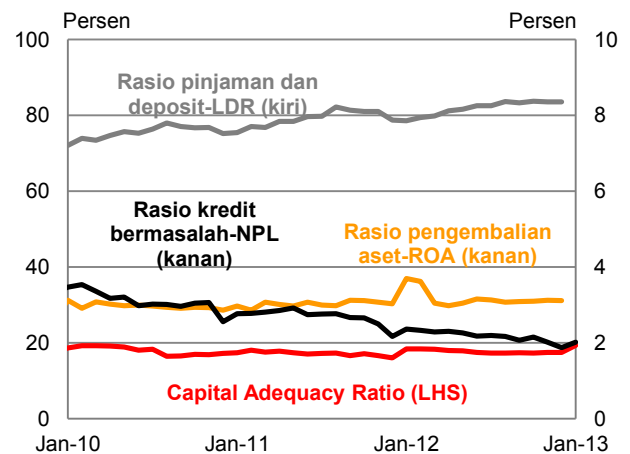
Sumber: BI BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 21: Tingkat kredit bank umum (indeks, bulan Januari 2008=100)



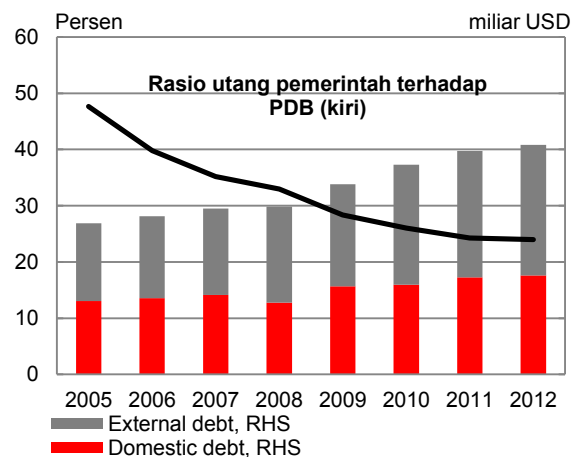
Sumber: CEIC; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan (bulanan, persen)



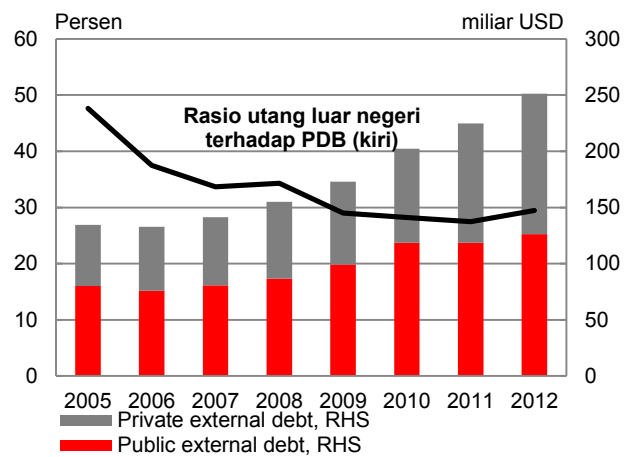
Sumber: BI

Lampiran gambar 23: Utang pemerintah (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: Depkeu; BI; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran gambar 24: Utang luar negeri (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: Depkeu; BI; BPS; kalkulasi staf Bank Dunia

Lampiran tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja pemerintah
(triliun Rupiah)

	2009	2010	2011	2012	2013
	Hasil	Hasil	Hasil	Hasil awal	Anggaran
A. Penerimaan negara dan hibah	849	995	1.211	1.336	1.530
1. Penerimaan pajak	620	723	874	980	1.193
2. Penerimaan non-pajak	227	269	331	352	332
B. Belanja	937	1.042	1.295	1.482	1.683
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1.001	1.154
2. Transfer ke pemerintah daerah	309	345	411	480	529
C. Neraca utama	5	42	9	-46	-40
D. SURPLUS / DEFISIT	-89	-47	-84	-146	-153
(Persen dari PDB)	-1,6	-0,7	-1,1	-1,8	-1,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran tabel 2: Neraca Pembayaran
(milliar USD)

	2009	2010	2011	2011				2012			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neraca pembayaran	12,5	-30,3	-11,9	-7,7	-11,9	4,0	3,7	1,0	2,8	-0,8	-3,2
<i>Persen dari PDB</i>	2,3	-4,3	-1,4	-3,9	-5,6	1,8	1,7	0,5	1,3	-0,4	-1,5
Neraca berjalan	10,6	5,1	1,7	2,9	0,3	0,8	-2,3	-3,1	-8,0	-5,3	-7,8
<i>Persen dari PDB</i>	2,0	0,7	0,2	1,5	0,1	0,3	-1,1	-1,4	-3,7	-2,4	-3,6
Neraca perdagangan Pendapatan bersih & Transfers berjalan	21,2	21,3	24,2	7,4	6,1	7,1	3,5	1,7	-2,1	0,7	-2,7
	-10,6	-16,2	-22,5	-4,5	-5,8	-6,4	-5,8	-4,8	-5,9	-6,1	-5,0
Neraca Modal dan Keuangan	4,9	26,6	13,6	4,8	11,6	-3,1	0,2	2,3	5,2	6,0	11,4
<i>Persen dari PDB</i>	0,9	3,8	1,6	2,4	5,5	-1,4	0,1	1,0	2,4	2,7	5,2
Investasi langsung	2,6	11,1	11,5	3,8	2,5	2,1	3,1	1,6	4,0	4,3	4,5
Investasi Portofolio	10,3	13,2	3,8	2,9	5,2	-4,6	0,2	2,6	3,9	2,5	0,2
Investasi lain	-8,2	2,3	-1,8	-1,9	3,9	-0,7	-3,2	-2,0	-2,7	-0,8	6,7
Kesalahan & Omisi	-3,0	-1,5	-3,4	-0,1	0,0	-1,6	-1,6	-0,2	-0,1	0,2	-0,5
Cadangan devisa*	66,1	96,2	110,1	105,7	119,7	114,5	110,1	110,5	106,5	110,2	112,8

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI

Lampiran tabel 3: Sekilas tentang perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
<u>Neraca Nasional (% perubahan)¹</u>							
PDB riil	9,0	8,4	4,9	5,7	6,2	6,5	6,2
Investasi riil	25,3	22,6	11,4	10,9	8,5	8,8	9,8
Konsumsi riil	23,2	21,7	4,6	4,3	4,1	4,5	4,8
Swasta	23,9	22,7	3,7	0,9	4,7	4,7	5,3
Pemerintah	18,8	14,7	14,2	6,6	0,3	3,2	1,2
Ekspor riil, barang dan jasa	22,5	18,0	30,6	16,6	15,3	13,6	2,0
Impor riil, barang dan jasa	30,2	29,6	26,6	17,8	17,3	13,3	6,6
Investasi (% PDB)	28,3	28,4	19,9	23,6	32,0	32,0	33,2
Tabungan domestik bruto (% PDB)	32,3	30,6	31,8	27,5	34,4	36,4	36,6
Nominal PDB (milyar dolar AS)	114	202	165	286	709	846	878
PDB per capita (dolar AS)	636	1035	804	1,300	2,984	3,498	3,563
<u>Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)¹</u>							
Penerimaan dan hibah	18,8	15,2	20,8	17,8	15,5	16,3	16,2
Penerimaan bukan pajak	1,0	4,8	9,0	5,3	4,2	4,5	4,3
Penerimaan pajak	17,8	10,3	11,7	12,5	11,3	11,8	11,9
Pengeluaran	11,8	13,9	22,4	18,4	16,2	17,4	18,0
Konsumsi	„	3,9	4,0	3,0	3,8	4,0	4,1
Modal	„	4,6	2,6	1,2	1,3	1,6	1,7
Bunga pinjaman	„	1,4	5,1	2,3	1,4	1,3	1,2
Subsidi	„	„	6,3	4,3	3,0	4,0	4,2
Surplus/defisit	0,4	1,3	-1,6	-0,6	-0,7	-1,1	-1,8
Utang Pemerintah	41,9	32,3	97,9	47,6	26,0	24,3	23,9
Utang luar negeri pemerintah	41,9	32,3	51,4	22,3	9,5	8,3	7,4
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61,0	61,5	87,1	47,7	28,2	27,5	29,5
<u>Neraca Pembayaran (% PDB)³</u>							
Neraca pembayaran keseluruhan	„	„	„	0,2	-4,3	-1,4	0,0
Neraca transaksi berjalan	-2,6	3,2	4,8	0,1	0,7	0,2	-2,8
Ekspor, barang dan jasa	25,6	26,2	42,8	35,2	24,6	26,2	24,1
Impor, barang dan jasa	24,0	26,9	33,9	32,2	21,6	23,3	24,4
Transaksi berjalan	1,6	-0,8	8,9	3,0	3,0	2,9	-0,3
Neraca transaksi keuangan	„	„	„	0,0	3,7	1,6	2,8
PMA, neto	1,0	2,2	-2,8	1,9	1,6	1,4	1,6
Cadangan devisa bruto (USD billion)	8,7	14,9	29,4	34,7	96,2	110,1	112,8
<u>Moneter (% change)³</u>							
Deflator PDB ¹	7,7	9,9	20,4	14,3	8,3	8,1	4,5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	„	„	„	9,1	6,5	6,6	5,8
Kredit domestik	„	„	„	28,7	17,5	24,4	24,2
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) ⁴	1,843	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387
<u>Harga-harga (% perubahan)¹</u>							
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9,9	9,0	9,4	17,1	7,0	3,8	4,3
Indeks harga konsumen (rata-rata)	7,7	9,4	3,7	10,5	5,1	5,4	4,3
Keranjang harga kemiskinan	„	„	„	10,8	8,7	8,2	6,5
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) ⁵	„	17	28	53	79	112	113

Sumber: 1 BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia; 2 Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia (tahun 1995 adalah FY 1995/1996; dan 2000 meliputi 9 months); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC

Lampiran tabel 4: Sekilas tentang perkembangan indikator sosial Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Kependudukan¹							
Penduduk (juta)	184	199	213	227	240	242	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	30,6	35,6	42,0	45,9	49,9	50,7	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67,3	60,8	54,7	51,2	48,3	47,8	..
Angkatan Kerja²							
Angkatan kerja, total (juta)	75	84	98	106	117	117	118
Laki-laki	46	54	60	68	72	72	73
Perempuan	29	31	38	38	45	45	45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	55	43	45	44	38	36	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	14	19	17	19	19	21	22
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	44	43
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2,5	7,0	8,1	11,2	7,1	6,6	6,1
Laki-laki	2,5	5,4	7,2	9,3	6,1	5,9	5,8
Perempuan	2,7	9,8	9,6	14,7	8,7	7,6	6,8
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³							
Konsumsi rumah tangga, median (Rp,000)	104	211	374	421	446
Garis kemiskinan nasional (Rp,000)	73	129	212	234	249
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	35	31	30	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19	16	13	12	12
Di perkotaan	14,6	11,7	9,9	9,2	8,8
Di perdesaan	22,4	20,0	16,6	15,7	15,1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15,5	13,3	11,0	10,2	9,5
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12,6	12,8	9,5	9,7	8,8
GINI indeks	0,30	0,35	0,38	0,41	0,41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9,6	8,7	7,9	7,4	7,5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38,6	41,4	43,5	46,5	46,7
Pengeluar publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	4,4	3,9	3,9	4,2
Kesehatan dan Gizi¹							
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5)	..	27	25	24	18
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) ⁵	98	..	46	..	44
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	27	19
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	67	..	35	..	34
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	600	420	340	270	220
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran)	36	..	66	..	82
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 1 tahun)	0	..	72	..	76
Pengeluaran untuk kesehatan (% of GDP)	..	1,8	2,0	2,1	2,6
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% of GDP)	..	0,6	0,7	1,0	1,3
Pendidikan³							
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	92	92	92	93
APM perempuan (% dari total partisipasi)	48	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	52	61	60	60
APM perempuan (% dari total partisipasi)	50	50	50	49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	9	16	14	15
APM perempuan (% dari total partisipasi)	55	53	50	54
Angka melek huruf Dewasa (%)	91	91	91	92
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)	2,7	3,4	3,5	3,5
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)	14,5	19,7	19,8	18,9
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹							
Penduduk dengan akses air bersih (% tot penduduk)	70	74	78	80	82
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	91	92
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	74
Penduduk dengan akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	32	38	44	50	54
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	69	73
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	35	39
Lainnya¹							
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	3,3	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8,0	11,3	18,0	18,2	18,6

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan Bank Dunia; ⁴ Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, PKH (kecuali tahun 2012 dari APBN-perubahan); ⁵ Survey Kependudukan dan Kesehatan Indonesia; ⁶ Inter-Parliamentary Union

